



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRO RENA POLDA LAMPUNG

GEDUNG
TUGER PRESTIS

Coach :
AKBP GRACE K.D. RAHAKBAU, S.I.K.,M.SI

JOKO SISWONDO H., S.E
NOSIS : 20230707012061



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRO RENA
POLDA LAMPUNG**



OLEH :

JOKO SISWONDO H., S.E.
NOSIS: 20230707012061

PESERTA PKN TK II POLRI ANGKATAN XVIII T.A 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN
TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRO RENA
POLDA LAMPUNG**

Peserta Pelatihan :

JOKO SISWONDO H., S.E.

Nosis :20230707012061

Telah disetujui pada tanggal, November 2023

Pusdikmin Lemdiklat Polri

Coach,

Mentor,

Grace K.D. Rahakbau, S.I.K..M.Si

Y.Budi Meidianto, S.I.K., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga *reformer* dapat menyelesaikan proyek perubahan dalam rangka mengikuti PKN TK II Polri Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2023. *Shalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Proyek perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan PKN TK II Polri Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2023. Judul Proyek Perubahan ini adalah **“STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRO RENA POLDA LAMPUNG”**.

Reformer menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Proyek Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, materi dan kemampuan *reformer* dalam menuangkan gagasan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan Proyek Perubahan ini sangat *Reformer* harapkan, agar dapat dilanjutkan sebagai Proyek Perubahan yang bermuara pada diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sekembalinya kekesatuan.

Terwujudnya penyusunan Proyek Perubahan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing *Reformer* baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, *Reformer* menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengikuti PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A.2023.
2. Karorena Polda Lampung Kombes Pol Y. Budi Meidianto, S.I.K., M.H. yang telah memberikan dukungan dalam PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A. 2023 dan selaku mentor yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu serta membimbing dalam menyelesaikan Proyek perubahan ini.
3. Kapusdikmin Polri Kombes Pol Drs. Taufik Supriyadi atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A. 2023.
4. Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung, S.E., S.I.K., M.Si., M.M yang telah memberikan dukungan dalam PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A.2023.
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, M.T. yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini.
6. Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung Drs. M. Firsada, M. Siyang telah banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini.
7. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo. K., S.T., M.M. yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini.
8. AKBP Grace K.D. Rahakbau, S.I.K., M.Si. selaku *COACH project leader* yang telah banyak membantu dan membimbing *project leader* dalam menyelesaikan pelaksanaan proyek perubahan ini.
9. Seluruh Personil Pusdikmin Polri atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada *action leader* selama mengikuti PKN Tk. II Polri Angkatan XVIII T.A.2023.
10. Kepada seluruh Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan dalam mengikuti PKN Tk. II Polri Angkatan XVIII T.A. 2023.
11. Seluruh TIM Efektif dan seluruh Staf Birorena Polda Lampung atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada *action leader*

selama melaksanakan Proyek perubahan ini.

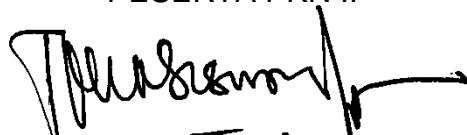
12. Para Kepala Bappeda Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung, Para Kepala Kesbangpol Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung, dan Para Kepala Bpkad Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung yang telah berkontribusi dalam penyelesaian proyek perubahan.
13. Istri tercinta Estiasih Widiyastuti, S.Pd, anak tersayang Jatra Putra Suharsono, Andira Pramesti Suharsono, dan Firda Primastuti Suharsono. yang telah banyak memberikan do'a, motivasi, semangat dan dukungan kepada *action leader* selama pelaksanaan PKN TK II POLRI ANGKATAN XVIII T.A. 2023.
14. Teman-teman peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan dukungan kepada *action leader* selama masa PKN TK II POLRI ANGKATAN XVIII T.A 2023 dan juga penyelesaian proyek perubahan.

Reformer menyadari akan ketidaksempurnaan pelaksanaan Proyek Perubahan ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu besar harapan *reformer* kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran guna menghasilkan sebuah Proyek Perubahan yang lebih baik dan sempurna dari segi substansi maupun penulisannya dalam penyusunan laporan akhir ProyekPerubahan nantinya.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT serta *reformer* berharap Proyek Perubahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi *reformer* dan pembaca pada umumnya.

Bandung, November 2023

PESERTA PKN II


JOKO SISWONDÒ H., S.E.
NOSIS 20230707012061

EXECUTIVE SUMMARY

Proyek Perubahan mengenai strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung merupakan suatu gagasan strategis untuk mengatasi permasalahan keamanan daerah khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana umum melalui kebijakan penataan anggaran yang tepat sasaran. Tujuan utama dari Proyek Perubahan ini adalah untuk memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Proyek perubahan ini sangat penting untuk di kaji karena sesuai dengan amanat dari Presiden RI bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Dalam hal ini organisasi Polri harus mereformasi diri beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai Langkah inovasi dalam penataan anggaran sesuai dengan harapan Polri yang presisi serta berorientasi dalam mewujudkan harkamtibmas dan kesejahteraan masyarakat.

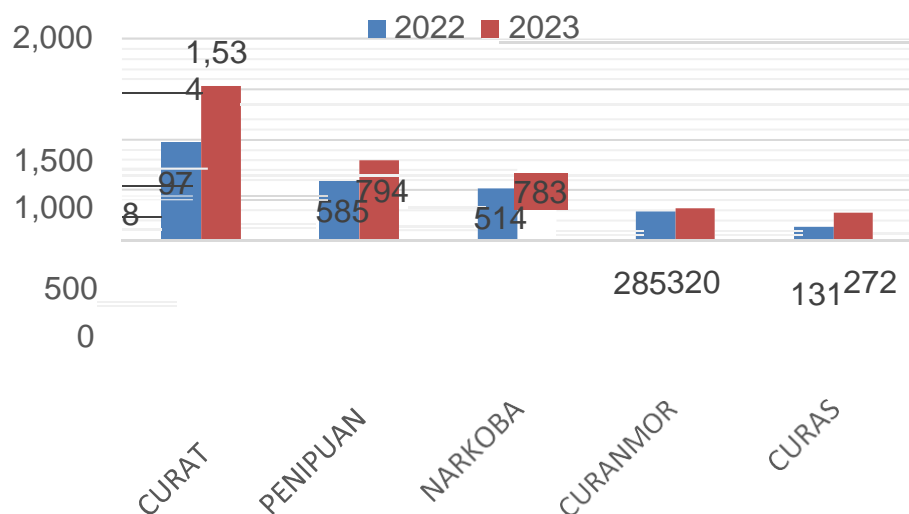
Organisasi Polri harus mereformasi diri dan beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai langkah inovasi dalam penataan anggaran secara komprehensif, pembiayaan tindak pidana umum secara optimal sehingga dapat selaras dengan tujuan pembangunan nasional yakni peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan dan percepatan aktual Presiden. Reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh unit organisasi maupun masyarakat luas.

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Polri dalam mewujudkan situasi kamtibmas banyak membuat perubahan, baik dalam sistem ketatanegaraan dan tata cara penegakan hukum, semenjak dimulainya era reformasi organisasi Polri pun ikut menyesuaikan dengan melakukan tata cara dan aturan, yang tujuannya adalah agar Polri dapat memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman secara Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (PRESISI), namun tetap tegas dalam penegakkan hukum, sehingga tercipta kamtibmas yang kondusif.

Kriminalitas di wilayah Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya, faktor penyebab kejahatan terjadi karena kesenjangan sosial, iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya. Dalam kurun waktu 2022-2023 tindak pidana umum khususnya curat, curanmor dan curas meningkat kurang lebih 40%.



Penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung perlu mendapat dukungan dari berbagai indikator salahsatunya adalah dukungan anggaran. Kondisi saat ini anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum dirasakan masih kurang maksimal, kendala yang dihadapi yakni keterbatasan anggaran. Anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN dinilai belum tepat sasaran sehingga berdampak tidak maksimalnya penanganan tindak pidana umum. Sedangkan APBD masih banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas.



JENIS BELANJA	REN BUT	PAGU INDIKATIF	PERBANDINGAN	%	PAGU ANGGARAN	PERBANDINGAN	%	ALOKASI	PERBANDINGAN	%
PEGAWAI	Rp 861.979.144.000	Rp833.410.319.000	Rp -28.568.826.000	96,7%	Rp833.869.520.000	Rp. 459.201.000	0,1%	Rp844.040.630.000	Rp10.171.110.000	1,2%
BARANG	Rp 846.152.306.000	Rp443.329.618.000	Rp-402.822.688.000	52,4%	Rp444.394.787.000	Rp1.065.169.000	0,2%	Rp489.352.409.000	Rp44.957.621.000	0,1%
MODAL	Rp 581.990.896.000	Rp 6.013.321.000	Rp-575.977.574.000	1,0%	Rp9.648.152.000	Rp3.634.831.000	0,5%	Rp18.765.337.000	Rp 9.117.185.000	4,5%
JUMLAH	Rp2.290.122.345.000	Rp1.282.753.258.000	Rp-1.007.369.087.000	56,0%	Rp1.287.912.459.000	Rp5.159.201.000	0,4%	Rp1.352.158.376.000	Rp64.245.917.000	5,0%

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, alokasi APBN maupun APBD perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas

universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik).

Salah satu organisasi pengembangan fungsi di bidang pembinaan penyelenggaraan perencanaan program kerja dan anggaran yakni Rorena Polda Lampung. Sebagai pengembangan fungsi pembinaan penyelenggaraan perencanaan program kerja dan anggaran menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda termasuk memantau atau memonitoring, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem manajemen organisasi, membina penerapan sistem manajemen di lingkungan Polda, menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda, masih diperlukan kelanjutan pelaksanaan arah kebijakan khususnya perencanaan anggaran. Adapun anggaran pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN T.A. 2021 sampai dengan T.A. 2023 sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Anggaran APBN T.A. 2021 s.d T.A. 2023 Polda Lampung

NAMA SATKER	ANGGARAN 2021	ANGGARAN YG TEPAT SASARAN	PERSENTASE ANGGARAN YG TEPAT SASARAN	ANGGARAN 2022	ANGGARAN YG TEPAT SASARAN	PERSENTASE ANGGARAN YG TEPAT SASARAN	ANGGARAN 2023	ANGGARAN YG TEPAT SASARAN	PERSENTASE ANGGARAN YG TEPAT SASARAN
641880 - POLRESTA BANDAR LAMPUNG	1.986.700.000	847.280.000	43	2.068.200.000	739.250.000	36	2.386.400.000	1.139.280.000	48
120917 - POLRES PESAWARAN	1.057.364.127	211.472.825	20	1.105.200.000	221.040.000	20	1.155.200.000	341.312.000	30
121116 - POLRES MESUJI	1.255.702.263	439.495.792	35	1.348.800.000	404.640.000	30	1.448.800.000	589.496.000	41
352641 - POLRES PRINGSEWU	1.088.997.648	522.718.871	48	1.185.300.000	521.532.000	44	2.385.300.000	1.545.918.000	65
352642 - POLRES TULANG BAWANG BARAT	818.625.611	327.450.244	40	1.105.200.000	419.976.000	38	2.355.200.000	742.344.000	32
641897 - POLRES LAMPUNG SELATAN	1.570.512.820	785.256.410	50	1.750.000.000	875.000.000	50	1.950.000.000	285.488.000	15
641902 - POLRES METRO	1.122.000.000	168.300.000	15	1.122.000.000	123.420.000	11	1.122.000.000	60.790.000	5
641919 - POLRES LAMPUNG UTARA	1.797.888.094	413.514.262	23	2.025.200.000	405.040.000	20	2.775.200.000	345.047.000	12
641923 - POLRES LAMPUNG BARAT	1.282.757.930	320.689.483	25	1.436.600.000	359.150.000	25	2.636.600.000	642.344.000	24
641930 - POLRES TULANG BAWANG	1.199.581.844	335.882.916	28	1.292.400.000	400.644.000	31	1.392.400.000	765.820.000	55
641944 - POLRES TANGGAMUS	1.416.300.000	467.379.000	33	1.416.300.000	424.890.000	30	1.416.300.000	396.564.000	28
650918 - POLRES LAMPUNG TIMUR	4.346.768.900	1.390.966.048	32	4.884.010.000	1.758.243.600	36	2.398.800.000	1.439.280.000	60
650922 - POLRES WAY KANAN	1.402.572.583	561.029.033	40	1.692.600.000	778.596.000	46	2.042.600.000	817.040.000	40
665992 - POLRES LAMPUNG TENGAH	1.814.525.988	725.810.395	40	2.037.200.000	896.368.000	44	2.287.200.000	1.166.472.000	51
Grand Total	22.160.297.808	7.517.245.280	34	24.469.010.000	8.327.789.600	34	27.752.000.000	10.277.195.000	37

Sedangkan APBD masih banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas. Adapun rekapitulasi hibah APBD ke Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Hibah APBD ke Polda Lampung

NO	TAHUN	BELANJA BARANG	%	BELANJA MODAL	%	TOTAL
1	2021	29.939.167.000	31,8%	64.222.608.481	68,2%	94.161.775.481
2	2022	25.937.206.000	39,9%	39.077.934.090	60,1%	65.015.140.090
3	2023	15.509.954.000	31,0%	34.457.665.124	69,0%	49.967.619.124
TOTAL		71.386.327.000	34,1%	137.758.207.695	65,9%	209.144.534.695

Tabel. 1.3 Rekap Hibah APBD Tepat Sasaran

1	2021	29.939.167.000	31,8%
2	2022	25.937.206.000	39,9%
3	2023	15.509.954.000	31,0%
TOTAL		71.386.327.000	34,1%

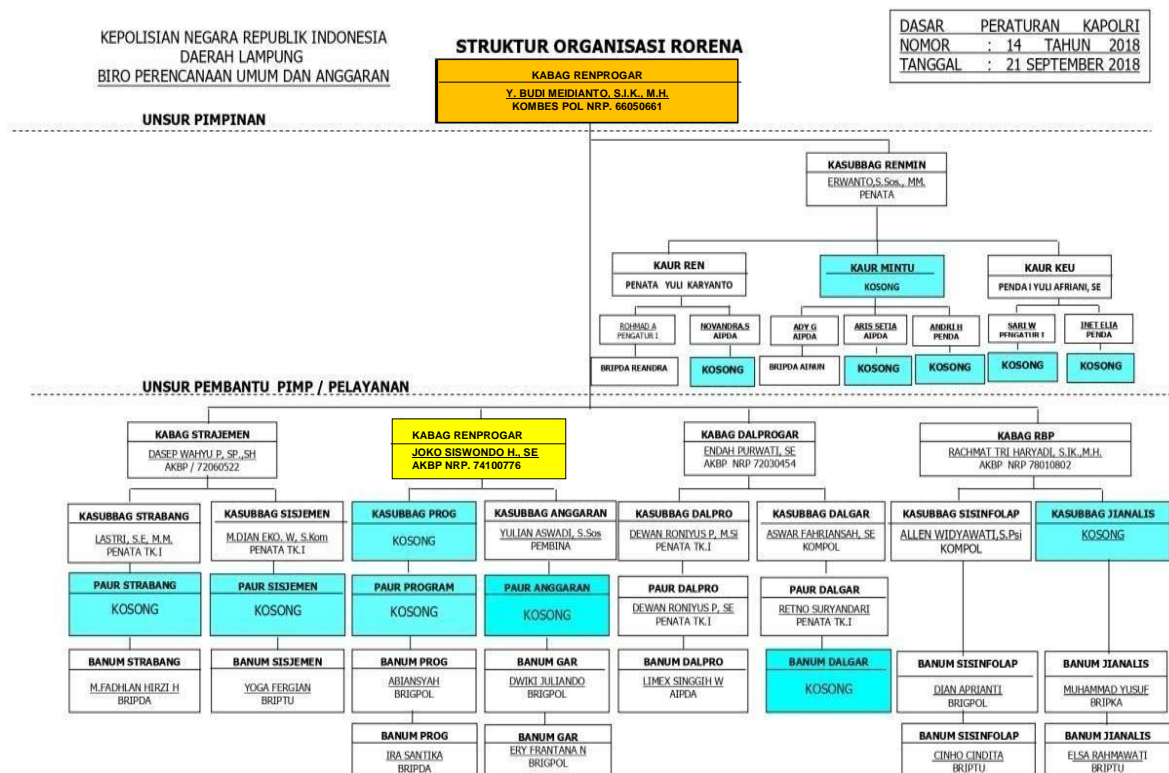
Tabel. 1.4 Rekap Hibah APBD Tidak Tepat Sasaran

1	2021	64.222.608.481	68,2%
2	2022	39.077.934.090	60,1%
3	2023	34.457.665.124	69,0%
TOTAL		137.758.207.695	65,9%

Sumber: Rorena Polda Lampung 2023

Kondisi saat ini bahwa anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN dinilai belum tepat sasaran karena banyak digunakan sebagai kegiatan pendukung, bukan untuk kegiatan utama antara lain kegiatan rapat-rapat dan perjalanan dinas, sedangkan APBD masih banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas.

Adapun Susunan Organisasi Rorena Polda Lampung berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: Rorena Polda Lampung 2023

Rorena Polda Lampung bertugas:

- a. membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
- b. menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
- d. membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana di lingkungan Polda; dan
- e. menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan asistensi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda

Dalam melaksanakan tugas, Rorena Polda Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rorena;
- b. perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- c. pemantauan dan penganalisisan terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran serta kelembagaan;
- d. penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev;
- e. penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda;

Pada saat ini jabatan *Action Leader* adalah sebagai Kabagrenprogar (eselon III) Polda Lampung. Bagrenprogar bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda Lampung.

Bagrenprogar Polda Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKAK/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;
- b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Polda;
- c. penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), non APBN, dan anggaran tertentu; dan
- d. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proyek Perubahan mengenai strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung merupakan suatu gagasan strategis untuk mengatasi permasalahan keamanan daerah khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana umum melalui kebijakan penataan anggaran yang tepat sasaran. Tujuan utama dari Proyek Perubahan ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran guna mendukung penyelesaian kasus tindak pidana umum serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam Implementasi proyek perubahan ini reformer akan melakukan beberapa tahapan dan inovasi khususnya dalam kebijakan penataan anggaran di Polda Lampung. Proyek perubahan ini sangat penting untuk di kaji karena sesuai dengan amanat dari Presiden RI bahwa penggunaan anggaran harus

tepat sasaran. Dalam hal ini organisasi Polri harus mereformasi diri beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai Langkah inovasi dalam penataan anggaran sesuai dengan harapan Polri yang presisi serta berorientasi dalam mewujudkan harkamtibmas dan kesejahteraan masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan Proyek Perubahan yang akan dicapai terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Terwujudnya koordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas.
- b. Tersusunnya perubahan strategi pada perencanaan anggaran T.A. 2024 pada bulan September s.d Oktober 2023.
- c. Terlaksananya pemutakhiran data terkait angka tindak pidana umum di Provinsi Lampung.

2. Tujuan Jangka Menengah

- a. Terbitnya NPHD yang mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk harkamtibmas.
- b. Terlaksananya kegiatan operasi pembiayaan tindak pidana umum Polda Lampung lebih maksimal.
- c. Turunnya angka kriminalitas tindak pidana umum di Provinsi Lampung.

3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Terwujudnya sinkronisasi antara Renja Polda Lampung dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Terlaksananya kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan.

- c. Terciptanya penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data statistik di Provinsi Lampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan).

C. NILAI TAMBAH INOVASI

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan adalah perencanaan anggaran untuk memaksimalkan penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung memberikan kontribusi nyata, dimana pimpinan dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran serta memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan perencanaan anggaran sehingga menghindari ketidaktepatan sasaran pada perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya Polda Lampung.

Dengan adanya perencanaan anggaran untuk penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung akan memberikan nilai tambah antara lain:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Renja Polda Lampung dan RKPD Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan.
- c. Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data statistik di Polda Lampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan).

D. MANFAAT

Tujuan Proyek Perubahan yang akan terbagi menjadi 2 (dua) sasaran, sebagai berikut:

1. Manfaat Internal

- a. Penggunaan anggaran lidik sidik pada satker jajaran Polda Lampung terukur sesuai indikator.
- b. Meningkatnya penilaian Capaian kinerja Polda Lampung tahun 2024.
- c. Terdukungnya kegiatan personil Polda Lampung pengemban fungsi reskrim dalam penuntasan masalah tindak pidana umum (curat, curanmor dan curas).

2. Manfaat Eksternal

- a. Anggaran APBD (hibah) yang di berikan Pemerintah Daerah kepada Polda Lampung tepat sasaran.
- b. Terciptanya situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif.
- c. Menurunnya angka kriminalitas dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (pengentasan kemiskinan) serta meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

E. KAITAN ANTARA PROYEK PERUBAHAN DENGAN RBT

Berdasarkan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Dalam hal ini organisasi Polri harus mereformasi diri dan beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai langkah inovasi dalam penataan anggaran secara komprehensif, penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung secara optimal sehingga dapat selaras dengan tujuan pembangunan nasional yakni **peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan dan percepatan aktual Presiden**. Reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh unit organisasi maupun masyarakat luas. Inovasi Proyek Perubahan ini relevan dengan fokus Reformasi Birokrasi tematik yaitu penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana

umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang berorientasi dalam mewujudkan peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan dan percepatan aktual Presiden.

F. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pembahasan dalam Proyek Perubahan ini dibatasi pada sinkronisasi antara Renja Polda Lampung dan RKPD Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas melalui perubahan strategi pada perencanaan anggaran T.A. 2024, kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan dan penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data statistik di Polda Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan).

BAB II. ANALISA MASALAH

A. VISI DAN MISI ORGANISASI

1. Visi dan Misi Polda Lampung

a. Visi Polda Lampung:

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib”.

Adapun penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, mengandung beberapa makna, yakni: **Daerah hukum Polda Lampung** sebagai bagian wilayah negara Indonesia yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman. **Daerah hukum Polda Lampung** sebagai wilayah negara Indonesia yang tertib.

b. Misi Polda Lampung:

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diamanatkan pada UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan penjabaran dari Misi dan tujuan dari Renstra Polri, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu:

1) **Melindungi**, yakni:

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya Provinsi Lampung yang berbasis dari gangguan kamtibmas.

2) **Mengayomi**, yakni:

Lampiran Kep Karorena Polda Lampung Nomor : KEP / 06 / VI / 2022 / Rorena Tanggal: 26 Juni 2022 memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya

dukung dan kerjasama untuk mengantisipasi segala gangguan kamtibmas.

3) **Melayani**, yakni:

Membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

2. Visi dan Misi Rorena Polda Lampung

a. Visi Rorena Polda Lampung:

“Mendukung terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib melalui optimalisasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan Anggaran”.

b. Misi Rorena Polda Lampung:

- 1) Mewujudkan personel Rorena yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang handal pada fungsi perencanaan umum dan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja;
- 2) Menjamin terwujudnya suatu perencanaan di Polda Lampung serta terdukungnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan kepolisian;
- 3) Menciptakan pola kerja yang efektif dalam menyusun perencanaan umum dan anggaran kerja tupoksi Rorena;
- 4) Menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan harmonis dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas;
- 5) Menjadi penjuru pembaharuan sistem tata laksana pelaksanaan tugas fungsi perencanaan umum dan anggaran;
- 6) Mewujudkan RBP yang mudah dipahami, dimengerti dan dilaksanakan satker di lingkungan Polda Lampung;
- 7) Terwujudnya pengendalian program dan anggaran di lingkungan Polda Lampung melalui pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian anggaran.

B. ANALISA MASALAH

1. Identifikasi masalah organisasi

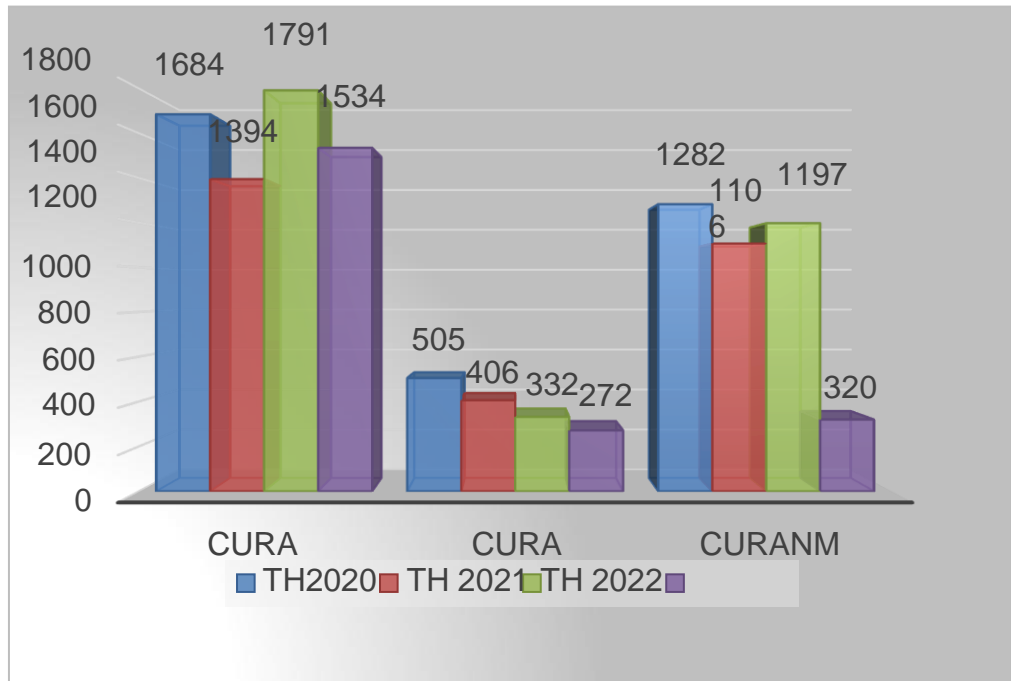
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama menjadi Kabag Renprogar Rorena Polda Lampung terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan tugas Rorena Polda Lampung yang belum optimal diantaranya sebagai berikut :

- a. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan tindak pidana umum curat, curanmor dan curas serta faktor keamanan daerah yang relatif kurang maksimal. Masih tingginya kejahatan yang di dominasi C3 pada tahun 2022-2023 di wilayah hukum PoldaLampung.

Tabel. 2.1. Data tindak pidana Umum Curat, Curanmor Dan Curas Polda Lampung T.A. 2021, 2022 dan 2023

No	Uraian	Curat, Curanmor dan Curas			Ket
		TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	
1	CURAT	1394	1791	1534	
2	CURAS	406	332	272	
3	CURANMOR	1106	1197	320	
	Jumlah	2906	3320	2126	

Sumber : Biro Ops Polda Lampung 2023



Sumber : Biro Ops Polda Lampung 2023

- b. APBN tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga. Selain itu belum terciptanya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung dalam upaya pemberantasan kasus tindak pidana umum khususnya curat curanmor dan curas di Provinsi Lampung. Alokasi anggaran lidik sidik dinilai belum memadai dalam mendukung kinerja fungsi reskrim dalam alokasi anggaran lidik sidik dinilai belum memadai dalam mendukung kinerja fungsi reskrim dalam upaya keamanan daerah.

Tabel. 2.2. Alokasi Anggaran Lidik Sidik
Polda Lampung T.A. 2021, 2022 dan 2023

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1	DITRESKRIMUM POLDALAMPUNG	3.477.662.000	4.015.438.000	4.476.232.000
2	POLRES LAMPUNG BARAT	1.300.425.000	1.246.375.000	1.656.965.000
3	POLRES LAMPUNGSELATAN	2.114.060.000	2.475.670.000	2.338.976.000
4	POLRES LAMPUNGTENGAH	2.250.175.000	3.021.100.000	3.165.959.000
5	POLRES LAMPUNG TIMUR	3.343.745.000	2.995.797.000	2.482.706.000
6	POLRES LAMPUNG UTARA	2.083.620.000	2.807.380.000	2.453.421.000
7	POLRES MESUJI	1.248.545.000	1.248.545.000	1.419.550.000
8	POLRES METRO	1.549.640.000	1.522.615.000	1.412.952.000
9	POLRES PERINGSEWU	1.067.465.000	932.340.000	1.148.365.000
10	POLRES PESAWARAN	761.335.000	896.460.000	923.562.000
11	POLRES TANGGAMUS	1.356.010.000	1.410.060.000	1.320.057.000
12	POLRES TULANG BAWANG	1.339.210.000	1.825.660.000	2.026.155.000
13	POLRES TULANGBAWANG BARAT	1.037.025.000	1.037.025.000	1.078.386.000
14	POLRES WAY KANAN	1.729.705.000	1.729.705.000	2.403.699.000
15	POLRESTA BANDARLAMPUNG	2.416.355.000	2.447.580.000	2.863.198.000
JUMLAH LIDIK SIDIK		27.074.977.000	29.611.750.000	31.170.183.000

Sumber : Rorena Polda Lampung 2023

- c. Anggaran pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran dari APBN dan APBD (hibah PEMDA) tidak tepat sasaran sehingga terjadi keterbatasan penggunaan anggaran.

Kondisi saat ini bahwa anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN dinilai belum tepat sasaran karena banyak digunakan sebagai kegiatan pendukung, bukan untuk kegiatan utama antara lain kegiatan rapat-rapat dan perjalanan dinas, sedangkan APBD masih banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang saat ini ada di Rorena Polda Lampung dalam kegiatan pelaksanaan tugas sebagai fungsi yang melatar belakangi dalam membuat Proyek

Perubahan adapun permasalahan yang ada serta kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan

No	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
1.	Belum terciptanya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung dalam upaya pembiayaan tindak pidana umum khususnya curat curanmordan curas diProvinsi Lampung.	Terciptanya hubungan kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Polda Lampung dalam Upaya peningkatan keamanan Provinsi Lampung dan anggaran pembiayaan tindak pidana umum tepat sasaran.
2.	Masih tingginya kejahatan yang di dominasi C3 pada tahun 2022-2023 di wilayah hukum Polda Lampung.	Teralokasinya anggaran lidik sidik secara proporsional dalam menunjang kinerja fungsi reskrim dalam pemberantasan kejahatan di Provinsi Lampung
3.	Alokasi anggaran lidik sidik dinilai belum memadai dalam mendukung kinerja fungsi reskrim dalam upaya keamanan daerah.	Menurunnya tingkat kejahatan di Provinsi Lampung dari tahun sebelumnya pada wilayah hukum Polda Lampung

2. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas terdapat prioritas yang diselesaikan sehingga didapat perumusan masalah (isu strategis) dengan menggunakan metode USG (*Urgensi, Seriousness, Growth*) sebagai berikut:

Tabel 2.8. Matrik Analisa USG prioritas masalah

NO	ISU STRATEGIS /MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1.	Belum terciptanya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung dalam upaya pemberantasan kasus tipidum dan perencanaan alokasi anggaran dari APBN dan APBD (hibah PEMDA) tidak tepat sasaran.	5	5	5	15	I
2.	Alokasi anggaran lidik sidik dinilai belum memadai dalam mendukung kinerja fungsi Reskrim.	4	4	3	11	III
3.	Masih tingginya kejahatan yang di dominasi C3 pada tahun 2022-2023	4	4	4	12	II

U : *Urgency*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.

S : *Seriuosness*, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak.

G : *Growth*, yaitu tingkat perkembangan masalah apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Setelah dilakukan penilaian berdasarkan hasil pembobotan terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung belum optimal menjadi isu atau permasalahan utama baik secara tingkat *urgensi*, *seriousness* dan *growth* untuk selanjutnya telah dicarikan solusi guna

penyelesaiannya, Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut menjadi salah satu indikator dalam strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung.

Oleh karena itu dalam menangani permasalahan yang ada sebagai mana disebutkan diatas, telah dilakukan perencanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisa data dari permasalahan di atas, maka penulis telah melakukan Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Penyusunan dan Pengendalian Pembiayaan Tindak Pidana Umum oleh Biro Rena Polda Lampung.”

BAB III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. TEROBOSAN INOVATIF

1. Nilai Tambah Inovasi Bagi Organisasi dan Stakeholder

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan adalah perencanaan anggaran untuk penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung memberikan kontribusi nyata, dimana pimpinan dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran serta memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan perencanaan anggaran sehingga menghindari ketidaktepatan sasaran pada perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya Polda Lampung.

Dengan adanya perencanaan anggaran untuk penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung akan memberikan nilai tambah antara lain:

- a) Sinkronisasi dan harmonisasi antara Renja Polda Lampung dan RKPD Pemerintah Provinsi Lampung.
- b) Kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan.
- c) Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data statistik di Provinsi Lampung dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (pengentasan kemiskinan).

2. Kebaharuan

Inovasi yang telah dilakukan dalam proyek perubahan ini guna perencanaan Anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD tepat sasaran.

B. OUTPUT PROYEK PERUBAHAN

Berdasarkan inovasi tersebut, output dalam proyek perubahan ini adalah:

1. Output Jangka Pendek

- 1) Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas dan kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung.
- 2) Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda Lampung tahun 2024 dengan tepat sasaran.
- 3) Terwujudnya statistik data hasil analisis dan evaluasi terkait menurunnya angka tindak pidana umum di Provinsi Lampung.

2. Output Jangka Menengah.

- 1) Persetujuan dan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan rencana strategi yang di sepakati bersama.
- 2) Terlaksananya kegiatan operasi kepolisian dalam pembiayaan tindak pidana umum sesuai dengan rencana strategi secara maksimal.
- 3) Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum di Provinsi Lampung.

3. Output Jangka Panjang

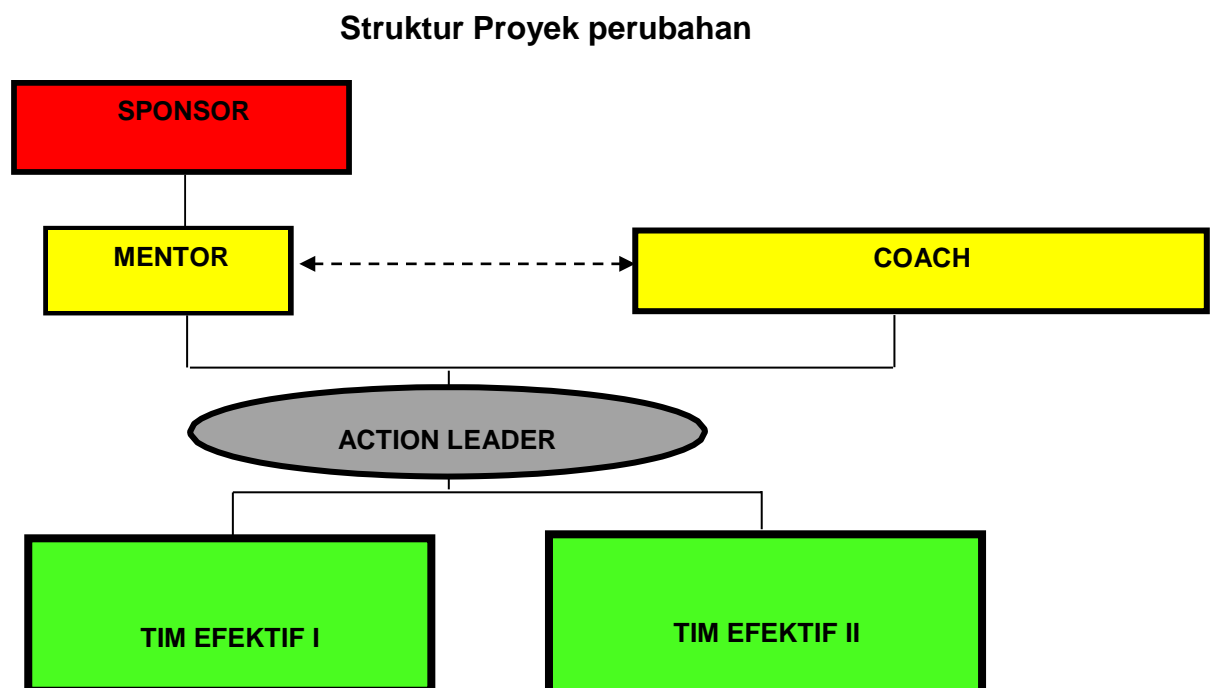
- 1) Impelementasi Nota Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Polda Lampung secara berkelanjutan.

- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 terkait penanganan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung.
- 3) Terwujudnya harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

C. TATA KELOLA SUMDERDAYA

1) Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini perlu dijelaskan mengenai pengorganisasian SDM, saran prasarana dan metode yang digunakan dalam proyek perubahan yang telah dilakukan sehingga berjalan baik, adapun struktur organisasi tata kelola sumber daya adalah sebagai berikut:



Tugas / peran dari setiap unit dalam tata kelola proyek perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sponsor**, memiliki tugas:
 - a. Memberikan legitimasi dan dukungan proyek perubahan.
 - b. Memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pelaksanaan Proyek perubahan.
2. **Mentor**, memiliki tugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam mengidentifikasi permasalahan terkait proyek perubahan.
 - b. Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap profesionalisme;
 - c. Memberikan dukungan penuh kepada *action leader* atas seluruh kegiatan;
 - d. Memberikan otoritas kepada *action leader* untuk menyusun proyek perubahan;
 - e. Berperan sebagai inspirasi proyek perubahan;
 - f. Memberi masukan penyempurnaan terhadap proyek perubahan;
 - g. Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
 - h. Memonitor progress pelaksanaan proyek perubahan;
 - i. Menyetujui proyek perubahan.
3. **Coach**, memiliki tugas:
 - a. Melakukan diskusi dan memberikan bimbingan dalam menyusun dan melaksanakan Proyek perubahan;
 - b. Memberikan bimbingan baik tatap muka maupun jarak jauh melalui WA, Zoom Meeting, kepada peserta Diklat PKA;
 - c. Membuka komunikasi dengan Mentor terkait kegiatan peserta selama pelaksanaan Proyek perubahan;
 - d. Melakukan intervensi bila Pemimpin Perubahan mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach.

4. **Action Leader**, memiliki tugas:
 - a. Mempersiapkan (dokumen, instrumen, waktu) yang diperlukan dengan baik terkait Proyek perubahan sebelum bertemu mentor dan coach;
 - b. Berprakarsa melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan masukan;
 - c. Menggalang kerja sama dan kesepakatan dengan stakeholders baik eksternal maupun internal;
 - d. Memimpin, mendelegasi, mengarahkan penyelenggaraan proyek perubahan sesuai kapasitas *stakeholder*;
 - e. Mengelola *stakeholder* Internal agar perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;
 - f. Mengkoordinir agar seluruh *stakeholder* dapat bekerjasama dan memberikan hasil terhadap proyek perubahan;
 - g. Mensosialisasikan perencanaan Anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang agar tepat sasaran.
 - h. Melaksanakan tahapan proyek perubahan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan proyek perubahan kepada penyelenggara.

5. **Tim Efektif** terbagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu:
 - a) Tim Pokja I
 - (1) KABAGSTRAJEMEN ROENA POLDA LAMPUNG
 - (2) KASUBBAGRENMIN ROENA POLDA LAMPUNG
 - (3) PS. KASUBBAGDALPRO ROENA POLDA LAMPUNG
 - (4) BAMIN 2 SUBBAGGAR ROENA POLDA LAMPUNG
 - (5) BAMIN 1 SUBBAGGAR ROENA POLDA LAMPUNG
 - (6) BANUM BAGRENPROGAR ROENA POLDA LAMPUNG

- b) Tim Pokja II
 - (1) KABAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG KASUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG
 - (2) PS. PAMIN 2 RENMIN RORENA POLDA LAMPUNG
 - (3) BAMIN 1 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG
 - (4) BAMIN 2 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG.

Adapun tugas tim efektif adalah:

- a) Merupakan Tim Efektif yang bertugas membantu *Action Leader* dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan Proyek perubahan.
- b) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyukseskan proyek perubahan;
- c) Komitmen yang kuat untuk mewujudkan proyek perubahan sesuai dengan diharapkan;
- d) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, tahap monitoring dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi.

D. PENGELOLAAN ANGGARAN

Anggaran yang digunakan untuk mendukung proyek perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk kegiatan proyek perubahan ini dalam Dipa Rorena Polda Lampung T.A. 2023 sehingga memerlukan koordinasi yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan proyek perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk rencana perubahan ini adalah sebesar Rp. 15.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel Rencana Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Rapat Koordinasi	5.600.000,-
2.	Rapat Kerja	5.000.000,-
3.	Sosialisai	4.000.000,-
4.	ATK	500,000,-
JUMLAH		15.100.000,-

E. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini antara lain yaitu jaringan internet/ wifi, laptop/komputer, printer, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja Rorena Polda Lampung.

F. METODE

Metode yang digunakan dalam memperlancar pelaksanaan proyek perubahan ini adalah metode komunikasi. Komunikasi pada proyek perubahan diaplikasikan baik secara *canalizing*, *informatif*, maupun *persuasif*. Berikut definisi singkat:

1. Komunikasi secara *canalizing* adalah suatu bentuk metode komunikasi mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan mengubah sikap dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki;
2. Komunikasi secara *informatif* adalah suatu bentuk metode komunikasi yang lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita dan sebagainya;
3. Komunikasi secara *persuasif* adalah suatu bentuk metode komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk.

G. IDENTIFIKASI STAKE HOLDER

Keberadaan dan kontribusi *stakeholders* terhadap proyek perubahan menjadi salah satu elemen penting. *Stakeholders* yang dimaksud adalah orang-orang atau kelompok atau lembaga yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan output proyek perubahan baik secara positif maupun negatif. Dalam suatu proyek perubahan terdapat 2 (dua) kelompok *stakeholders* yaitu *stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*.

1. Internal

- 1) KAPOLDA LAMPUNG
- 2) KARORENA POLDA LAMPUNG
- 3) DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG
- 4) KAPOLRES/TA
- 5) PARA KABAG BIRORENA DAN TIM EFEKTIF
- 6) PARA KASUBDIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG
- 7) PERSONIL BIRORENA POLDA LAMPUNG
- 8) PARA KABAGREN POLRES/TA
- 9) PARA KASAT RESKRIM
- 10) KAPOLSEK

2. Eksternal

- 1) KEPALA BAPEDA PROVINSI dan KAB/KOTA
- 2) KEPALA KESBANGPOL dan KAB/KOTA
- 3) KEPALA BPKAD dan KAB/KOTA
- 4) MASYARAKAT

Tabel 3.2. Identifikasi Stakeholder

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER										
No	Stakeholder	Tim Efektif	Jenis Stakeholder			Kelompok Stakeholder				Strategi Komunikasi
			Primer	Sekunder	Utama	Promoters	Latents	Defenders	Apathetics	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Internal										
1	Kapolda Lampung				√	+++ (10)				Persuasif
2	Karorena Polda Lampung				√	+++ (10)				Persuasif Informatif
3	Dir Reskrim Polda Lampung				√		++ (6)			Persuasif
4	Kapolres/ta			√				++ (5)		Canalizing
5	Para Kabag Rorena dan Tim Efektif	√			√			++ (7)		Persuasif
6	Para Kasubdit Polda Lampung	√			√			++ (5)		Persuasif
7	Personil Birorena Polda Lampung	√			√				+/- (2)	Persuasif
8	Para Kabagren Polres/ta	√			√			++ (7)		Persuasif
9	Para Kasat Reskrim	√			√			++ (4)		Canalizing
10	Kapolsek	√			√			++ (4)		Canalizing
Eksternal										
1	Kepala Bapeda Provinsi dan Kab/Kota			√			++ (6)			Persuasif

2	Kepala Kesbangpol Kab/Kota			√			++(6)			Persuasif
3	Kepala BPKAD dan Kab/Kota			√			++(6)			Persuasif
4	Masyarakat		√						+/-(-2)	Persuasif

Keterangan :

Jenis Stakeholders

- Primer : *stakeholders* yang menerima dampak secara langsung;
- Sekunder : *stakeholders* yang tidak menerima dampak langsung;
- Utama : *stakeholders* yang bisa mempengaruhi pihak lain dan mereka yang punya kepentingan dengan hasil upaya.

Kelompok Stakeholders

- *Promoter* : Pengaruh Tinggi dan Peranan Tinggi;
- *Defender* : Pengaruh Rendah, Peran Tinggi;
- *Latent* : Pengaruh Tinggi, Peran Rendah;
- *Apathetic* : Pengaruh Rendah, Peran Rendah.

Pemetaan posisi dari setiap *stakeholder*:

- Positif (+) : Cuku Mendukung/Mendukung/Sangat mendukung;
- Negatif(-) : Menentang;
- Positif / Negatif (+/-):Netral.

Penetapan pengaruh *stakeholder*, maka besar pengaruh, maka makin tinggi towernya:

- Rendah : 1 – 2 Tinggi : 6-8
- Sedang : 3 – 5 sangat tinggi : 9>

Strategi komunikasi:

- *Canalizing* : berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap dan motif khalayak
- Persuasif : mempengaruhi dengan tidak banyak berpikir kritis
- Informatif : bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan denga apa adanya.

H. PERAN, PENGARUH, DAN INTENSITAS

Stakeholders dalam proyek perubahan merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki fungsi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun langsung pada proyek perubahan. Pada pemetaan *stakeholders*, pembagian kontribusi *stakeholders* dibagi berdasarkan pengaruh (*influence*) dan memiliki kepentingan (*interest*).

Influence didefinisikan menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki *stakeholders* tersebut terhadap jalannya proyek perubahan. Sedangkan kepentingan (*interest*) berkaitan dengan pengaruh *stakeholders* tersebut terhadap keberhasilan proyek perubahan. Berdasarkan *interest* dan *influence* dalam mencapai tujuan proyek perubahan maka *stakeholders* menjadi 4 (empat) kelompok:

1) *Promoters (high influence and high interest)*

Kelompok *stakeholder* ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar terhadap terlaksananya proyek perubahan.

2) *Defenders (low influence and high interest)*

Kelompok *stakeholder* ini memiliki pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang besar terhadap jalannya proyek perubahan.

3) *Laten (high influence and low interest)*

Kelompok *stakeholders* ini memiliki pengaruh yang besar tetapi tidak memiliki kepentingan terhadap jalannya proyek perubahan.

4) *Apathetic (low influence and low interest)*

Pada kelompok ini, *stakeholders* hanya memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat rendah terhadap jalannya proyek perubahan.

Pengklasifikasian *stakeholder* internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.3. Nilai dan Pengaruh Stakeholder

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
A. STAKEHOLDER INTERNAL					
1	Kapolda Lampung (Sponsor)	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	10 Sangat Tinggi (+++)
2	Karorena Polda Lampung	berperan dalam dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung kepada Action Leader atas setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan.	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan	10 Sangat Tinggi (+++)
3	Dir Reskrimum Polda Lampung	Berperan memberikan saran dan masukan kepada <i>Action Leader</i>	Latens	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	6 Tinggi (++)

4	Kapolres/Ta	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)
5	Para Kabag Rorena dan Tim Efektif	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan	Defenders	Pengaruh Tinggi dan peran rendah	7 Tinggi (++)
6	Para Kasubdit Reskrim Polda Lampung	Berperan memberikan saran dan masukkan kepada <i>Action Leader</i>	Defenders	pengaruh tinggi dan peranan rendah	7 Tinggi (++)
7	Personil Birorena Polda Lampung	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Aphatetic	Pengaruh Rendah, Peran Rendah	2 Netral (+/-)
8	Para KabagrenPolres/ta	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Tinggi Peran Rendah	7 Tinggi (++)
9	Para Kasatreskrim	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	4 Sedang (++)
10	Kapolsek	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defender	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	4 Sedang (++)

B. STAKEHOLDER EKSTERNAL

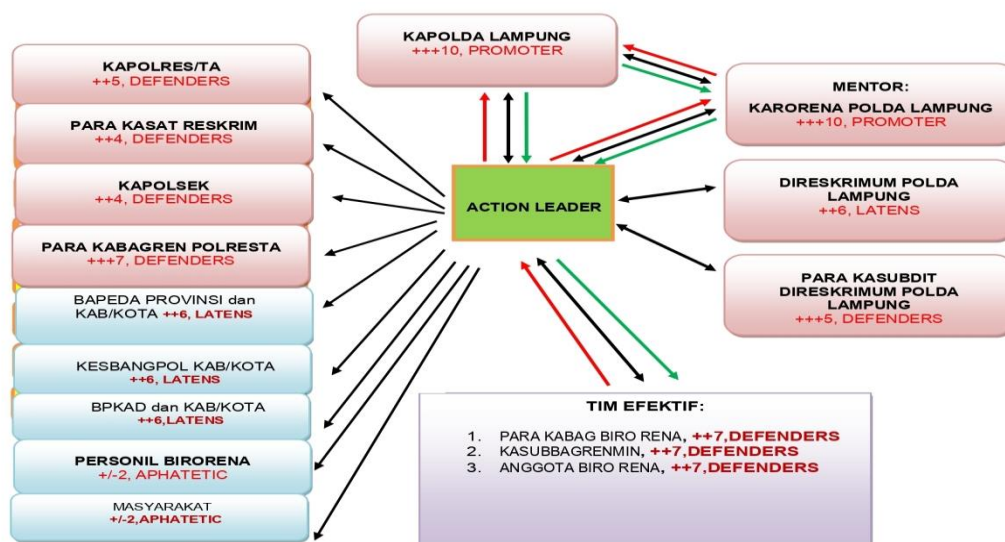
1	Kepala Bapeda Provinsi dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	6 Tinggi (++)
2	Kepala Kesbangpol dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	6 Tinggi (++)

3	Kepala BPKAD dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Aphatetic	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	6 Tinggi (++)
4	Masyarakat	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	2 Netral(+/-)

I. PETA JEJARING

Dalam proyek perubahan, perlu mengenalterlebih dahulu siapa saja *stakeholder* yang berkepentingan terhadap perubahan itu. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peta jaringan atau *net map* yang bertujuan memetakan *stakeholder* yang terkait dengan perubahan tersebut. Menjelaskan secara rinci hubungan koordinasi dan komunikasi *stakeholder* internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proyek perubahan berbentuk *net map*. Apabila dipetakan dalam *net map*, maka *Stakeholder* yang terlibat dalam proyek perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Pemetaan Stakeholders



Keterangan Panah :

- ↔ : Kordinasi
- : Pengawasan
- : Pelaporan

Pengaruh Stakeholder:

- +++ : Sangat mendukung
- ++ : Mendukung
- +/- : Netral
- : Menolak
- 1-2 : Rendah
- 3-5 : Sedang
- 6-8 : Tinggi
- 9-10: Tinggi sekali



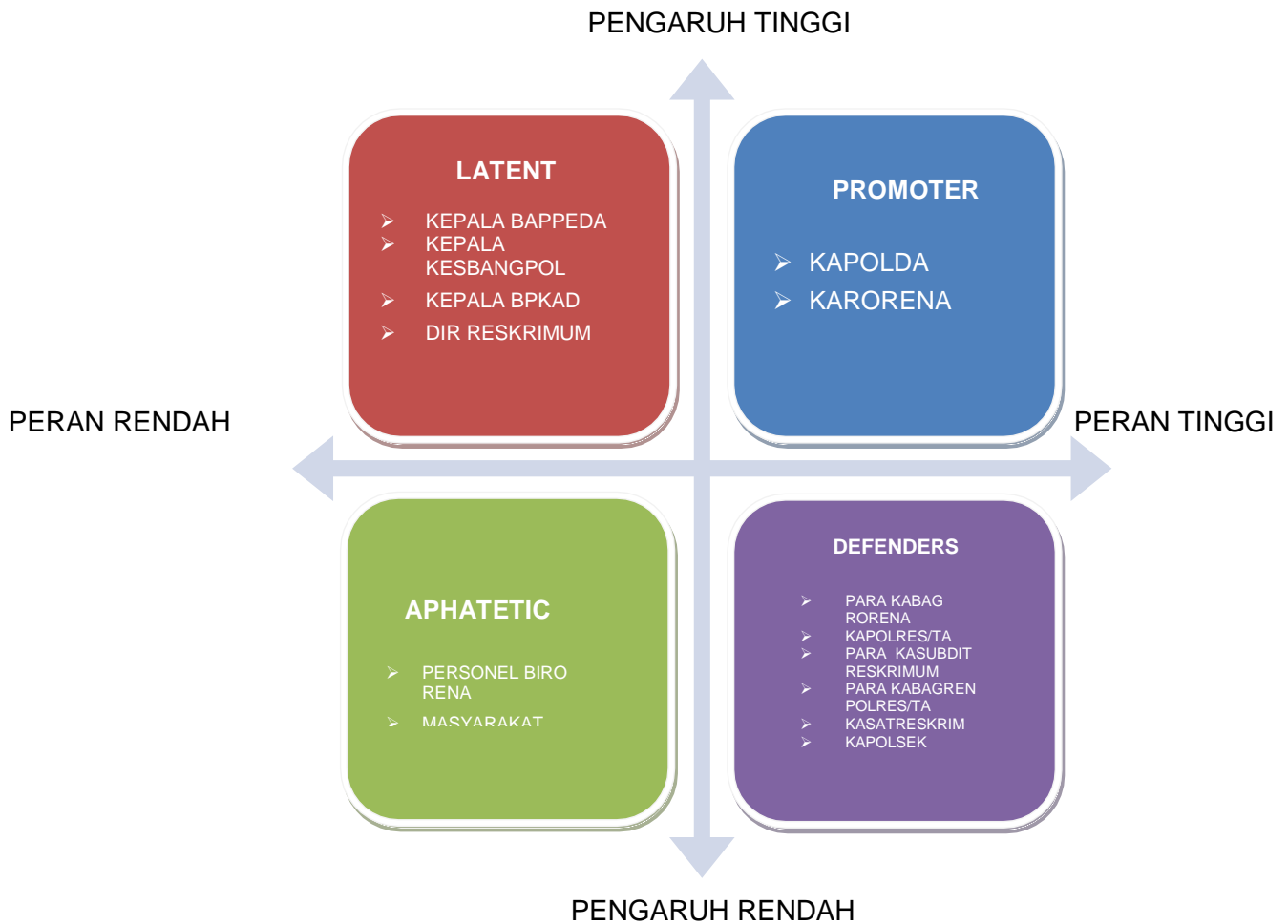
Penjelasan:

- 1) *Action leader* melakukan laporan dan konsultasi terhadap Sponsor dan mentor tentang kegiatan Proyek perubahan yang akan dilaksanakan meliputi Proyek perubahan, pembentukan tim efektif, keterlibatan *stakeholder* internal dan eksternal, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan Proyek perubahan tersebut;
- 2) Sponsor mengeluarkan surat perintah tentang pembentukan tim efektif (*teamwork*) untuk bersama – sama dengan *Action leader* melaksanakan kegiatan proyek perubahan yang akan dilaksanakan;
- 3) Mentor dan *Action leader* melakukan perencanaan proyek perubahan, identifikasi keterlibatan *stakeholder internal* dan *eksternal*, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh rencana aksi leader;
- 4) *Action leader* berkoordinasi dengan Stakeholder Internal tentang pelaksanaan Proyek perubahan;
- 5) *Action leader* berkoordinasi dengan tim efektif terkait pembuatan sistem informasi dan penyusunan buku panduanpenggunaan;
- 6) *Action leader* mensosialisasikan hasil Proyek perubahan kepada *stakeholder* internal dan eksternal;
- 7) *Action leader* melakukan laporan kepada mentor mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan.

J. KUADRAN STAKE HOLDER

Seluruh *stakeholder* tersebut apabila dipetakan dalam Kuadran Stakeholder, maka akan tampak seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.2. Kuadran *Stakeholders*



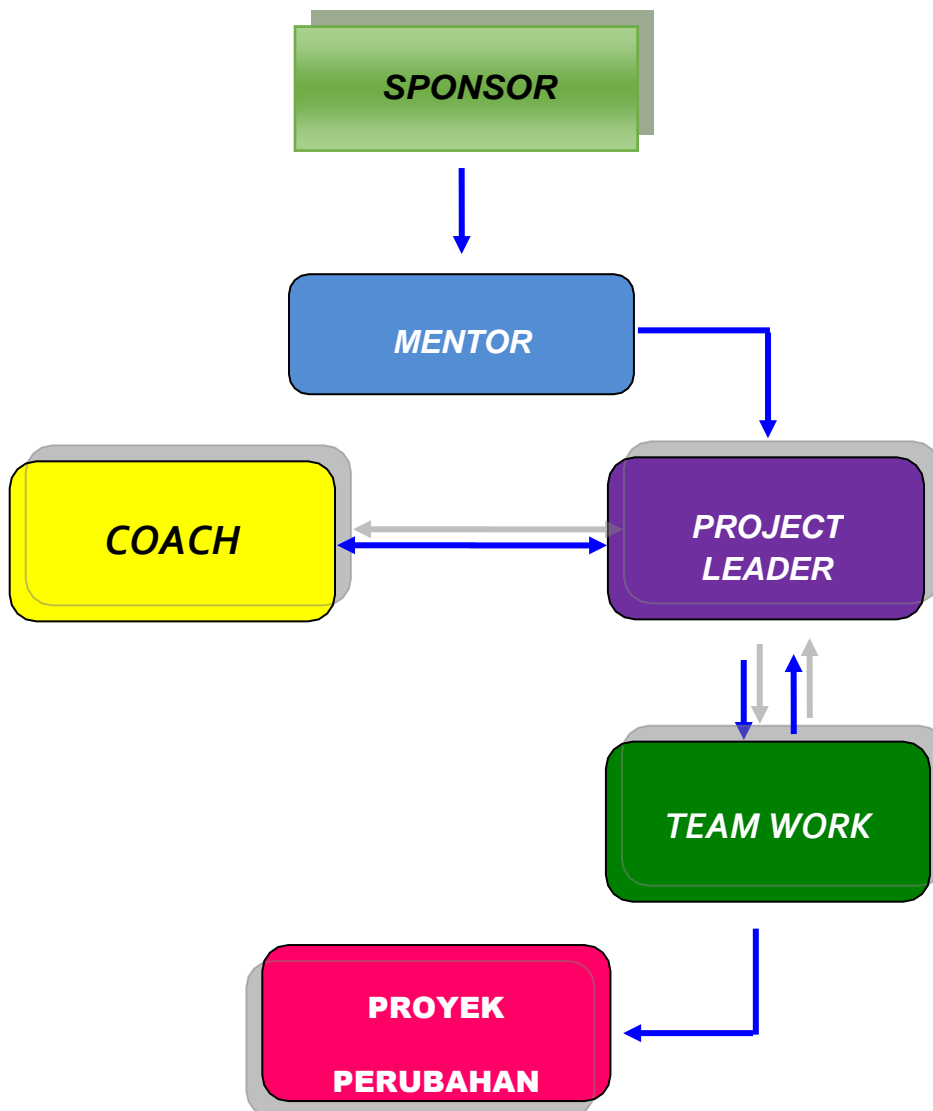
BAB IV. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. PEMANFAATAN SUMBERDAYA MANUSIA

1. Mobilisasi SDM

Struktur tim kerja project perubahan ini dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Aksi Perubahan



Deskripsi Tata kelola aksi perubahan adalah sebagai berikut:

a. Sponsor

Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si
(Kapolda Lampung)

Berperan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan proyek perubahan.

b. Mentor

Kombes Pol Y. Budi Meidianto, S.I.K., M.H
(Karorena Polda Lampung)

Berperan sebagai penasehat, memberikan dukungan, persetujuan, arahan, strategi dan teknis pelaksanaan aksi perubahan, serta terus memantau perkembangan aksi perubahan.

c. Project Leader

AKBP Joko Siswondo H., S.E.
(Kabagrenprogar Polda Lampung)

berperan memimpin pelaksanaan project, menyusun rencana langkah-langkah operasional, teknis, merancang sistem informasi dan buku panduan pengoperasiannya, memimpin diskusi untuk mencari solusi masalah - masalah yang mungkin akan dihadapi dan menyiapkan laporan progres pelaksanaan aksi perubahan.

d. Coach

AKBP Grace KD Rahakbau SIK MSi
(Wakapusdikmin)

Berperan memberikan arahan secara teoritis, membantu membuat perencanaan serta pelaporan, mengarahkan pimpinan project untuk lebih bersinergi dengan mentor dan tim efektif dalam pelaksanaan aksi.

e. Tim *Efektif*/Tim Kerja (*Team Work*)

Tim Efektif terbagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu:

a) Tim Pokja I

- a. Kabagstrajemen Rorena Polda Lampung
- b. Kasubbagrenmin Rorena Polda Lampung
- c. Ps. Kasubbagdalpro Rorena Polda Lampung
- d. Bamin 2 Subbaggar Rorena Polda Lampung
- e. Bamin 1 Subbaggar Rorena Polda Lampung
- f. Banum Bagrenprogar Rorena Polda Lampung

b) Tim Pokja II

- a. Kabagdalpro Rorena Polda Lampung Kasubbaggar Rorena Polda Lampung
- b. Ps. Pamin 2 Renmin Rorena Polda Lampung
- c. Bamin 1 Subbagprog Rorena Polda Lampung
- d. Bamin 2 Subbagprog Rorena Polda Lampung.

B. PENTAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA PROYEKPERUBAHAN

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai didalam pelaksanaan proyek perubahan, maka *milestone* atau pentahapan yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasi (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)

- d. Monitoring dan Evaluasi (*Controlling*)
- e. Pasca Diklat

Milestone atau pentahapan proyek perubahan merupakan tahap inti, dimana pada tahap ini inovasi dari project perubahan yang akan dilakukan oleh *project leader*, dibuat menjadi beberapa tahapan kegiatan.

Tabel 3.4. Pentahapan Proyek perubahan

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	WAKTU OFF CAMPUS 60 HARI		
A.	Perencanaan / <i>Planning</i>	Minggu Ke-1	
1.	Melaporkan kepada atasan selaku Mentor proyek perubahan.	(Minggu III, September 2023)	Dokumentasi
2.	Membuat surat perintah Tim efektif dan undangan rapat sertasosialisasi.		Surat Perintah dan undangan rapat sertaDokumentasi
3.	Pembentukan Tim Efektif.		Surat Perintah
4.	Mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan proyek perubahan		Dokumentasi
B.	Pengorganisasian / <i>Organizing</i>	Minggu Ke-2	
1.	Koordinasidengan rekan kerja serta <i>stakeholder Internal dan Eksternal</i> tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan.	(Minggu IV, September 2023)	Dokumentasi
2.	Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan Proyek perubahan		Undangan, Daftar Hadir, NotulenRapat dan Dokumentasi
3.	Diskusi strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBNmaupun APBD		Dokumentasi

4.	Membuat strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Jukrah APBN - Surat Jukrah APBD
C	Pelaksanaan/Actuating	Minggu Ke-3	
1.	Pelaksanaan rapat ke-2 antara <i>actionleader</i> , tim Efektif dan persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024	(Minggu I Oktober 2023)	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
2.	Sosialisasi tentang jukrah strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD.		Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
		Minggu Ke-4	
1.	Penyusunan anggaran untuk penanganan tindak pidana umum sesuai Jukrah.	(Minggu II Oktober 2023)	Dokumentasi Kertas Kerja
2.	Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum.		Dokumentasi Kertas Kerja
3.	Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum		Dokumentasi Kertas Kerja DIPA T.A. 2024
		Minggu Ke-5	
1.	Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.	(Minggu III Oktober 2023)	Dokumentasi
2.	Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung		Dokumentasi
		Minggu Ke-6	
1.	Koordinasi ke Pemkab / Kota Jajaran Provinsi Lampung	(Minggu IV Oktober 2023)	Dokumentasi
		Minggu Ke-7	

2.	Rapat koordinasi Pembuatan NHPD	(Minggu I November 2023)	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi
3.	Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023		NHPD antara Pemprov Lampung dengan Polda Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023
		Minggu Ke-8	
4.	Rapat dan Pembuatan Pakta-Integritas antara Polda dan Polres Jajaran	(Minggu II November 2023)	Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi, Pakta-Integritas
D.	Monitoring dan Evaluasi	Minggu Ke-9	
1.	Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan.	(Minggu III, November 2023)	Dokumentasi
2.	Monitoring dan evaluasi (metode).		Dokumentasi kuesioner
3.	Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan.		Laporan Proyek Perubahan
E	Pasca pelatihan		
1.	Terwujudnya kolaborasi renja tematik Polda Lampung dengan Pemprov Lampung	Tahun 2024	Dokumentasi
2.	Terwujudnya perencanaan anggaran untuk strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD		
3.	Tersedianya media <i>controlling</i> bagi pimpinan terhadap pelaksanaan Anggaran untuk strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang agar tepat sasaran.		Dokumentasi

a. Perencanaan (*Planning*)/ Milestone-1

1. Melaporkan kepada atasan selaku Mentor proyek perubahan

Pentingnya melaporkan kepada atasan selaku mentor proyek perubahan dalam berbagai aspek untuk mendukung terlaksananya Proyek Perubahan. Mentor berperan sebagai penasehat, memberikan dukungan, persetujuan, arahan, strategidan teknis pelaksanaan aksi perubahan, serta terus memantau perkembangan aksi perubahan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/1790/IX/DIK.2.5./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

Dasar : 1. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/I/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang penanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/583/IX/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T. A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari, ditunjuk untuk menjadi Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA

Dr. UMAR EFFENDI, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. AS SDM Kapolri
2. Kapolda Lampung
3. Irwasda Polda Lampung
4. Kabidpropam Polda Lampung

DAERAH LAMPUNG

NUMER : SPRIN/1790/IX/DIK.2.5./2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PERSONEL POLDA LAMPUNG YANG DITUNJUK MENJADI MENTOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGGKATAN XVIII T.A. 2023

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KET
1	YOSEF BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL / 66050661	KARORENA POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
2	ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.	KOMBES POL / 78061264	DIRRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP RIZA PAHLEVI, S.A.G., S.H. DAN AKBP SASTRA BUDY, S.E., S.H.
3	SIS MULYONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 65110552	DIRPOLAIRUD POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP ZULMAN TOPANI, A.MD., S.PD.I.
4	dr. MARDI SUDARMAN, M.M.	KOMBES POL / 75070971	KABIDDOKKES POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP dr. HIDAYATULLAH, SP, THT-KL.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA

Dr. UMAR EFFENDI, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

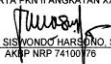
2. Membuat Surat perintah Tim efektif dan undangan rapat serta sosialisasi

Maksud dan tujuan dari pembentukan tim efektif adalah untuk mengintegrasikan berbagai kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Hal ini dilakukan melalui pemilihan individu yang memiliki beragam kemampuan, termasuk dalam bidang administrasi, teknologi, hukum, dan lainnya.

NOTA – DINAS
Nomor : BND-24/IX/DIK/2.5/2023/Rorens

Kepada : Yth. Tim Efektif Proyek Perubahan
Dari : Peserta PKN II Angkatan XXVIII
Hal : Undangan Rapat Awal

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP/07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapotri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.8/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di mohon kepada tersebut alamat berkenan untuk menghadiri rapat penyampaian proyek perubahan yang di gagas oleh peserta PKN II angkatan XXVIII tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari / tanggal : Rabu / 20 September 2023;
 - b. Pukul : 09.00 Wb s/d selesai;
 - c. Tempat : Ruang rapat Gedung A lantai 3 Polda Lampung;
 - d. Pakaian : Yang berlaku hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Selatan, 18 September 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 7410076

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Dasar
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP/07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapotri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.8/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
- II. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan rapat dengan tim efektif proyek perubahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wb s/d selesai;
 - b. Rapat berjalan dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa tim efektif proyek perubahan menyetujui dan siap mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.
- III. Peserta
 - a. Karorena Polda Lampung selaku Mentor;
 - b. Ketua pelaksana proyek perubahan (peserta PKN II Angkatan XXVIII);
 - c. Ketua tim efektif / ketua tim pokja I dan II proyek perubahan;
 - d. Anggota tim efektif / pokja I dan II proyek perubahan.
- IV. Penutup

Lampung Selatan, 20 September 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 7410076



3. Pembentukan Tim Efektif

Tujuan dari pembentukan tim yang efektif adalah menciptakan sinergi antara anggota tim sehingga mereka dapat bekerja bersama secara efisien, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain. Ini bertujuan untuk mencapai hasil proyek yang lebih baik, mengurangi potensi hambatan, dan memaksimalkan produktivitas. Tim yang efektif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko, memecahkan masalah, dan mencari peluang dalam proyek.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/165-IX/DIK.2.5/2023

- Pertimbangan** : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar** : 1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
3. Surat Kapolri Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanggilan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : PERSONEL YANG NAMA-NAMA PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI
- Untuk** : 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari di tunjuk sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan dengan judul Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum di Polda Lampung;
2. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
3. melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 08 September 2023
KEPALA KARORENA POLDA LAMPUNG
Y. BUDI MUDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMANDAN BESAR POLISI NRP 66050661

- Tembusan :**
1. Kapolda Lampung
2. Irwasda Polda Lampung
3. Kabidpropam Polda Lampung

2
LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/165-IX/DIK.2.5/2023
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2023

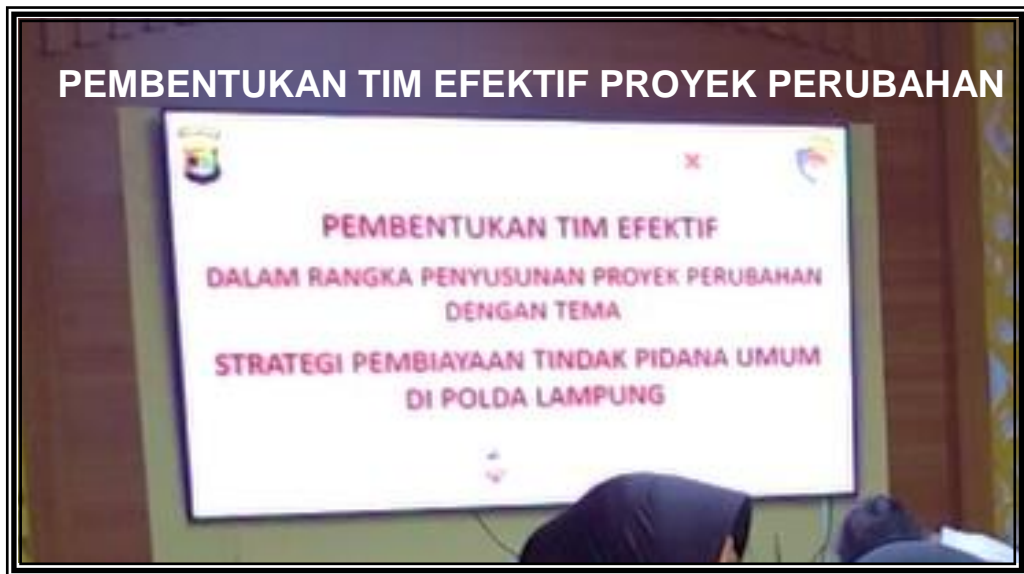
NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	PENUGASAN	
8	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA TIM POKJA II	
9	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
10	NOVANDRA SUPANDI, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
11	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
12	IRA SANTIKA	BRIPDA	BAMIN 2 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 08 September 2023
KEPALA KARORENA POLDA LAMPUNG
Y. BUDI MUDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMANDAN BESAR POLISI NRP 66050661

DAFTAR NAMA PERSONEL YANG DITUNJUK SEBAGAI TIM EFEKTIF
PADA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKN TK. II ANGKATAN XXVIII T.A. 2023 POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	PENUGASAN	
1	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA PELAKSANA	
2	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAGSTRAJEMEN RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA TIM POKJA I	
3	DEWAN RONIYUS PUTRA, S.E., M.Si.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
4	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA	PS. KASUBBAGRENMIN RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
5	ERI FRANTANA NURANSYAR, S. Psi.	BRIGPOL	BAMIN 2 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
6	DWIKI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
7	TITANIA FAUDI AFIFAH, A. Md., Kom.	PENGATUR	BANUM BAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	

8. ENDAH.....



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

4. Mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan proyek perubahan

Bahan informasi memegang peranan krusial dalam pelaksanaan Proyek Perubahan. Bahan informasi yang dikumpulkan dapat membawa sinergi dari berbagai keahlian seperti Administrasi, Teknologi, dan Hukum untuk menghadapi tantangan proyek dengan profesionalisme dan efisiensi. Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah untuk memastikan setiap aspek proyek didekati dengan perspektif yang beragam dan komprehensif.



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

b. Pengorganisasi (*Organizing*)/Milestone -2

1. Koordinasi dengan rekan kerja serta *stakeholder Internal dan Eksternal* tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan

Manfaat dari koordinasi dengan rekan kerja serta *stakeholder Internal dan Eksternal* tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan terlihat jelas dalam peningkatan produktivitas: tugas diselesaikan dengan lebih cepat, solusi yang dihasilkan lebih inovatif, risiko kesalahan berkurang, dan semangat kerja antar anggota tim meningkat. Dengan demikian, pemilihan anggota tim oleh Proyek Leader dengan pertimbangan keahlian spesifik menunjukkan visi strategis untuk mencapai keberhasilan proyek.



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

2. Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan Proyek perubahan

Tim yang efektif yang mencakup beragam kemampuan dan pengetahuan adalah strategi yang cerdas dalam penyusunan proyek perubahan. Hal ini akan mendukung terlaksananya proyek dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas secara signifikan, dan membantu mencapai tujuan proyek dengan sukses.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
Jl. Terusan Ryacudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan

Lampung Selatan, 15 November

Nomor : B/ 95 /XI/DIK.2.5./2021/Rorena
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan rapat

Kepada

Yth. 1. KABAGREN POLRES
JAJARAN;
2. TIM EFEKTIF.

di

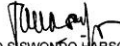
Tempat

1. Rujukan:

- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Peng/4/I/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
 - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Non B/5733/VIII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada para Kabagren Pajaran Polda Lampung dan Tim Efektif untuk dapat hadir dalam rangka rapat pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. yang akan diselenggarakan pada:
- Hari / tanggal : Selasa / 15 November 2023;
 - Pukul : 09.00 Wlb
 - Tempat : Aula GWS Presisi Polda Lampung
 - Pakaian : Yang berlaku hari itu

3. Demikian untuk menjadi maklum.

PESERTA PKN II ANGKATAN


JOKO SISWONDO HARSONO
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTULEN RAPAT DAN PEMBUATAN
FAKTA INTEGRITAS DAN NPHD HIBAH APBDP DARI PROVINSI LAMPUNG T.A. 2023
DENGAN STEAK HOLDER INTERN DAN TIM EFEKTIF
HARI / TANGGAL : SELASA / 15 NOVEMBER 2023

I. Dasar

- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/I/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VIII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;

II. Pelaksanaan

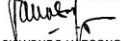
- Pelaksanaan rapat dan pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. 2023 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 tempat Aula GWS Presisi Polda Lampung, pukul 09.00 Wlb s.d selesai;
- Rapat dan pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. 2023 berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa peserta rapat (para Kabagren Polres/Ta jajaran Polda Lampung) melaksanakan penandatanganan fakta integritas serta memahami tentang NPHD Hibah APBDP Provinsi Lampung yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kedepannya.

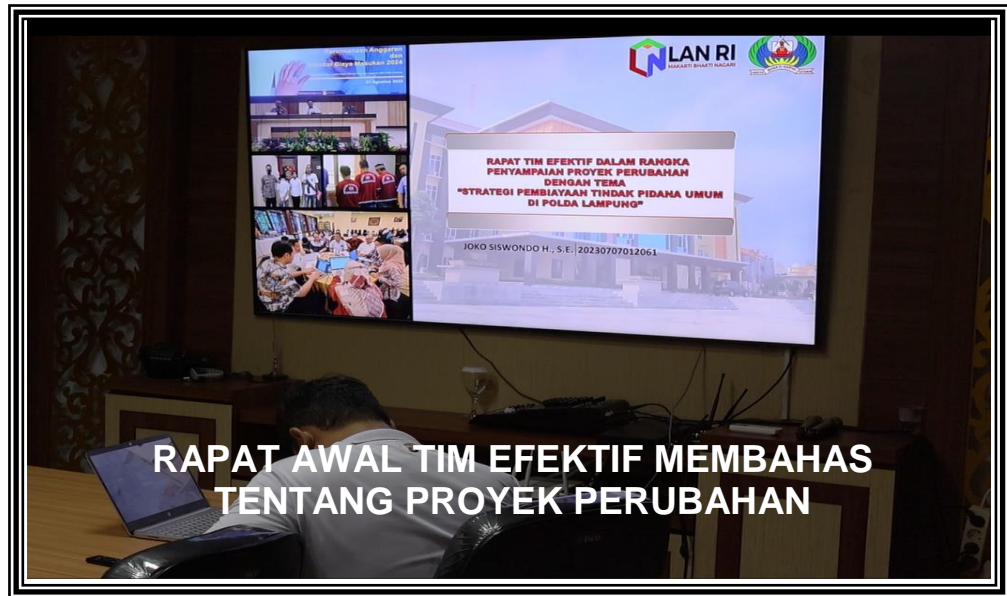
III. Peserta

- Kabagren Polres Jajaran 15 Orang;
- Tim Efektif 11 Orang;

IV. Penutup.

Lampung Selatan, 15 November 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
ANBP NRP 74100776



**RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS
TENTANG PROYEK PERUBAHAN**



**RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS
TENTANG PROYEK PERUBAHAN**

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

3. **Diskusi strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD**

Partisipasi dalam forum diskusi, dan berbagi pengetahuan melalui platform tentang strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. Terusan Ryaoudo 1, Jati Agung, Lampung Selatan

Nomor : B/ 06 /IX/REN.2.3./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : jukrah rencana pendistribusian anggaran dukungan operasional satker

Lampung Selatan, 14 September 2023

Kepada
Yth. DISTRIBUSI A2, B DAN C
POLDA LAMPUNG
di
Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perubahan;
 - g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-06001-0/2023 tanggal 30 November 2022 perihal pengesahan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/590/I/REN.4.1./2023/Srena tanggal 20 Januari 2023 perihal direktif langkah-langkah pelaksanaan kinerja anggaran Polri T.A. 2023;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam DIPA dan RKA-K/L telah dialokasikan anggaran Dukungan Operasional Satker, adapun kegunaan dari anggaran Dukungan Operasional tersebut adalah :
 - a. Dukungan Operasional Satker yang dapat digunakan untuk mendukung anggaran kegiatan yang belum terdukung anggaran dan untuk mendukung kegiatan yang telah terdukung anggaran namun masih mengalami kekurangan;

b. Dukungan.....

2

SURAT KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : B/ 06 /IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

Dukungan Operasional Satker terdapat pada seluruh Satker di jajaran Polda Lampung yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang belum terdukung anggaran dan untuk mendukung kegiatan yang tidak terdukung anggaran namun masih mengalami kekurangan pada Satker masing-masing;

kaitan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada alamat jukrah tentang guna anggaran dukoops, sebagai berikut :

Dukungan Operasional baik dukungan operasional Polda maupun dukungan operasional Satker dapat digunakan untuk mendukung seluruh program Polri :

- 1). Program Profesionalisme SDM Polri;
- 2). Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- 3). Program Modernisasi Alimatsus dan Sarana Prasarana Polri;
- 4). Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 5). Program Dukungan Manajemen.

Satker Jajaran Polda Lampung agar tidak mengusulkan anggaran kepada Kapolda Lampung sebelum memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dan sebelum anggaran Satkernya mengalami kekurangan atau habis;

Satwil agar mengalokasikan anggaran Dukungan Operasional Satker untuk kegiatan-kegiatan yang belum di dukung anggaran antara lain :

- 1). Kegiatan Kerjasama Keamanan, Ketertiban Kementerian dan Lembaga;
- 2). Kegiatan SDM seperti pembinaan jasmani, pembinaan rohani dan pembinaan beladiri Polri;
- 3). Kegiatan Logistik seperti pengecekan kendaraan dinas, HT dan Senpi;
- 4). Dan kegiatan lainnya yang belum terdukung anggaran.

Satwil dapat mengalokasikan anggaran Dukungan Operasional untuk tambahan anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah di dukung anggaran namun masih mengalami kekurangan setelah mengalokasikan anggaran Dukungan Operasional untuk kegiatan yang belum di dukung anggaran antara lain :

- 1). Tambahan kegiatan operasi kewilayahan;
- 2). Tambahan kegiatan Patroli Sabhara;
- 3). Tambahan kegiatan Penggalangan;
- 4). Tambahan kegiatan Lainnya yang mengalami kekurangan.

Dukungan Operasional Polda dan Dukungan Operasional Satker tidak di perbolehkan untuk mendukung anggaran kegiatan pembangunan fasilitas maupun pengadaan materiil (belanja modal).

uai dengan realisasi anggaran Polda Lampung dan jajaran, pada program lidik sidik ; lidik sidik tindak pidana umum maupun lidik sidik tindak pidana narkoba setiap tahun mengalami kekurangan anggaran yang sangat signifikan, dan telah diusulkan untuk amban anggaran tersebut ke Mabes Polri namun sampai saat ini belum ada isasi, sehingga harus menambah strategi pendistribusian anggaran dukops Polda dan kops Satker untuk memenuhi kekurangan tersebut.

5. Untuk

3

SURAT KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : B/ 06 /IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

5. Untuk penyusunan alokasi anggaran di tahun 2024 khususnya anggaran Dukungan Operasional Satker agar sebagian besar digunakan untuk Program lidik sidik tindak pidana umum dan tindak pidana narkoba.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

DAERAH LAMPUNG
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KAPOLDA
KORONA
BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. Terusan Ryacudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan

Lampung Selatan, 6 September 2023

Nomor : B/ 97 /IX/REN.2.3./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Jukrah penggunaan anggaran hibah

Kepada
Yth. DISTRIBUSI A2, B, DAN C
POLDA LAMPUNG
di
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK/05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dengan APBD;
- d. Surat Kapuskeu Polri Nomor : B/1629/XI/2017 Puskeu tanggal 28 November 2017 perihal Hibah Langsung;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023;
- f. Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/423/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2022;
- g. Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/431/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2023;
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2021;
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2022;
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Polda Lampung pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mendapatkan alokasi anggaran hibah baik dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran adapun besarnya sebagai berikut :

a. Hibah.....

d. Program

a. Hibah Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lampung total sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk Belanja Modal sejumlah Rp. 137.758.207.695,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) 65,9% Belanja Barang sejumlah Rp. 71.386.327.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) 34,1% dengan rincian:

- 1) Tahun 2021 sejumlah Rp. 94.161.775.481,- (sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 64.222.608.481,- (enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) 68%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 29.939.167.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) 31,8%.
- 2) Tahun 2022 sejumlah Rp. 65.015.140.090,- (enam puluh lima miliar lima belas juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 39.077.934.090,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) 60,1%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 25.937.206.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah) 39,9%.
- 3) Tahun 2023 sejumlah Rp. 49.967.619.124,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 34.457.665.124,- (tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah) 69,0%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 15.509.954.000,- (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) 31,0%.

Anggaran hibah dari Provinsi Lampung maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota akan dimasukkan dalam DIPA melalui revisi ke dalam Program Polri antara lain :

- a. Program Profesionalisme SDM Polri;
- b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sejumlah Rp. 713.863.270,- (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) 1%;
- c. Program Modernisasi Almatsum dan Sarana Prasarana Polri sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) 65,9%;

3

SURAT KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : B/ 97 /IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejumlah Rp. 70.672.463.730,- (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) 33,1%;

e. Program Dukungan Manajemen.

4. Dapat disimpulkan bahwa dari total anggaran hibah yang diterima oleh Polda Lampung baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk Belanja Modal sebesar 65,9% Belanja Barang sebesar 34,1% yang seharusnya anggaran hibah digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka harkamtibmas dan dapat juga untuk penambahan anggaran lidik sidik.

5. Sedangkan sesuai realisasi anggaran Polda Lampung dan jajaran, pada program lidik sidik baik lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba setiap tahun mengalami kekurangan anggaran yang sangat signifikan, sehingga untuk mendukung kekurangan anggaran tersebut harus mengoptimalkan anggaran hibah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota jajaran Provinsi Lampung.

6. Berkaitan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada Alamat, jukrah tentang penggunaan anggaran hibah sebagai berikut :

- a. Pengajuan anggaran hibah ke Pemerintah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kota/ Kabupaten agar mengutamakan untuk Program pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dan untuk tambahan Program kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba.
- b. Anggaran hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota/ Kabupaten agar sebagian besar digunakan untuk Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan untuk tambahan Program kegiatan lidik sidik baik tindak pidana umum dan lidik tindak pidana narkoba.

7. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KARORENA

Y. BUDI MEJDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

4. Membuat strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD

Proyek Perubahan mengenai Strategi Perencanaan Anggaran untuk memaksimal pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi Lampung merupakan suatu gagasan strategis untuk mengatasi permasalahan keamanan daerah khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana umum melalui kebijakan penataan anggaran yang tepat sasaran.



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

c. Pelaksanaan (*Actuating*) Milestone-3

1. Pelaksanaan rapat ke-2 antara *action leader*, tim Efektif dan persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024
Pentahapan Pelaksanaan rapat ke-2 antara *actionleader*, tim Efektif dan persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024 sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTA – DINAS
Nomor : B/ND- /X/DIK 2.5 /2023/Rorena

Kepada : Yth. *actionleader* dan tim efektif
Dari : Peserta PKN II Angkatan XXVIII
Hal : Undangan rapat ke-2

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/IX/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poin T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tang 05 September 2023 perihal pelaksanaan kegiatan supervisi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pemetaan anggaran TA 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di mohon kepada tersebut alamat berkt untuk menghadiri rapat ke-2 penyusunan proyek perubahan (persiapan penyusn anggaran tindak pidana umum T.A. 2024) yang akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari / tanggal : Seni / 2 Oktober 2023;
 - b. Pukul : 08.30 Wib s/d selesai;
 - c. Tempat : Ruang rapat Gedung A lantai 3 Polda Lampung;
 - d. Pakaian : Yang berlaku hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.


Lampung Selatan, 2 Oktober 2023
a.n. KARORENA POLDALAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Dasar
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/IX/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poin T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
- II. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan rapat dengan tim efektif dalam rangka penyusunan proyek perubahan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wib s/d selesai;
 - b. Rapat berjalan dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa tim efektif meyetujui dan akan mendukung proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.
- IV. Peserta
 - a. Karorena Polda Lampung selaku Mentor;
 - b. Ketua pelaksana proyek perubahan (peserta PKN II Angkatan XXVIII);
 - c. Ketua tim efektif / ketua tim poka I dan II proyek perubahan;
 - d. Anggota tim efektif / poka I dan II proyek perubahan.
- IV. Penutup

Lampung Selatan, 2 Oktober 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

2. Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD

Pentahapan Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut:


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
Jl. Terusan Ryaucudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan Lampung Selatan, 5 Oktober 2023

Nomor : B/156 /X/DIK.2.5./2021/Rorena
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Hal : Undangan Sosialisasi Proyek Perubahan

2 SURAT KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : B/156 /X/DIK.2.5./2023/Rorena
TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

Kepada
Yth. 1. KASUBBAGRENMIN POLDA LAMPUNG,
2. KABAGREN POLRES JAJARAN,
3. TIM EFEKTIF.
di
Tempat

ik menjadi maklum.

a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

1. Rujukan:
a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
b. Keputusan Kapori Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli T.A. 2023;
c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di bahwa personel Birorena Polda Lampung a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E. Kabagrenprogar saat ini sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun 2023, dan sedang menyusun Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum di Provinsi Lampung".

3. Terkait point 2 di atas, di mohon kepada alamat berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi proyek perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun 2023, giat di maksud sebagai bukti (eviden) dalam penyusunan Proyek Perubahan.

4. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada :
a. Hari / tanggal : Kamis / 5 Oktober 2023;
b. Pukul : 09.00 Wib
c. Tempat : Ruang rapat Polda Lampung
d. Pakaian : Yang berlaku hari itu

5. Demikian.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

**NOTULEN SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN
" STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG "
DENGAN STEAK HOLDER DAN TIM EFEKTIF
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Dasar
- a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapori Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
- II. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan Sosialisasi proyek perubahan dengan judul " Strategi Pembiayaan Tindak Pidana umum di Polda Lampung" dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wib s.d selesai;
 - b. Sosialisasi berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa peserta sosialisasi memahami tentang materi yang disampaikan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII T.A. 2024 dan akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kedepannya.
- III. Peserta
- a. Kasubbagrenmin Polda 4 orang;
 - b. Kabagren Polres Jajaran 15 Orang;
 - c. Ketua tim efektif / ketua tim pokja I dan II 2 Orang;
 - d. Anggota tim efektif / pokja I dan II 7 Orang.
- IV. Penutup

Lampung Selatan, 5 Oktober 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Milestone -4

1. Penyusunan anggaran untuk penanganan tindak pidana umum sesuai Jukrah

Pentahapan Penyusunan anggaran untuk penanganan tindak pidana umum sesuai Jukrah sebagai berikut:


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 5 Oktober 2023

Nomor : B/0141 IX/REN.2.3/2023/Srena
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : (satu berkas)
Hal : Alokasi Anggaran Polda/Satker T.A. 2024.

Kepada
Yth. 1. PARA KASATKER TINGKAT MABES POLRI
2. PARA KAPOLDA
di
Tempat

6 SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/0141/REN.2.3/2023/SRENA
TANGGAL: 5 OKTOBER 2023

- Rujukan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
 - Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor B/901/III/HUK.7.1/2023/Srena tanggal 31 Agustus 2023 perihal Petunjuk dan Arah (JUKRAH).
- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-773/MK.02/2023 disampaikan bahwa Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024 telah ditetapkan sebesar Rp117.406.834.092.000,- (seratus tujuh belas triliun empat ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan komposisi belanja pegawai sebesar Rp58.277.148.233.000,- (lima puluh delapan triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), belanja barang Rp32.223.232.836.000,- (tiga puluh dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan belanja modal Rp26.906.453.023.000,- (dua puluh enam triliun sembilan ratus enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rancangan RKA Satker T.A. 2024 bersama ini disampaikan kepada Kasatker/Kapolda, agar alokasi anggaran T.A. 2024 Satker tingkat Mabes Polri dan Polda disesuaikan dengan arah kebijakan dan sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Pedoman

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SRENA


WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:
1. Kapolri.
2. Wakapolri.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/1930 IX/REN.2.3./2023

- Pertimbangan :** bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Lampung khususnya dalam melaksanakan Penyusunan RKA-K/L dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 2. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: Sprin/539/IX/REN.2.3./2023/Srena tanggal 22 September 2023 tentang Tim Kepanitiaan dalam rangka Penyusunan RKA-K/KL Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: Sprin/539/IX/REN.2.3./2023/Srena tanggal 22 September 2023 tentang Tim Kepanitiaan dalam rangka Penyusunan RKA-K/KL Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 4. surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/8154/X/REN.2.3./2023/Srena tanggal 02 Oktober 2023 tentang pelaksanaan Penyusunan RKA-K/L, Penelitian dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :**
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk untuk melaksanakan Penyusunan RKA-K/L dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 05 s.d 15 Oktober 2023 di Hotel Discovery Ancol, Taman Impian Jaya, Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
 2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Lampung;
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 Oktober 2023
KAPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

- Tembusan :**
1. Inwasa Polda Lampung.
 2. Kabidpropam Polda Lampung.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/1930 IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 4 OKTOBER 2023

**PERSONEL RORENA YANG MENGHADIRI PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RKA-K/L, PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN POLRI T.A. 2024**

NO	NAMA / PANGKAT / NRP	PANGKAT	NRP / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	66050661	KARORENA POLDA LAMPUNG
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S. E.	AKBP	74100776	KABAGRENPROGAR RORENA
3	NOVANDRA SUPANDI, S. Pd.	AIPDA	83111378	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN RORENA
4	ABIANSYAH	BRIGPOL	93040033	BAMIN 1 SUBBAGPROG BAGRENPROGAR
5	ERY FRANTANA NURANSYAR, S. Psi.	BRIGPOL	94030543	BAMIN 2 SUBBAGGAR BAGRENPROGAR
6	DWIKI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	94070631	BAMIN 2 SUBBAGGAR BAGRENPROGAR

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 Oktober 2023
KAPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 176 /X/REN.2.3./2023

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Lampung khususnya dalam melaksanakan Penyusunan RKA-K/L dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 2. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: Sprin/539/IX/REN.2.3./2023/Srena tanggal 22 September 2023 tentang Tim Kepanitiaan dalam rangka Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/540/IX/REN.2.3./2023 tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Tim Teknis dalam rangka Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 4. surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/8154/X/REN.2.3./2023/Srena tanggal 02 Oktober 2023 tentang pelaksanaan Penyusunan RKA-K/L, Penelitian dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk untuk melaksanakan Penyusunan RKA-K/L dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 05 s.d 15 Oktober 2023 di Hotel Discovery Ancol, Taman Impian Jaya, Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
 2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Lampung;
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 3 Oktober 2023

KARORENA POLDA LAMPUNG

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

- Tembusan :
1. Kapolda Lampung.
 2. Irwasda Polda Lampung.
 3. Kabidpropam Polda Lampung.

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/ 176 /X/REN.2.3./2023
TANGGAL : 3 OKTOBER 2023

PERSONEL RORENA YANG MENGHADIRI PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RKA-K/L, PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN POLRI T.A. 2024

NO	NAMA	PANGKAT	NRP / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	YULIAN ASWADI, S. Sos.	PEMBINA	197407032002121004	KASUBBAGGAR BAGRENPROGAR RORENA
2	ADY GUNAWAN	AIPDA	79121100	PS. PAMIN 3 RENMIN
3	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	00080058	BAMIN 1 SUBBAGRENMIN RORENA
4	ROHMAD AFRIAWAN	PENGATUR I	197804172008101001	PS. PAMIN 1 RENMIN
5	TITANIA FAUDI AFIFAH, A.Md. Korn.	PENGATUR	199806292022022001	BANUM BAGRENPROGAR
6	IRA SANTIKA	BRIPDA	00060624	BAMIN 2 SUBBAGPROG BAGRENPROGAR

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 3 Oktober 2023

KARORENA POLDA LAMPUNG

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

2. Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggran tindak pidana umum

Pentahapan Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggran tindak pidana umum sebagai berikut:

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kementerian Negara / Lembaga : POLRES LAMPUNG TENGAH
 Unit Eselon II/ Sektur : Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Klasifikasi Rincian Output : Dukungan Manajemen Internal
 Indikator KRO : Layanan Umum

Volume : 12
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dukung Polres dan Polsek : Rp. 2.577.200.000,-

KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 POLRES LAMPUNG TENGAH
 Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Dukungan Manajemen Internal
 Layanan Umum
 12
 Layanan
 Rp. 2.577.200.000,-

KODE	URAIAN SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETAIL	VOLUME SUB OUTPUT	JNS KMPEN (UTM / PNDKG)	RINCIAN PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		utama			2.577.200.000
122.624.96	Layanan Umum	12 Layanan				2.577.200.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan Keamanan		PENDUKUNG	1 Tahun		1.100.000.000
FT	DUKUNGAN OPERASIONAL POLRES					
521115	Honor Operasional Satuan Kerja					234.000.000
	- Honor KPA	12		1 Org x 12 Bulan	4.250.000	51.000.000
	- Honor PPSPM	12		1 Org x 12 Bulan	2.040.000	24.480.000
	- Honor PPK	12		1 Org x 12 Bulan	2.520.000	30.240.000
	- Honor Operator Bendahara Pengeluaran	12		1 Org x 12 Bulan	1.730.000	20.760.000
	- Honor Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran	72		6 Org x 12 Bulan	1.330.000	95.760.000
	- Honor Pejabat Pengadaan (PPBJ)	12		1 Org x 12 Bulan	680.000	8.160.000
	- Honor Operator Simak	12		1 Org x 12 Bulan	300.000	3.600.000
621119	Belanja Barang Operasional Lainnya					566.395.000
>>	Pengamanan Unjuk Rasa					89.400.000
	- Uang Saku	1.800		450 Org x 4 Giat	18.000	28.800.000
	- Uang Makan	1.800		450 Org x 4 Giat	33.000	89.400.000
	- Kertas F4	8		2 Rim x 4 Giat	6.000	48.000.000
	- Photocopy	200		50 Lembar x 4 Giat	300	60.000.000
	- Tinta	4		1 Botol x 4 Giat	4	240.000.000
	- Jilid	28		7 Buah x 4 Giat	28	420.000.000
>>	Pelatihan Dalmas					5.040.000
	- Uang Makan	60		30 org x 2 giat	60	28.000.000
	- Ekstra Fluding	60		30 org x 2 giat	60	14.000.000
	- Uang Saku	60		30 org x 2 giat	60	26.000.000
	- Honor Pelatih	12		3 org x 2 Jp x 2 giat	12	75.000.000
>>	Tambahan Lidik Sidik Pidana Umum	10		10 kas x 1 th	10	21.184.000
a.	Kegiatan Penyelidikan					8.926.000
	- Administrasi Penyelidikan					700.000
	- Pengalihan TJP					300.000
	- Pengamatan (observasi)					300.000
	- Wawancara (Interview)					5.300.000
	- Pembantuan (insurveillance)					300.000
	- Penyamaran (Under Cover)					650.000
	- Pelacakan (tracking)					300.000
	- Penelitian dan analisis dokumen					679.000
	- Pemantauan dan penindakan					397.000
b.	Kegiatan Penindakan / Penangkapan					12.258.000
	- Administrasi Penyelidikan					890.000
	- Upaya Paksa					750.000
	- Pemeriksaan					2.368.000
	- Gelar Perkara					2.550.000
	- Penyusunan Berkas Perkara					450.000
	- Press release					5.250.000
	- Honor Pelatih	96		4 org x 2 Jp x 12 giat	96	75.000.000

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
12.	Polsek Trimurjo					64.320.000
a.	Tambahan Turwal	732		2 Org x 365 Hr	732	39.528.000
b.	Pam Giat Masyarakat	48		4 Org x 12 Giat	48	49.000.000
c.	Tambahan Giat Lidik/sidik sedang	2		2 Kas	2	7.720.000
d.	Pembayaran Wifi Kantor	12		12 Bulan	12	6.000.000
e.	Tambahan Dukmin Kantor	1		1 Giat	1	1.000.000
13.	Polsek Punggur					64.320.000
a.	Tambahan Turwal	732		2 Org x 365 Hr	732	39.528.000
b.	Pam Giat Masyarakat	48		4 Org x 12 Giat	48	49.000.000
c.	Tambahan Giat Lidik/sidik sedang	2		2 Kas	2	7.720.000
d.	Pembayaran Wifi Kantor	12		12 Bulan	12	6.000.000
e.	Tambahan Dukmin Kantor	1		1 Giat	1	1.000.000
>	Dukopsnal Polsek Bumi Ratu Nuban					200.000.000
-	Binjar Informasi Unit Intelkam			2 Org x 24 Giat	48	500.000
-	Pembentukan Intelijen			2 Org x 24 Giat	48	500.000
-	Pembinaan Intelijen			2 Org x 24 Giat	48	135.000
-	Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas			3 Org x 24 Giat	72	52.000
-	Sarana Kontak			2 Giat x 12 Bulan	24	1.000.000
-	Turjawali			2 Org x 365	732	54.000
-	Pam Giat Masyarakat			2 Org x 2 Giat x 12	48	49.000
-	Pembayaran Internet Kantor			12 Bulan	12	500.000
-	Tambahan Lidik Sidik Perkara Sedang			9 Kasus	9	7.720.000
-	Tambahan Dukmin Kantor			1 tahun	1	416.000
>	Dukopsnal Polsek Anak Ratu Aji					200.000.000
-	Binjar Informasi Unit Intelkam			2 Org x 24 Giat	48	500.000
-	Pembentukan Intelijen			2 Org x 24 Giat	48	500.000
-	Pembinaan Intelijen			2 Org x 24 Giat	48	135.000
-	Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas			3 Org x 24 Giat	72	52.000
-	Sarana Kontak			2 Giat x 12 Bulan	24	1.000.000
-	Turjawali			2 Org x 365	732	54.000
-	Pam Giat Masyarakat			2 Org x 2 Giat x 12	48	49.000
-	Pembayaran Internet Kantor			12 Bulan	12	500.000
-	Tambahan Lidik Sidik Perkara Sedang			9 Kasus	9	7.720.000
-	Tambahan Dukmin Kantor			1 tahun	1	416.000
>	Dukopsnal Polseksubsektor Kota Gajah					50.000.000
-	FGD			10 Org x 12 Giat	120	45.000
-	Pam Giat Masyarakat			6 Org x 12 Giat	96	45.000
-	Turjawali [1 ORG x 360 GIAT]			2 Org x 365	730	54.000
-	ATK			1 tahun	1	860.000
TOTAL BIAYA KELUARAN						2.577.200.000

PENANGGUNG JAWAB
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH

 ANDIK PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111028

Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

3. Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum

Pentahapan Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum sebagai berikut:

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (069) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (011) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (352642) POLRES TULANG BAWANG BARAT
 ALOKASI Rp. 46.232.769,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KW	PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES)			4.584,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			4.584,000	RM
	- Giat Intelijen (Lap Info Sasaran CA)	12,0	BRKS	382,000	
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			18.067,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			1.665,000	PNP
	> PEMBINAAN INTELIJEN POLRES			1.665,000	
	- Giat Intijen (1 Org x 9 Giat)	9,0	OG	185,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			16.402,000	RM
	- Binjar (sasaran tomas federasi megow pak) [1 Org x 1 Fokus]	1,0	OG	8.201,000	
	- Binjar (sasaran pegawai lepas) [1 Org x 1 Fokus]	1,0	OG	8.201,000	
LF	PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES)			73.972,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			73.972,000	RM
	> Penggalangan Perorangan Sasaran Ketua Ponpes [1 ORG x 2 GIAT]	2,0	OG	18.493,000	
	> Penggalangan Perorangan Sasaran Ketua Ormas Islam [1 ORG x 2 GIAT]	2,0	OG	18.493,000	
LI	PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES)			36.986,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			36.986,000	RM
	> Penggalangan Intelijen Kelompok Sasaran Walet [Shooting Club [2 ORG x 1 GIAT]	2,0	OG	18.493,000	
VK	KEGIATAN 2 PRIORITAS POLRI			14.769,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			14.769,000	RM
	> PENANGGULANGAN TERORISME/RADIKALISME DAN INTOLERANSI			14.769,000	
	- LIJK (Sasaran simpatisan ISIS, Eks HTI, Eks Napiter) [1 Org x 14 x 3 Giat]	18,0	OG	500,000	
	- Giat Individu (sasaran simpatisan ISIS, Eks HTI, Eks Napiter)	1,0	Giat	5.769,000	
3129	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			2.238.280,000	
3129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Intema[Base Line]	12,0	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.238.280,000	
3129.EBA.962	Lokasi : KAS. TULANG BAWANG BARAT				
003	Layanan Umum	12,0	Layanan	2.238.280,000	
B	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan HONOR PNP			19.800,000	

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (069) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (011) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (070106) POLRES PESISIR BARAT
 ALOKASI Rp. 25.589.079,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.145-L.hwa)			32.403,000	RM
	> POLRES PESISIR BARAT			32.403,000	
	- Penggalangan Terhadap Ketua/Pengurus/Ormas/Kelompok Masyarakat	1,0	GIAT	16.201,000	
	- Penggalangan terhadap ketua/koordinat kegiatan masyarakat Asalnya	1,0	GIAT	16.202,000	
3117	Pembelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara			38.651,000	
3117.EBA	Pembelaksanaan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base Line]	30,0	laporan	38.651,000	
3117.EBA.001	Lokasi : KAS. PESISIR BARAT				
003	Informasi Deteksi Awal Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	30,0	laporan	38.651,000	U
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			1.665,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.145-L.hwa)			1.665,000	PNP
	> POLRES PESISIR BARAT			1.665,000	
	- Fokus	9,0	INFO	185,000	
LF	PENGGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES)			36.986,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.145-L.hwa)			36.986,000	RM
	> GIAT INTELIJEN POLRES PESISIR BARAT			36.986,000	
	- Penggalangan terhadap eks pelaku kejahatan terorisme	1,0	GIAT	18.493,000	
	- Penggalangan terhadap eks ketua/anggota/pengurus kelompok	1,0	GIAT	18.493,000	
3129	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			2.390.531,000	
3129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Intema[Base Line]	12,0	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.390.531,000	
3129.EBA.962	Lokasi : KAS. PESISIR BARAT				
003	Layanan Umum	12,0	Layanan	2.390.531,000	U
B	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan HONOR PNP			24.600,000	

Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Milestone-5

1. Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Pentahapan Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG
DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ ~~558~~ /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JJRN TA 2023 YG AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG JAWAB TTK

DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU KETUA TIM TTK

TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO.H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA TIM TTK

EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK

LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA TTK

ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA TTK

TUJUH TTK

NOMOR : ST/ ~~558~~ /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK

DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA TTK

SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK

SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK

SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK

DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK

TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTIM TTK

DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT BHAYANGKARA TTK

TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT TTK

EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO TTK

LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES TUBA TTK

TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA TTK

DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES PRINGSEWU TTK

SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES TANGGAMUS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KAPOLDA LAMPUNG
KARORENA

KEPALA

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 66050661

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/188/X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- Dasar :
1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
 2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
 3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Letnan Kepala Kepolisian Daerah Lampung
KEPALA KARORENA
LAMPUNG
DAERAH LAMPUNG
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Invasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

CS Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/188/X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	2	3	4	5	
1.	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROGAR	KETUA TIM	
3.	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4.	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROGAR	ANGGOTA	
5.	YULIAN ASWADI, S.SoS.	PEMBINA	KASUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6.	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
7.	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8.	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9.	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10.	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11.	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12.	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13.	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Letnan Kepala Kepolisian Daerah Lampung
KEPALA KARORENA
LAMPUNG
DAERAH LAMPUNG
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

CS Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

2. Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung

Pentahapan Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG
DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ 558 /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK
DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023
TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO
RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS
DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JJRN TA 2023 YG
AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN
TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA
KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG
JAWAB TTK
DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU
KETUA TIM TTK
TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO.H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA
TIM TTK
EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK
LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA
TTK
ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA
TTK
TUJUH TTK

NOMOR : ST/ 558 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK
DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA
TTK
SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK
SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK
SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK
DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK
TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER
KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK
DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTIM
TTK
DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT
BHAYANGKARA TTK
TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT
TTK
EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO
TTK
LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES
LAMTENG TTK
ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES
TUBA TTK
TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA
TTK
DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES
PRINGSEWU TTK
SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES
TANGGAMUS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS



KAPOLDA LAMPUNG
KARORENA

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 66050661

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/188/X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Letnan Kepala Kepolisian Daerah Lampung
KEPALA KARORENA
DAERAH LAMPUNG
L.Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Invasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

CS Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/188/X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	2	3	4	5	
1.	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROGAR	KETUA TIM	
3.	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4.	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROGAR	ANGGOTA	
5.	YULIAN ASWADI, S.SoS.	PEMBINA	KASUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6.	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
7.	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8.	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9.	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10.	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11.	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12.	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13.	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Letnan Kepala Kepolisian Daerah Lampung
KEPALA KARORENA
DAERAH LAMPUNG
L.Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

CS Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Milestone-6

1. Koordinasi ke Pemkab /Kota Jajaran Provinsi Lampung

Pentahapan Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG
DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ 558 /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023
TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO
RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS
DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JJRN TA 2023 YG
AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN
TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA
KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG
JAWAB TTK

DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU
KETUA TIM TTK

TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO.H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA
TIM TTK

EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK

LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA
TTK

ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA
TTK

TUJUH TTK

NOMOR : ST/ 558 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 -10-2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK

DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA
TTK

SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK

SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK

SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK

DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK

TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER
KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK
DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTIM
TTK

DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT
BHAYANGKARA TTK

TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT
TTK

EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO
TTK

LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES
LAMTENG TTK

ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES
TUBA TTK

TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA
TTK

DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES
PRINGSEWU TTK

SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES
TANGGAMUS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS



KAPOLDA LAMPUNG
KARORENA

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 66050661

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/188/X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Y. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KEPALA KARORENA
DAERAH LAMPUNG
L.Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Invasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

CS Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/188/X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	2	3	4	5	
1.	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROGAR	KETUA TIM	
3.	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4.	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROGAR	ANGGOTA	
5.	YULIAN ASWADI, S.SoS.	PEMBINA	KASUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6.	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
7.	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8.	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9.	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10.	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11.	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12.	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13.	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

Y. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KEPALA KARORENA
DAERAH LAMPUNG
L.Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

CS Dipindai dengan CamScanner



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Milestone-7

1. Rapat koordinasi Pembuatan NHPD

Pentahapan Rapat koordinasi Pembuatan NHPD sebagai berikut:



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

2. Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023

Pentahapan Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023 sebagai berikut:



ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NHPD)
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 900/2247/VI.02/2023
 Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marindo Kurniawan, ST, MM**
 NIP : 19801206 200212 1010
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Lampung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Wahyuni Mariati, SE**
 Pangkat : Komisaris Besar Polisi/ 70060466
 Jabatan : Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Lampung
 Nomor KTP : 3276056106700005
 Alamat : GDC PURI INSANI BLOK G-5 No. 9 CILODONG DEPOK JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Kuasa Kapolda Lampung Kepada Kabidkeu Polda Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- PIHAK PERTAMA** memberikan belanja hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)
- PIHAK KEDUA** menyatakan menerima belanja hibah dari **PIHAK PERTAMA** berupa uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah),-
- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung. Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 2 Unit Kapolda dan Wakapolda Lampung (Ford Everest Titanium 4x4 AT)	Rp. 1.615.639.000

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pencairan Tahap I (pertama) :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 2 Unit Kapolda dan Wakapolda Lampung (Ford Everest Titanium 4x4 AT)	Rp. 1.615.639.000
2	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 Itwasda Polda Lampung (Toyota Hiace Premio)	Rp. 575.236.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung I.	Rp. 1.160.907.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung II	Rp. 111.361.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung III	Rp. 195.000.000
6	Pengadaan Tutup Bak Belakang R4 Polda Lampung.	Rp. 22.260.000
7	ADM I	Rp. 13.343.000
Jumlah		Rp. 3.693.746.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Pencairan Tahap II (Kedua) :

NO	Uraian	Jumlah
1	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karoops	Rp. 180.000.000
2	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karorena	Rp. 189.746.000
3	Apel Enam Pilar	Rp. 408.352.000
4	Penanganan Konflik Perlawanan	Rp. 97.244.000

2	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 Itwasda Polda Lampung (Toyota Hiace Premio)	Rp. 575.236.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung I.	Rp. 1.160.907.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung II	Rp. 111.361.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung III	Rp. 195.000.000
6	Pengadaan Tutup Bak Belakang R4 Polda Lampung.	Rp. 22.260.000
7	ADM I	Rp. 13.343.000
8	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karoops	Rp. 180.000.000
9	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karorena	Rp. 189.746.000
10	Apel Enam Pilar	Rp. 408.352.000
11	Penanganan Konflik Perlawanan	Rp. 97.244.000
12	Latihan Dalmas Kerangka	Rp. 29.708.000
13	Rikkes Berkala	Rp. 309.300.000
14	Rikkes PAG (Pendidikan Ahli Golongan)	Rp. 29.826.000
15	Rikkes SBP (Sekolah Bintara Polisi)	Rp. 61.824.000
16	ADMII	Rp. 254.000
17	Tambahan Lidik Sidik Umum	Rp. 800.000.000
18	Tambahan Lidik Sidik Narkoba	Rp. 1.460.046.000
19	Renov Gedung Polda Lampung	Rp. 339.954.000
20	Tambahan Giat Polairud	Rp. 200.000.000
21	Tambahan Giat Bidpropam	Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 8.000.000.000

Terbilang : Delapan Miliar Rupiah

5	Latihan Dalmas Kerangka	Rp. 29.708.000
6	Rikkes Berkala	Rp. 309.300.000
7	Rikkes PAG (Pendidikan Ahli Golongan)	Rp. 29.826.000
8	Rikkes SBP (Sekolah Bintara Polisi)	Rp. 61.824.000
9	ADM II	Rp. 254.000
Jumlah		Rp. 1.306.254.000,-

Terbilang : Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Dua ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Pencairan Tahap III (Ketiga) :

NO	Uraian	Jumlah
1	Tambahan Lidik Sidik Umum	Rp. 800.000.000
2	Tambahan Lidik Sidik Narkoba	Rp. 1.460.046.000
3	Renov Gedung Polda Lampung	Rp. 339.954.000
4	Tambahan Giat Polairud	Rp. 200.000.000
5	Tambahan Giat Bidpropam	Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 3.000.000.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Rupiah

- Pencairan Tahap I (Pertama), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
 - Foto copy Rekening Bank;
 - Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
- Pencairan Tahap II (Kedua)/ tahap selanjutnya, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I (Pertama)/ Tahap sebelumnya;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima Hibah.
- Pencairan Tahap III (Ketiga)/ tahap selanjutnya, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II (Dua)/ Tahap sebelumnya;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima Hibah.

4. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank Lampung atas nama Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 380. 00. 05. 0030. 2
5. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
6. PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.
2. Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan penggunaan dana kepada Perangkat Daerah Terkait;
4. Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Membantu proses pencairan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
2. Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja.
4. Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

**Pasal 5
SANKSI**

Apabila Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6
LARANGAN**

Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepadayang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam NPHD ini, akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati oleh para PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan beban yang tidak ditentukan dari NPHD ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

WAHYUNI MARIATI, S.E.
KOMBESPOL/NRP 70060466

KESATU,

MARINDO KURNIAWAN, ST., MM
NIP. 19801206 200212 1 010



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TULANG BAWANG
NOMOR : 900 / 1386 / V.2 / TB / A / 2023
NOMOR : MOU / 01 / XI / 2023

TENTANG PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. RUSTAM EFFENDI, SE., M.Si., Akt., CA., CMA.** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tulang Bawang berkedudukan di Jalan Negara Lintas Timur Sumatera KM 112 Tih Tobo Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- JIBRAEL BATA AWI, S.I.K** : Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang (POLRES-TUBA) berkedudukan Jalan Lintas Timur KM 130 Menggala Kabupaten Tulang Bawang bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Tulang Bawang (POLRES-TUBA) sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023; dan

- Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/449/V.2/HK/TB/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/145.A/V.2/HK/TB/2023 tentang Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung Serta Skpd Yang Membidangi Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan sebagai Dana Kegiatan Harkamtibmas, Perbaikan/renovasi Barak Dalmas, Perluasan Gedung Klinik Polres Tulang Bawang juga Moubeler kelengkapan kantor serta dukungan pelaksanaan Operasional lainnya Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.2.500.000.000- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Kegiatan Harkamtibmas, Perbaikan/renovasi Barak Dalmas, Perluasan Gedung Klinik Polres Tulang Bawang juga Moubeler kelengkapan kantor serta dukungan pelaksanaan Operasional lainnya Tahun Anggaran 2023.
- Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses kegiatan.
- Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh Kepolisian Resor Tulang Bawang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- PIHAK KESATU berhak :
 - Menerima laporan pelaksanaan Perjanjian terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang.

- Menerima pengembalian sisa dana hibah yang diperuntukkan sebagai Dana Kegiatan Harkamtibmas, Perbaikan/renovasi Barak Dalmas, Perluasan Gedung Klinik Polres Tulang Bawang juga Moubeler kelengkapan kantor serta dukungan pelaksanaan Operasional lainnya Tahun Anggaran 2023.
- PIHAK KEDUA berhak menerima dan menggunakan dana hibah sebesar Rp.2.500.000.000- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari PIHAK KESATU.
- Kewajiban PIHAK KESATU memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.2.500.000.000- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - Mempergunakan dana hibah Rp.2.500.000.000- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2;
 - Menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Mempertanggungjawabkan dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana hibah meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawabkan dana hibah kepada PIHAK KESATU;
 - Menyertakan bunga dan/atau giro bank yang diperoleh kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - Mengembalikan sisa dana hibah dari pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU dengan cara di transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang apabila ada sisa Dana Hibah yang tidak digunakan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ke rekening Kepolisian Resor Tulang Bawang pada Bank Lampung Cabang Tulang Bawang.
- Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah langsung ini;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pakta Integritas;
 - Fotocopy rekening penampungan hibah langsung dari Bank Lampung;
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel; dan
 - Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.500.000.000- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sebagaimana tertera dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

- PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.
- PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan dan PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- Dalam hal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dalam tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) masih terdapat sisa dana Hibah, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa dana hibah kepada PIHAK KESATU dengan cara di transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023.
- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PIHAK KESATU dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Perjanjian hibah ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1).
- PIHAK yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Kondisi Kaha (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, terenggat atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar(force majeure).
- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 9
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DEWATI BATA AWI, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI
NRP. 79052142

PIHAK KESATU



Dr. RUSTAM EFFENDI, SE., M.Si., Akt., CA., CMA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701222 199902 1 001



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Milestone-8

1. Pembuatan Pakta-Integritas antara Polda dan Polres Jajaran

Pentahapan pembuatan Pakta-Integritas antara Polda dan Polres Jajaran sebagai berikut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan satu data kinerja program lidik sidik, kami atas nama pengarah data, wali data, produsen data dan pengguna data, yang selanjutnya menjadi pengelola data kinerja program lidik sidik Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mewujudkan satu data kinerja program lidik sidik Polda Lampung, yang mudah diakses, mudah dibagikan dan disajikan secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. dengan kesadaran penuh berkomitmen menyatakan data kinerja ini secara berjenjang, dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola data kinerja; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasi, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program lidik sidik pada tahun berjalan;
3. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan pada poin dua tersebut di atas, dengan selalu memperhatikan kepatuhan dan disiplin terhadap waktu dalam tata laksana pengelolaan satu data kinerja ini, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan satu data kinerja ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, check and recheck dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan data, sehingga kualitas data tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulasi baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan satu data kinerja ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, November 2023
pembuat pernyataan,

<p>a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KABAGBINSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrim</p> <p><i>[Signature]</i> JUMADI SEMBIRING, S.H. M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030665</p>	<p>a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS PLH. KABAGBINSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrimsus</p> <p><i>[Signature]</i> HANDAK PRAKASA QALBI, S.T. M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75030751</p>	<p>a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA KABAGBINSNAL Selaku Koord. produsen Data Kinerja Resnarkoba</p> <p><i>[Signature]</i> RIZA MALEVI S. S.H. M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050440</p>
<p>a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KABAGBINSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Polairud</p> <p><i>[Signature]</i> GUNAWAN, A.Md. KOMISARIS POLISI NRP 72010459</p>	<p style="text-align: center;">mengetahui, KABID TIR Selaku Wali Data Polda Lampung</p> <p><i>[Signature]</i> M. ARIEF RIFAL, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050577</p>	<p>a.n. DIREKTUR LALU LINTAS KABAGBINSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Polantas</p> <p><i>[Signature]</i> FIRMAN SONTAMA, S. Sos AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091073</p>
<p>KARORENA POLDA LAMPUNG Selaku Sekretaris Pengarah Data Polda Lampung</p> <p><i>[Signature]</i> Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661</p>		<p>KAROOPS POLDA LAMPUNG Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lidik Sidik Polda Lampung</p> <p><i>[Signature]</i> A. ROEMTAAT, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110447</p>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasi, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, check and recheck dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulasi baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023
mengetahui

<p>a.n. KEPALA POLDA BANDA LAMPUNG KABAGREN</p> <p><i>[Signature]</i> Hj. AMALIA SAPUTRI, S.H. KOMISARIS POLISI NRP 68040125</p>	<p>a.n. KEPALA POLDA LAMPUNG Selaku pembina anggaran Polda Lampung</p> <p><i>[Signature]</i> N. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661</p>
--	--

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

d. Monitoring dan Evaluasi *Milestone-9*

- 1. Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan**
Pentahapan melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan sebagai berikut:



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)



HASIL REVISI JUDUL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN SESUAI PETUNJUK ARAHAN COACH

2. Monitoring dan evaluasi

Metode yang tepat untuk monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Penyusunan Dan Pengendalian Pembiayaan Tindak Pidana Umum Oleh Biro Rena Polda Lampung dalam penentuan prioritas masalah yaitu dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menyusun urutan prioritas isu harus diselesaikan. Metode merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik *scoring*. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut menjadi semakin besar. Skoring pada metode USG yaitu dengan memberikan skor berdasarkan skala *likert* 1 – 5.





(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan Project perubahan, maka dapat disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut:

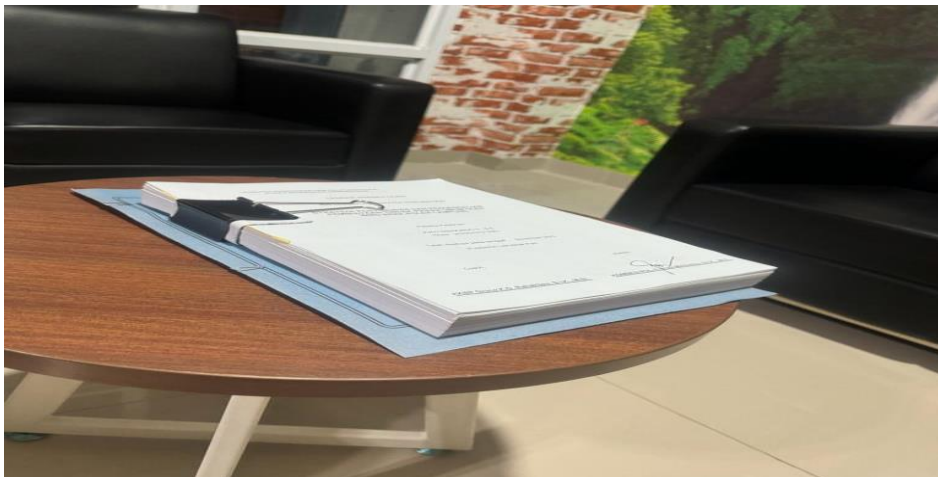
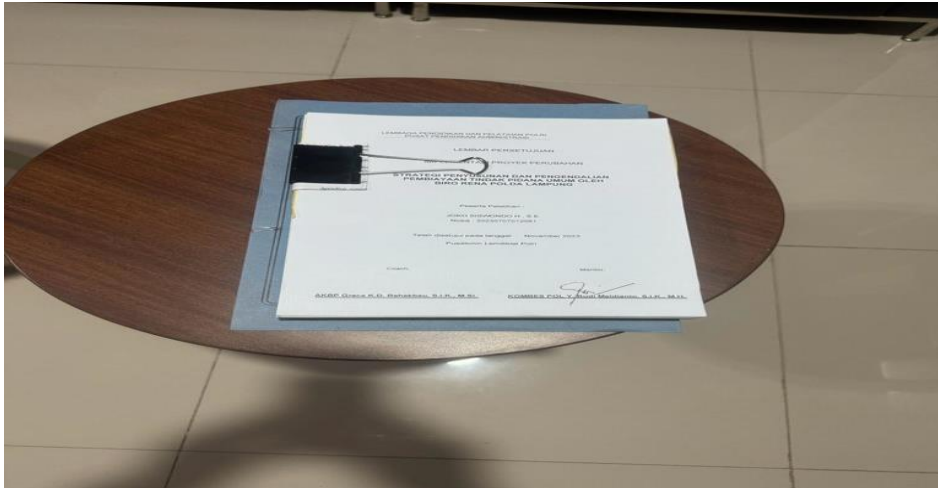
1. Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan Anggaran Hibah anggaran tindak pidana umum.
2. Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda Lampung tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran hasil penataan anggaran Dukops satker yang langsung dimasukan program lidik sidik giat tindak pidana umum, selanjutnya hasil penataan anggaran Dukops satker menjadi tambahan lidik sidik tindak pidana umum.
3. Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang sinkronisasi data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung tentang menurunnya angka kriminilitas yang dapat diakses pada web <https://s.id/REKAPKINERJALPG>

Selanjutnya dalam Pemetaan stakeholder melalui proses identifikasi para stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing stakeholder. Pada Identifikasi pengelompokan Stakeholder di atas menunjukkan adanya perubahan Kuadran *Stakeholder* sebelum dan sesudah Proyek Perubahan, yaitu perpindahan Sponsor, dari *kuadran Latents* ke *Kuadran Promoters*, serta Tim efektif dari *Kuadran Apathetic* ke *Defenders*. Hal ini terjadi selama proyek perubahan terus dilakukan strategi komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, penjelasan tentang aksi perubahan dan adanya dukungan dari *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal* sehingga optimalisasi proyek perubahan telah tercapai.

1. Pada tahap ini, *project leader* melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut Pengumpulan dukungan terhadap project perubahan melalui surat pernyataan dukungan *stakeholder*.
2. Pembuatan video project perubahan dan testimoni para *stakeholder* terkait project perubahan.
3. Penyusunan Pakta-Integritas dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Hibah APBDP dari Pemprov Lampung T.A 2023.
4. Persetujuan dan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan rencana strategi yang di sepakati bersama.
5. Monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 terkait penanganan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung
6. Menyusun laporan pelaksanaan project perubahan oleh project leader Persetujuan laporan project perubahan oleh mentor.

3. Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan

Pentahapan Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan sebagai berikut



2. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada Project Leader dan jajaran agar memudahkan pelaksanaan project perubahan.

3. STRATEGI MANAJEMEN RESIKO MENGATASI MASALAH

Dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini, diprediksi akan muncul beberapa masalah. Masalah pertama bersifat adaptif dan yang bersifat

teknis, beberapa hal yang menjadi potensi masalah yang akan menjadi penghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang memadai untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya masalah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka strategi antisipasi yang dilakukan adalah dengan memetakan kekuatan pengaruh masing-masing *stakeholder* yang mendukung, menolak dan netral terhadap proyek perubahan, setelah itu dilakukan intervensi dengan strategi komunikasi yang tertentu yang sesuai dengan posisi masing-masing *stakeholder*.

Tabel berikut akan menguraikan tentang potensi masalah, risiko dan strategi mitigasi masalah yang harus dilakukan:

Tabel 3.5. Potensi, Risiko dan Strategi Mitigasi masalah

POTENSI, RESIKO DAN STRATEGI MENGATASI MASALAH			
No	Potensi	Risiko yang terjadi	Strategi Mitigasi
1.	<i>Action leader</i> kesulitan mengatur waktu antara melaksanakan aksi perubahan dan Tupoksi sebagai Auditor.	Pelaksanaan proyek perubahan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena rutinitas.	menyusun jadwal pelaksanaan proyek perubahan secara rinci dan komitmen penuh terhadap jadwal yang telah ditentukan.
2.	Minimnya waktu tim efektif untuk dapat fokus membantu proyek perubahan karena harus melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.	Adanya peran tim efektif yang tidak terlaksana	melakukan komunikasi efektif dan berkoordinasi dengan baik dengan tim efektif tentang pentingnya proyek perubahan serta melakukan evaluasi dan pengendalian Tim efektif agar tetap selalu melakukan kegiatan yang telah ditugaskan dalam rangka melaksanakan Proyek Perubahan.

3.	Banyaknya data dan berkas yang harus diinput ke dalam aplikasi.	Kurangnya jumlah SDM yang melakukan penginputan.	Membuat Surat Perintah penunjukkan untuk melakukan tugasnya.
4.	Kemungkinan mutasi pejabat seperti sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>	Mundurinya jadwal pelaksanaan proyek perubahan	Segera melaporkan kepada pejabat (sponsor, mentor atau <i>stockholder</i>) baru untuk mendapatkan persetujuan.

4. IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER* SETELAH PROYEK PERUBAHAN

Pengklasifikasian *stakeholder* internal dan eksternal, deskripsi, posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6. Identifikasi Stakeholder Setelah Proyek Perubahan

No	DESKRIPSI	PERANAN	POSISI	PENGARUH	NILAI
A. <i>STAKEHOLDER</i> INTERNAL					
1	Kapolda Lampung (Sponsor)	memberikan nasehat, dukungan, persetujuan dan arahan atas setiap kebijakan untuk menyukseskan rencana aksi perubahan	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	10 Sangat Tinggi (+++)
2	Karorena Polda Lampung	berperan dalam dukungan, persetujuan, dan bimbingannya secara langsung Kepada Action Leader atas Setiap kegiatan yang diperlukan dalam rangka menyukseskan Rencana aksi Perubahan.	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	10 Sangat Tinggi (+++)
3	Dir Reskrim Polda Lampung	Berperan memberikan Saran dan masukan Kepada <i>Action Leader</i>	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Tinggi (++)
4	Kapolres/Ta	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	5 Sedang (++)

5	Para Kabag Rorena dan Tim Efektif	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan	Defenders	Pengaruh Tinggi dan peran rendah	7 Tinggi (++)
6	Para Kasubdit Reskrimum Polda Lampung	Berperan memberikan Saran dan masukkan Kepada <i>Action Leader</i>	Defenders	pengaruh tinggi dan peranan rendah	7 Tinggi (++)
7	Personil Birorena Polda Lampung	Sebagai pendukung Rencana aksi perubahan.	Defenders	pengaruh tinggi dan peranan rendah	2 Netral (+/-)
8	Para KabagrenPolres/ta	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Tinggi Peran Rendah	7 Tinggi(++)
9	Para Kasatreskrim	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	4 Sedang (++)
10	Kapolsek	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	4 Sedang (++)

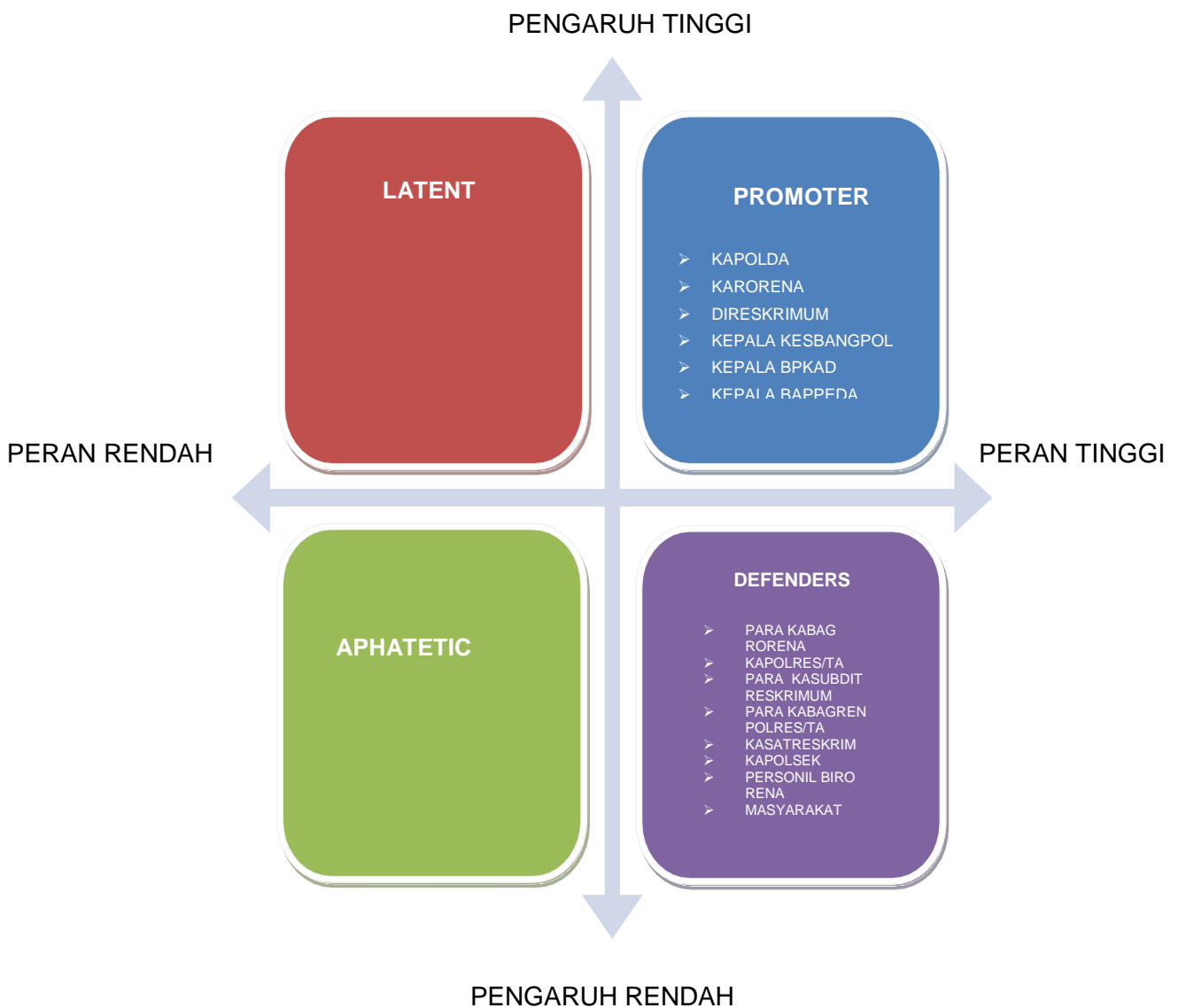
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL

1	Kepala Bapeda Provinsi dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Latent	Pengaruh tinggi, Peran Rendah	6 Tinggi (++)
2	Kepala Kesbangpol dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Tinggi (++)
3	Kepala BPKAD dan Kab/Kota	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Promoter	pengaruh tinggi dan peranan tinggi	9 Tinggi (++)
4	Masyarakat	Sebagai pendukung rencana aksi perubahan.	Defenders	Pengaruh Rendah, Peran Tinggi	4 Sedang (++)

Kuadran *Stakeholder* setelah proyek perubahan

- a. Identifikasi Pengelompokan *Stakeholder* menggunakan empat (4) kuadran Setelah Proyek perubahan (Proper) eluruh *stakeholder* tersebut apabila dipetakan dalam Kuadran *Stakeholder*, maka akan tampak seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.4. Kuadran *Stakeholder* setelah proyek perubahan



Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing stakeholder.

Pada Identifikasi pengelompokan Stakeholder di atas menunjukkan adanya perubahan Kuadran *Stakeholder* sebelum dan sesudah Proyek Perubahan, yaitu perpindahan Sponsor, dari *kuadran Latents* ke *Kuadran Promoters*, serta Tim efektif dari *Kuadran Apathetic* ke *Defenders*. Hal ini terjadi selama proyek perubahan terus dilakukan strategi komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, penjelasan tentang aksi perubahan dan adanya dukungan dari *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal* sehingga optimalisasi proyek perubahan telah tercapai.

1) Promoters (High Influence/ High Interest)

Komunikasi dengan stakeholders yang dikategorikan dalam kelompok promoters merupakan strategi komunikasi kunci yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek perubahan, project leader melakukan berbagai metode meliputi konsultasi, penyampain informasi secara langsung dan menyeluruh serta intensif.

2) Latens (High Influence/ Low Interest)

Walaupun dikategorikan memiliki kepentingan rendah terhadap proyek perubahan, project leader akan berupaya untuk membangun komunikasi yang optimal dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dalam pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dengan metode informatif, koordinatif dan komunikatif untuk mendapatkan komitmen dan kesepahaman antar stakeholders.

3) Defenders (Low Influence/ High Interest)

Komunikasi yang baik yang dilakukan project leader dengan kelompok stakeholders defenders sebagai penerima manfaat dari proyek perubahan. Upaya komunikasi yang dilakukan menggunakan strategi komunikasi dengan metode informatif, koordinatif dan edukatif dengan memberikan informasi secara komprehensif berkaitan dengan data faktual dan pemahaman terkait manfaat proyek perubahan secara persuasif.

4) **Apathetics (Low Influence/ Low Interest)**

Upaya komunikasi yang dibangun oleh project leader kepada kelompok stakeholders Apathetics yaitu dengan menginformasikan secara komprehensif dan intensif yang diharapkan memberikan pengaruh dan pemahaman terkait pentingnya proyek perubahan ini. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan metode informatif, edukatif dan persuasif dengan tujuan memberikan informasi secara persuasif meliputi manfaat, data faktual dan pengetahuan terhadap stakeholders kelompok ini.

5. **CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN**

Berdasarkan tujuan yang telah dicapai didalam pelaksanaan proyek perubahan, maka *milestone* atau pentahapan yang telah dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasi (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)
- d. Monitoring dan Evaluasi (*Controlling*)
- e. Pasca Diklat

Milestone atau pentahapan proyek perubahan merupakan tahap inti, dimana pada tahap ini inovasi dari project perubahan yang akan dilakukan oleh *project leader*, dibuat menjadi beberapa tahapan kegiatan.

Pencapaian hasil project perubahan

Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan Project perubahan, maka dapat disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

- 1) Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta

kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan Anggaran Hibah sejumlah Rp. **1.344.620.000,-** (penambahan anggaran tindak pidana umum).

HIBAH APBD PERUBAHAN PEMPROV LAMPUNG KEPADA POLDA LAMPUNG T.A. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Tambahan Lidik Sidik Umum	Rp. 800.000.000,-
2	Tambahan Lidik Sidik Narkoba	Rp. 1.460.046.000,-
3	Renov Gedung Polda Lampung	Rp. 339.954.000,-
4	Tambahan Giat Polairud	Rp. 200.000.000,-
5	Tambahan Giat Bidpropam	Rp. 200.000.000,-
Jumlah		Rp. 3.000.000.000,-
Terbilang : <i>Tiga Miliar Rupiah</i>		

RINCIAN ANGGARAN APBDP TULANG BAWANG

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	1	2
1	OPERASIONAL POLRES TULANG BAWANG DAN HARKAMTIBMAS	Rp. 2.500.000.000
2	PENGAMANAN PELAKSANAAN KEGIATAN NATAL TAHUN 2023	Rp. 100.080.000
3	PENGAMANAN TAHUN BARU 2024	Rp. 17.800.000
4	GIAT KRYD SEPTEMBER	Rp. 37.856.000
5	GIAT KRYD OKTOBER	Rp. 64.896.000
6	KEGIATAN SATUAN LALU LINTAS POLRES TULANG BAWANG	Rp. 493.090.000
7	KEGIATAN SATUAN RESKRIM POLRES TULANG BAWANG (LIDIK SIDIK)	Rp. 544.620.000
8	RENOVASI DAN PERLUASAN FASILITAS GEDUNG POLRES TULANG BAWANG	Rp. 1.241.658.000
TOTAL		Rp. 2.500.000.000

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

- 2) Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda Lampung tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran hasil penataan anggaran Dukops satker yang langsung dimasukkan program lidik sidik giat tindak pidana umum sejumlah Rp.

1.409.040.000,- selanjutnya hasil penataan anggaran Dukops satker menjadi tambahan lidik sidik tindak pidana umum sejumlah Rp. 1.764.102.000,-.

ALOKASI TINDAK PIDANA UMUM (DUKOPS SATKER)

• POLRES MESUJI	Rp. 189.175.000
• POLRES TULANG BAWANG BARAT	Rp. 200.000.000
• POLRES LAMPUNG SELATAN	Rp. 106.115.000
• POLRES METRO	Rp. 115.800.000
• POLRES LAMPUNG UTARA	Rp. 535.455.000
• POLRES LAMPUNG BARAT	Rp. 208.316.000
• POLRES TULANG BAWANG	Rp. 200.720.000
• POLRES TANGGAMUS	Rp. 211.840.000
• POLRES LAMPUNG TIMUR	Rp. 84.920.000
• POLRES WAY KANAN	Rp. 320.296.000
• POLRES LAMPUNG TENGAH	Rp. 211.840.000
• TOTAL	Rp. 1.764.102.000

ALOKASI TINDAK PIDANA UMUM

No	POLRES	2023	2024
1	2	3	4
1	DITRESKRIMUMU POLDA LAMPUNG	4.810.032.000	5.352.891.000
2	POLRES PESAWARAN	2.222.981.000	2.090.180.000
3	POLRES MESUJI	2.558.091.000	2.449.754.000
4	POLRES PRINGSEWU	2.342.816.000	2.342.816.000
5	POLRES TULANG BAWANG BARAT	1.945.381.000	2.230.381.000
6	POLRESTA BANDAR LAMPUNG	4.387.262.000	4.753.918.000
7	POLRES LAMPUNG SELATAN	4.349.073.000	3.806.654.000
8	POLRES METRO	2.684.512.000	3.115.448.000
9	POLRES LAMPUNG UTARA	4.102.506.000	4.102.506.000
10	POLRES LAMPUNG BARAT	1.958.280.000	1.566.917.000
11	POLRES TULANG BAWANG	3.797.852.000	4.016.640.000
12	POLRES TANGGAMUS	2.738.326.000	2.958.326.000
13	POLRES LAMPUNG TIMUR	4.112.056.000	4.515.811.000
14	POLRES WAY KANAN	3.525.589.000	3.355.008.000
15	POLRES LAMPUNG TENGAH	5.027.294.000	5.052.346.000
16	POLRES PESIBAR	720.468.000	981.963.000
TOTAL		51.282.519.000	52.691.559.000
KENAIKAN ALOKASI ANGGARAN LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM DARI TAHUN 2023 KE TAHUN 2024 SEBESAR Rp. 1.409.040.000,-			

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

- 3) Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang sinkronisasi data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung pada web <https://s.id/REKAPKINERJALPG> .

2. Jangka Menengah

- 1) Rencana Usulan Permohonan Anggaran Hibah ke Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana strategi yang di sepakati bersama untuk T.A. 2024.
- 2) Terlaksananya kegiatan operasi kepolisian dalam pembiayaan tindak pidana umum sesuai dengan rencana strategi secara maksimal.
- 3) Meningkatkan penyelesaian tindak pidana umum di Provinsi Lampung dengan maksimal.

3. Jangka Panjang

- 1) Impelementasi Nota Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Polda Lampung secara berkelanjutan.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 terkait penanganan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung.
- 3) Terwujudnya harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

6. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata pelatihan pilihan yang mendukung proyek perubahan, antara lain:

a. Manajemen strategis.

Mata Pelatihan manajemen strategi merupakan salah satu mata pilihan yang mengajarkan bagaimana melakukan analisis terhadap situasi internal dan eksternal, melakukan kajian menyeluruh, penelusuran, pembuktian dan penilaian terhadap berbagai faktor tersebut, sehingga lahir strategi/ inovasi yang menjadi jalan keluar atas permasalahan.

b. *Organizational Learning*.

Mata Pelatihan *organizational learning* adalah proses dimana organisasi memahami dan mengelola pengalaman mereka untuk dijadikan

perbaikan dan pengembangan pada organisasi.

c. Kemitraan dengan Pemerintah.

Mata Pelatihan kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.

Dalam melakukan pengembangan potensi diri sesuai dengan strategi yang telah disusun dan telah disepakati dengan mentor. Mata pelatihan pilihan manajemen strategis, *organization learning*, dan kemitraan efektif untuk meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman perspektif kerja, masalah, keinginan memperbaiki diri dan menyebarkan kepada teman kerja. Perubahan tingkat individu meliputi; keinginan memperbaiki perilaku kerja; keterbukaan dan kesiapan pencatatan perilaku; kesediaan menyediakan waktu; lebih banyak mempergunakan analisis penyebab masalah; lebih banyak dialog dan tidak terjebak dengan gejala; keinginan dan upaya menyebarkan *organizational learning*, manajemen strategis dan kemitraan dalam pelatihan. Bentuk perubahan kelompok dan institusi berupa upaya untuk menyampaikan informasi pelatihan lintas sektor yang lebih luas.

7. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SETELAH PROYEK PERUBAHAN

a. Penilaian Sikap Prilaku

Berdasarkan hasil penilaian peserta dan penilaian dari mentor terhadap proses pengembangan kompetensi *action leader* yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan mencakup 3 (tiga) kompetensi, yaitu:

1) Integritas

Dalam penilaian kompetensi Integritas yang mencakup 6 (enam) sub komponen, antara lain : Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan Dilematis dengan hasil nilai rata-rata ≥ 9.00

2) Kerjasama

Dalam penilaian kompetensi Kerja Sama yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Kerjasama Internal, Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, Komitmen dalam Tim dengan hasil nilai rata-rata ≥ 9.00 .

3) Mengelola Perubahan

Dalam penilaian kompetensi Mengelola Perubahan yang mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, Inisiatif dengan hasil nilai rata-rata ≥ 9.00 .

Dari hasil ketiga kompetensi tersebut diatas bahwa rata-rata Nilai Sikap Perilaku dari *action leader* adalah ≥ 9.00 dengan kategori “ISTIMEWA”

Tabel 3.7. Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta proyek perubahan

Uraian	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	Istimewa
Mentor	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	≥ 9.00	Istimewa
Kualifikasi Per SubKomponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa

Keterangan Kualifikasi:

9.00-10 : Istimewa
 7-8.99 : Baik
 5-6.99 : Cukup
 3-4.99 : Kurang
 1-2.99 : Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9.00
Kualifikasi: Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir Peserta atau Mentor dan rekap nilai gabungan peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi.
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan JPT Pratama.
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam jabatan JPT Pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta
Sangat Kurang	: diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan biro SDM/Kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama.

b. Pengembangan Kompetensi Diri

Dalam meningkatkan perencanaan anggaran untuk memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi Lampung akan berdampak terhadap perubahan manajemen dalam implementasi proyek perubahan maka dibentuk kegiatan-kegiatan yang terukur dan terjadwal. Pengembangan Kompetensi Diri dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan perencanaan anggaran.



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

c. Pengembangan Kompetensi kepada *Stackholder* dan Anggota

Dalam meningkatkan perencanaan anggaran untuk memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi Lampung telah berdampak terhadap perubahan manajemen dalam implementasi proyek perubahan maka dibentuk kegiatan-kegiatan yang terukur dan terjadwal. Adapun rencana strategi pengembangan kompetensi kepada *stackholder* dan anggota:

- i. Pelaksanakan Jukrah dan pembentukan tim penyusun anggaran.
- ii. Kegiatan sosialisasi perencanaan anggaran T.A. 2024

- iii. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas.
- iv. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas.
- v. Membangun kesepakatan pakta integritas dengan Pemerintah Daerah dalam Perubahan strategi pada perencanaan anggaran T.A. 2024.



(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran)

8. STRATEGI MARKETING

Strategi *Marketing* dalam rangka terwujudnya sinkronisasi antara renja Polda Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga strategi ini lebih mudah diterima. Langkah strategi marketing menggunakan 4P1C (*Product, Price, Place, Promotion, dan Customer*) sebagai berikut:

a. **Product**

Product yang dihasilkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Fakta Integritas, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LHPT), Analisis dan Evaluasi (Anev).

b. Price

Penambahan Anggaran Tindak Pidana Umum baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

c. Place

Mabes Polri, Polda Lampung dan Pemerintah Daerah Lampung

d. Promotion

Sosialisasi, Rapat, Konsolidasi, Monitoring, Evaluasi.

e. Customer

Personil Polda Lampung dan Masyarakat Provinsi Lampung

9. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Sebagai organisasi pembelajar yang efektif Rorena PoldaLampung memenuhi 5 dimensi sebagai berikut:

a. Personal Mastery

Dimensi *personal mastery* dalam proyek perubahan ini dapat menghasilkan dan menjaga *creative tension* selalu terjaga dengan terus meningkatkan kemampuan dan terusberkembang.

b. Mental Model

Dimensi *mental model* yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah mengubah perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD yang akan datang agar tepat sasaran.

c. Share dvision

Dimensi *share dvision* yang digunakan dalam proyek perubahan ini berupa berupa komitmen dan dukungan stakeholder dalam mencapai visi, tujuan yang sudah ditetapkan dalam proyek perubahan yang berupa sinkronisasi antara Renja Polda Lampung dan PemerintahProvinsi Lampung.

d. Team Learning

Dimensi *teamlearning* yang digunakan dalam proyek perubahan ini, yaitu kemampuan *Project Leader* beserta tim efektif mempengaruhi *stakeholder* untuk mengimplementasi proyek perubahan ini dimana

ada *knowledge sharing*, sosialisasi.

e. *System Thinking*

Dimensi *system thinking* yang digunakan dalam proyek perubahan ini, meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk mendukung kegiatan operasional lidik sidik sehingga dapat maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan.

BAB V. PENUTUP

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan aksi perubahan tentang Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum Di Polda Lampung, implementasi proyek perubahan berorientasi meningkatkan efektifitas kinerja dalam perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD TA. 2023 dan TA. 2024 mendatang dengan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kinerja Rorena Polda Lampung dan dapat memberi manfaat bagi peserta didik serta memberikan masukan bagi peningkatan kinerja organisasi.

A. LESSON LEARNED

Selama proses proyek perubahan ini, beberapa pelajaran penting dapat diambil. Kepemimpinan yang kuat menjadi sendi pokok keberhasilan dalam perencanaan anggaran.

1. Visi yang jelas dan komunikasi efektif agar seluruh tim dan pihak terkait memahami tujuan dan arah proyek. Hal ini membantu dalam menghilangkan ambiguitas dan mencegah kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum secara tepat sasaran.
2. Keterlibatan aktif dari stakeholder, menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selama proyek berlangsung, kami menyadari bahwa tidak semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang prosedur dan standar pengawasan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pembinaan menjadi esensial untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan tugas.
3. Adaptabilitas juga menjadi pelajaran penting. Seperti dalam proyek lainnya, tantangan dan hambatan muncul di tengah jalan. Kepemimpinan yang adaptif dan responsif memungkinkan tim

untuk menavigasi perubahan dengan efektif, memastikan proyek tetap di jalur yang benar. Evaluasi reguler dan pemberian feedback terhadap strategi perencanaan anggaran menunjukkan bahwa pendekatan yang konstan dalam memeriksa dan menyesuaikan diri adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

Namun, pelajaran terbesar mungkin adalah pentingnya integritas dan etika dalam proses perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD TA. 2023 dan TA. 2024 secara tepat sasaran. Tanpa kedua nilai inti ini, seluruh usaha perencanaan anggaran dapat dengan mudah terkompromi, mengancam keberhasilan proyek dan, yang lebih penting, kepercayaan publik. Akhirnya, penerapan proyek perubahan ini membantu meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran, menunjukkan bahwa inovasi adalah hal yang tidak bisa diabaikan dalam strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung.

B.KESIMPULAN

Pasca pelaksanaan aksi perubahan ini maka perencanaan anggaran termonitor dengan lebih baik dan terintegrasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat tim yang solid dalam melakukan perumusan Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi sehingga tujuan utama dari proyek perubahan ini dapat tercapai sebagaimana terlampir Surat Perintah dalam Penunjukan Tim Efektif Aksi Perubahan.
2. Terwujudnya komitmen bersama pemerintah daerah melalui Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan Anggaran Hibah sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (penambahan

anggaran tindak pidana umum) dan sejumlah Rp. 1.460.046.000,- (penambahan anggaran tindak pidana narkoba), total penambahan Anggaran Hibah sejumlah Rp. 2.760.046.000,-

3. Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda Lampung tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran yang semula sejumlah Rp. 46.472.487.000,- menjadi sejumlah Rp. 49.122.770.000,- dengan alokasi penambahan anggaran sejumlah Rp. 2.650.283.000,- sehingga kegiatan operasi kepolisian dalam pembiayaan tindak pidana umum sesuai dengan rencana strategi dengan maksimal.
4. Terdapat Rencana Usulan Permohonan Anggaran Hibah ke Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana strategi yang di sepakati bersama secara berkelanjutan.
5. Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang sinkronisasi data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung dalam mendukung harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat direkomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh personel Polda Lampung terkhusus bagi Rorena Polda Lampung, akan pentingnya perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD agar tepat sasaran;
2. Dibutuhkan dukungan penuh dari Kasatker terhadap implementasi Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Perlu adanya monitor dan evaluasi dari kasatker tentang keberlangsungan Pakta Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran dan kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

LAMPIRAN DATA DUKUNG *MILESTONE* (PENTAHAPAN) PROYEK PERUBAHAN

MILESTONE 1

A. Perencanaan (*Planning*)

4. Melaporkan kepada atasannya selaku Mentor proyek perubahan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/1790/IX/DIK.2.5./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

Dasar : 1. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/I/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VI/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/583/IX/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari, ditunjuk untuk menjadi Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023,
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA

Dr. UMAR EFFENDI, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. AS SDM Kapoldi
2. Kapolda Lampung
3. Irwasda Polda Lampung
4. Kabidpropam Polda Lampung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/1790/IX/DIK.2.5./2023
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PERSONEL POLDA LAMPUNG YANG DITUNJUK MENJADI MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGKATAN XVIII T.A. 2023

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KET
1	YOSEF BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL / 66050661	KARORENA POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
2	ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.	KOMBES POL / 78061264	DIRRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP RIZA PAHLEVI, S.A.G., S.H. DAN AKBP SASTRA BUDY, S.E., S.H.
3	SIS MULYONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 65110552	DIRPOLAIRUD POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP ZULMAN TOPANI, A.MD., S.PD.I.
4	dr. MARDI SUDARMAN, M.M.	KOMBES POL / 75070971	KABIDDOKKES POLDA LAMPUNG	MENTOR AKBP dr. HIDAYATULLAH, SP, THIT-KL.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 4 September 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA

Dr. UMAR EFFENDI, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA
POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR**



**KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA
POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR**

5. Membuat surat perintah Tim efektif dan undangan rapat sertasosialisasi.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : SP/IN/46/IX/DIK/2.5/2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poin T.A. 2023;
3. Surat Kapolri Nomor : B/5733/VI/DIK/2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanggilan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII T. A. 2023

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERSONEL YANG NAMA-NAMA PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari di tunjuk sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan dengan judul Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum di Polda Lampung;
2. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
3. melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Karorena Polda Lampung

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 06 September 2023
KARORENA POLDA LAMPUNG
KEPALA
Y. BUDI MULDANTO, S.I.K., M.H.
KOMANDAN LAMPUNG POLISI NRP 66050661

Tembusan :
1. Kapolda Lampung
2. Inwasda Polda Lampung
3. Kabidpropam Polda Lampung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SP/IN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SP/IN/46/IX/DIK/2.5/2023
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2023

**DAFTAR NAMA PERSONEL YANG DITUNJUK SEBAGAI TIM EFEKTIF
PADA AKSI PERUBAHAN PESERTA PKN TK. II ANGGKATAN XXVIII T.A. 2023 POLDA LAMPUNG**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	PENUGASAN	
1	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA PELAKSANA	
2	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAGSTRAJEMEN RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA TIM POKJA I	
3	DEWAN RONIYUS PUTRA, S.E., M.Si.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
4	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA	PS. KASUBBAGRENMIN RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
5	ERI FRANTANA NURANSYAR, S. Pd.	BRIGPOL	BAMIN 2 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
6	DWIGI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
7	TITANIA FAUDI AFIFAH, A. Md., Kom.	PENGATUR	BANUM BAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	

8. ENDAH.....

2

LAMPIRAN SP/IN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SP/IN/46/IX/DIK/2.5/2023
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2023

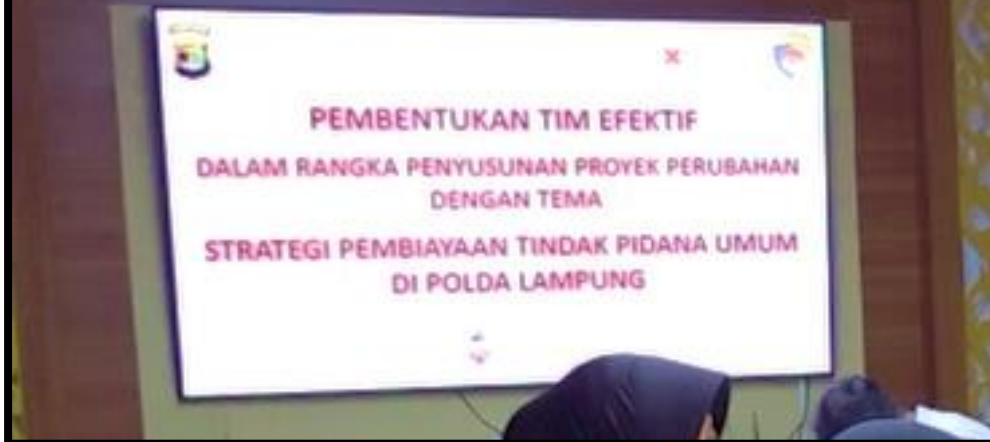
NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	PENUGASAN	
8	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG	KETUA TIM POKJA II	
9	YULIAN ASWADI, S. Sos.	PEMBINA	KASUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
10	NOVANDRA SUPANDI, S. Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
11	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	
12	IRA SANTIKA	BRIPDA	BAMIN 2 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 06 September 2023
KARORENA POLDA LAMPUNG
KEPALA
Y. BUDI MULDANTO, S.I.K., M.H.
KOMANDAN LAMPUNG POLISI NRP 66050661

6. Pembentukan Tim Efektif.



PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

7. Mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan proyek perubahan



MILESTONE 2

B. Pengorganisasi (*Organizing*)

1. Koordinasi dengan rekan kerja serta *stakeholder Internal dan Eksternal* tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan.



2. Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan Proyek perubahan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTA – DINAS
Nomor : B/ND- 201 IX/DIK.2.5./2023/Rorena

Kepada : YB. Tim Efektif Proyek Perubahan
Dari : Peserta PKN II Angkatan XXVIII
Hal : Undangan Rapat Awal

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poin T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di mohon kepada tersebut alamat berkenan untuk menghadiri rapat penyampaian proyek perubahan yang di gagas oleh peserta PKN II angkatan XXVIII tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari / tanggal : Rabu / 20 September 2023;
 - b. Pukul : 09.00 Wib s/d selesai;
 - c. Tempat : Ruang rapat Gedung A lantai 3 Polda Lampung.
 - d. Pakaian : Yang berlaku hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

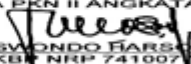
Lampung Selatan, 18 September 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PROYEK PERUBAHAN HARI / TANGGAL : RABU / 20 SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES	KARORENA	
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAGRENPROGAR RORENA	
3	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAGSTRAJEMEN RORENA	
4	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAGDALPROGAR RORENA	
5	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBBAGGAR RORENA	
6	DEWAN RONIYUS PUTRA, S.E., M.Si.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGDALPRO RORENA	
7	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA	PS. KASUBBAGRENMIN RORENA	
8	NOVANDRA SUPANDI, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN RORENA	
9	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROGRAM	
10	ERI FRANTANA NURANSYAR, S. Psi.	BRIGPOL	BAMIN 2 SUBBAGANGGARAN	
11	DWIKI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGANGGARAN	
12	TITANIA FAUDI AFIFAH, A. Md., Kom.	PENGATUR	BANUM SUBBAGRENPROGAR	
13	IRA SANTIKA	BRIPDA	BAMIN 2 SUBBAGPROGRAM	

Lampung Selatan, 18 September 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Dasar
 - a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poin T.A. 2023;
 - c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
- II. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan rapat dengan tim efektif proyek perubahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wib s.d selesai;
 - b. Rapat berjalan dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa tim efektif proyek perubahan meyetujui dan siap mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.
- III. Peserta
 - a. Karorena Polda Lampung selaku Mentor;
 - b. Ketua pelaksana proyek perubahan (peserta PKN II Angkatan XXVIII);
 - c. Ketua tim efektif / ketua tim pokja I dan II proyek perubahan;
 - d. Anggota tim efektif / pokja I dan II proyek perubahan.
- IV. Penutup

Lampung Selatan, 20 September 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

Nomor : B/ 96 /XII/DIK.2.5./2021/Rorena
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Hal : Undangan rapat

Kepada
Yth. 1. KABAGREN POLRES
JAJARAN;
2. TIM EFEKTIF.

di
Tempat

1. Rujukan:
- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/II/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
 - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada para Kabagren Polres/Ta ajaran Polda Lampung dan Tim Efektif untuk dapat hadir dalam rangka rapat dan pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. 2023 yang akan diselenggarakan pada :
- Hari / tanggal : Selasa / 15 November 2023;
 - Pukul : 09.00 Wib
 - Tempat : Aula GWS Presisi Polda Lampung
 - Pakaian : Yang berlaku hari itu
3. Demikian untuk menjadi maklum.

PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA RAPAT DAN PEMBUATAN
FAKTA INTEGRITAS DAN NPHD HIBAH APBDP DARI PROVINSI LAMPUNG T.A. 2023
HARI / TANGGAL : SELASA / 15 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Id. Amie	Konpol	KABAGREN POLRESTA	
2	Amirul	Konpol	KABAGREN POLRES LAMSEL	
3	LAMPUNG T.S.	Konpol	KABAGREN POLRES METRO	
4	MARDIANTO	APP	KABAGREN POLRES LAMUT	
5	MURDI HARJONO, S.E.	Konpol	KABAGREN POLRES LAMBAR	
6	M. Anwar	Konpol	KABAGREN POLRES TUBA	
7	TAFIA RIYUDDO	APP	KABAGREN POLRES TANGGAMUS	
8	HUSNI WAHA	Konpol	KABAGREN POLRES LAMTIM	
9	LIU WELANDI, S.H.	APP	KABAGREN POLRES WAYKANAN	
10	DANAR HARJO DANA	Konpol	KABAGREN POLRES LAMTENG	
11	AGUNG PUNJI, S.H.	Konpol	KABAGREN POLRES MESUII	
12	WATA-DONO	Konpol	KABAGREN POLRES PESAWARAN	
13	HERU, S	Konpol	KABAGREN POLRES TUBABA	
14	PENDEK, P. SE	Konpol	KABAGREN POLRES PRINGSEWU	
15	JULIANI, S.H., N.H.	Konpol	KABAGREN POLRES PESIBAR	
16	RISEP WATIHA DEBANDI, S.P., S.S.I	APP	KA TIM EFEKTIF / POKJA I	
17	DEBARI POMPIUS PUTRA, S.E., N.S.I	PENYACA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
18	ERUWANTO, S.S.S., M.N.	PENYACA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
19	PRILAKSANA HUBANISMA, S.P.I	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
20	PUNTI JULIANI, S.H.	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
21	TITRIMA FAUDI APPRI, S.S., M.N.	PENYACA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	

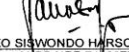
22. KA. TIM.

NOTULEN RAPAT DAN PEMBUATAN
FAKTA INTEGRITAS DAN NPHD HIBAH APBDP DARI PROVINSI LAMPUNG T.A. 2023
DENGAN STEAK HOLDER INTERN DAN TIM EFEKTIF
HARI / TANGGAL : SELASA / 15 NOVEMBER 2023

- I. Dasar
- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/II/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
 - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
- II. Pelaksanaan
- Pelaksanaan rapat dan pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. 2023 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 tempat Aula GWS Presisi Polda Lampung, pukul 09.00 Wib s.d selesai;
 - Rapat dan pembuatan fakta integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Provinsi Lampung T.A. 2023 berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa peserta rapat (para Kabagren Polres/Ta jajaran Polda Lampung) melaksanakan penandatanganan fakta integritas serta memahami tentang NPHD Hibah APBDP Provinsi Lampung yang akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kedepannya.
- III. Peserta
- Kabagren Polres Jajaran 15 Orang;
 - Tim Efektif 11 Orang;
- IV. Penutup.

Lampung Selatan, 15 November 2023

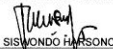
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

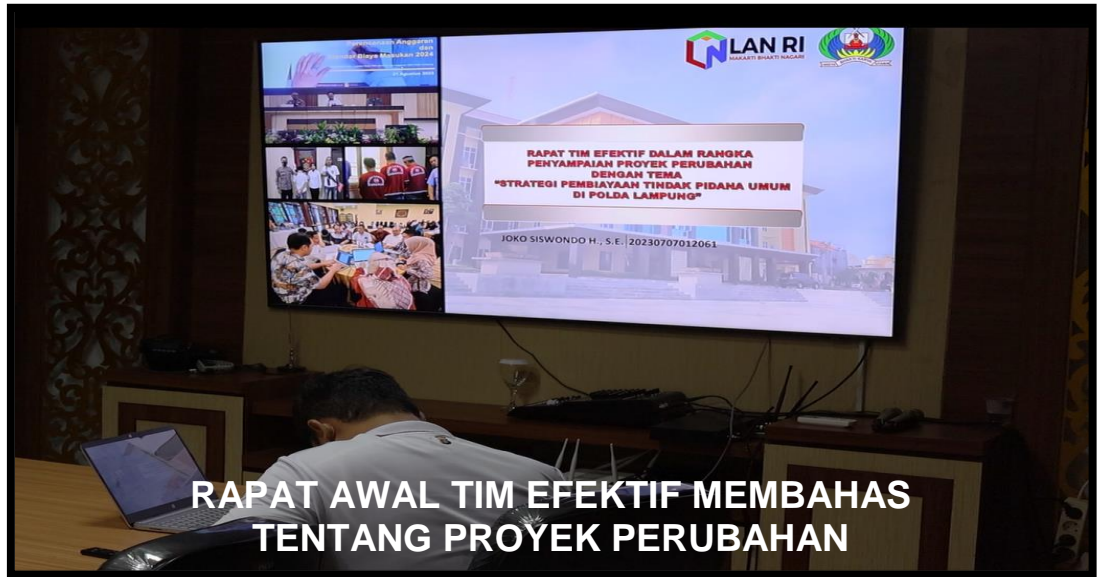

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA RAPAT DAN PEMBUATAN
FAKTA INTEGRITAS DAN NPHD HIBAH APBDP DARI PROVINSI LAMPUNG T.A. 2023
HARI / TANGGAL : SELASA / 15 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
22	ENDAH DWIGATI, S.E.	APP	KA TIM EFEKTIF / POKJA II	
23	SULIAN ASWADI, S.SOS	PENYACA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
24	NOVIANITA SUPANDI, S.P.R.	APP	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
25	AGIANGYAN	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
26	IFA SANTIKA	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	

PESERTA PKN II ANGKATAN XXVII


JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776



3. Diskusi strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD



4. Membuat strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. Terusan Ryaecudu 1., Jati Agung, Lampung Selatan

Lampung Selatan, 14 September 2023

Nomor : B/ 96 /IX/REN.2.3./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Jukrah rencana pendistribusian anggaran dukungan operasional satker

Kepada
Yth. DISTRIBUSI A2, B DAN C
POLDA LAMPUNG
di
Tempat

1. Rujukan:

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perubahan;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-06001-0/2023 tanggal 30 November 2022 perihal pengesahan alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/590/I/REN.4.1./2023/Srena tanggal 20 Januari 2023 perihal direktif langkah-langkah pelaksanaan kinerja anggaran Polri T.A. 2023;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam DIPA dan RKA-K/L telah dialokasikan anggaran Dukungan Operasional Satker, adapun kegunaan dari anggaran Dukungan Operasional tersebut adalah :

- Dukungan Operasional Satker yang dapat digunakan untuk mendukung anggaran kegiatan yang belum terdukung anggaran dan untuk mendukung kegiatan yang telah terdukung anggaran namun masih mengalami kekurangan;

b. Dukungan.....

2 SURAT KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : B/ 96 /IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

- Dukungan Operasional Satker terdapat pada seluruh Satker di jajaran Polda Lampung yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang belum terdukung anggaran dan untuk mendukung kegiatan yang tidak terdukung anggaran namun masih mengalami kekurangan pada Satker masing-masing;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada alamat jukrah tentang penggunaan anggaran dukops, sebagai berikut :

- Dukungan Operasional baik dukungan operasional Polda maupun dukungan operasional Satker dapat digunakan untuk mendukung seluruh program Polri :

- Program Profesionalisme SDM Polri;
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- Program Modernisasi Almsatus dan Sarana Prasarana Polri;
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat;
- Program Dukungan Manajemen.

- Satker Jajaran Polda Lampung agar tidak mengusulkan anggaran kepada Kapolda Lampung sebelum memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dan sebelum anggaran Satkernya mengalami kekurangan atau habis;

- Satwil agar mengalokasikan angrgan Dukungan Operasional Satker untuk kegiatan-kegiatan yang belum di dukung anggaran antara lain :

- Kegiatan Kerjasama Keamanan, Keterlibatan Kementerian dan Lembaga;
- Kegiatan SDM seperti pembinaan jasmani, pembinaan rohani dan pembinaan beladiri Polri;
- Kegiatan Logistik seperti pengecekan kendaraan dinas, HT dan Senpi;
- Dan kegiatan lainnya yang belum terdukung anggaran.

- Satwil dapat mengalokasikan anggaran Dukungan Operasional untuk tambahan anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah di dukung anggaran namun masih mengalami kekurangan setelah mengalokasikan anggaran Dukungan Operasional untuk kegiatan yang belum di dukung anggaran antara lain :

- Tambahan kegiatan operasi kewilayahan;
- Tambahan kegiatan Patroli Sabhara;
- Tambahan kegiatan Penggalangan;
- Tambahan kegiatan Lainnya yang mengalami kekurangan.

- Dukungan Operasional Polda dan Dukungan Operasional Satker tidak di perbolehkan untuk mendukung anggaran kegiatan pembangunan fasilitas maupun pengadaan materiil (belanja modal).

Sesuai dengan realisasi anggaran Polda Lampung dan jajaran, pada program lidik sidik baik lidik sidik tindak pidana umum maupun lidik sidik tindak pidana narkoba setiap tahun mengalami kekurangan anggaran yang sangat signifikan, dan telah diusulkan untuk penambahan anggaran tersebut ke Mabes Polri namun sampai saat ini belum ada realisasi, sehingga harus menambah strategi pendistribusian anggaran dukops Polda dan daukops Satker untuk memenuhi kekurangan tersebut.

5. Untuk

3 SURAT KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : B/ 96 /IX/REN.2.3./2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

- Untuk penyusunan alokasi anggaran di tahun 2024 khususnya anggaran Dukungan Operasional Satker agar sebagian besar digunakan untuk **Program lidik sidik tindak pidana umum dan tindak pidana narkoba**.
- Demikian untuk menjadi maklum.


a. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KARDORONA
KEPALA
BUDI MEIDANTO S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Kepada
Yth. DISTRIBUSI A2, B DAN C
POLDA LAMPUNG
di
Tempat

1. Rujukan:

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dengan APBD;
 - Surat Kapuskeu Polri Nomor : B/1629/XU/2017 Puskeu tanggal 28 November 2017 perihal Hibah Langsung;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023;
 - Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/423/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2022;
 - Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/431/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2023;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2021;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2022;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Polda Lampung T.A. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Polda Lampung pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mendapatkan alokasi anggaran hibah baik dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran adapun besarnya sebagai berikut :

a. Hibah

- Hibah Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lampung total sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk Belanja Modal sejumlah Rp. 137.758.207.695,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) 65,9% Belanja Barang sejumlah Rp. 71.386.327.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) 34,1% dengan rincian:
 - Tahun 2021 sejumlah Rp. 94.161.775.481,- (sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 64.222.608.481,- (enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) 68%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 29.939.167.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) 31,8%;
 - Tahun 2022 sejumlah Rp. 65.015.140.090,- (enam puluh lima miliar lima belas juta seratus empat puluh ribu sembilan puluh rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 39.077.934.090,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) 60,1%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 25.937.206.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) 39,9%;
 - Tahun 2023 sejumlah Rp. 49.967.619.124,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah):
 - Belanja Modal sejumlah Rp. 34.457.665.124,- (tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) 69,0%;
 - Belanja Barang sejumlah Rp. 15.509.954.000,- (lima belas miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) 31,0%;
- Anggaran hibah dari Provinsi Lampung maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota akan dimasukkan dalam DIPA melalui revisi ke dalam Program Polri antara lain :
 - Program Profesionalisme SDM Polri;
 - Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sejumlah Rp. 713.863.270,- (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) 1%;
 - Program Modernisasi Alimatsud dan Sarana Prasarana Polri sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) 65,9%;

d. Program

- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejumlah Rp. 70.672.463.730,- (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) 33,1%;
 - Program Dukungan Manajemen.
4. Dapat disimpulkan bahwa dari total anggaran hibah yang diterima oleh Polda Lampung baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 209.144.534.695,- (dua ratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) digunakan untuk Belanja Modal sebesar 65,9% Belanja Barang sebesar 34,1% yang seharusnya anggaran hibah digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka harkamtibmas dan dapat juga untuk penambahan anggaran lidik sidik.
5. Sedangkan sesuai realisasi anggaran Polda Lampung dan jajaran, pada program lidik sidik baik lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba setiap tahun mengalami kekurangan anggaran yang sangat signifikan, sehingga untuk mendukung kekurangan anggaran tersebut harus mengoptimalkan anggaran hibah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota jajaran Provinsi Lampung.
6. Berkaitan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada Alamat, jukrah tentang penggunaan anggaran hibah sebagai berikut :
- Pengajuan anggaran hibah ke Pemerintah Provinsi Lampung ataupun Pemerintah Kota/ Kabupaten agar sebagian besar digunakan untuk Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dan untuk tambahan Program kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba.
 - Anggaran hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota/ Kabupaten agar sebagian besar digunakan untuk Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan untuk tambahan Program kegiatan lidik sidik baik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba.
7. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KARORENA
Y. BUDI MUDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661



PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN



PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN



PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN

MILESTONE 3

C. Pelaksanaan (*Actuating*)

1. Pelaksanaan rapat ke-2 antara *actionleader*, tim Efektif dan persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTA – DINAS
Nomor : B/ND- /X/DIK.2.5/2023/Rorena

Kepada : Yth. *actionleader* dan tim efektif
Dari : Peserta PKN II Angkatan XXVIII
Hal : Undangan rapat ke-2


1. Rujukan:

- a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
- c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal pelaksanaan kegiatan supervisi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pemetaan anggaran TA. 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di mohon kepada tersebut alamat berkenan untuk menghadiri rapat ke-2 penyusunan proyek perubahan (persiapan penyusunan anggaran tindak pidana umum T.A. 2024) yang akan dilaksanakan pada :

- a. Hari / tanggal : Seni / 2 Oktober 2023;
- b. Pukul : 08.30 Wb s/d selesai;
- c. Tempat : Ruang rapat Gedung A lantai 3 Polda Lampung;
- d. Pakaian : Yang berlaku hari itu.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Selatan, 2. Oktober 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024

I. Dasar

- a. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- b. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Polri T.A. 2023;
- c. Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.


II. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan rapat dengan tim efektif dalam rangka penyusunan proyek perubahan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wb s.d selesai;
- b. Rapat berjalan dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa tim efektif meyetujui dan akan mendukung proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

IV. Peserta

- a. Karorena Polda Lampung selaku Mentor;
- b. Ketua pelaksana proyek perubahan (peserta PKN II Angkatan XXVIII);
- c. Ketua tim efektif / ketua tim pokja I dan II proyek perubahan;
- d. Anggota tim efektif / pokja I dan II proyek perubahan.

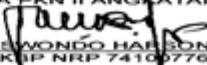
IV. Penutup

Lampung Selatan, 2 Oktober 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
HARI / TANGGAL : SENIN / 2 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES	KARORENA	
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAGRENPROGAR RORENA	
3	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAGSTRAJEMEN RORENA	
4	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAGDALPROGAR RORENA	
5	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBBAGGAR RORENA	
6	DEWAN RONIYUS PUTRA, S.E., M.Si.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGDALPRO RORENA	
7	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA	PS. KASUBBAGRENMIN RORENA	
8	NOVANDRA SUPANDI, S.Pd.	AIPDA	PS. FAMIN 2 RENMIN RORENA	
9	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROGRAM	
10	ERI FRANTANA NURANSYAR, S. Psi.	BRIGPOL	BAMIN 2 SUBBAGANGGARAN	
11	DWIKI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGANGGARAN	
12	TITANIA FAUDI AFIFAH, A. Md., Kom.	PENGATUR	BANUM SUBBAGRENPROGAR	
13	IRA SANTIKA	BRIPDA	BAMIN 2 SUBBAGPROGRAM	

Lampung Selatan, 2. Oktober 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jl. Terusan Ryaudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan

Lampung Selatan, 6 November 2023

Nomor : B/170/XI/DIK.2.5./2021/Rorena
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Hal : Undangan rapat

Kepada
Yth. 1. KABAGREN POLRES
JAJARAN;
2. TIM EFEKTIF.

di
Tempat

1. Rujukan:
- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/1/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
 - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada para Kabagren Polres/Ta ajaran Polda Lampung dan Tim Efektif untuk dapat hadir dalam rangka rapat tentang strategi pembiayaan anggaran yang bersumber dari APBD yang akan diselenggarakan pada:
- Hari / tanggal : Senin / 6 November 2023;
 - Pukul : 09.00 Wb
 - Tempat : Ruang rapat Polda Lampung
 - Pakaian : Yang berlaku hari itu
3. Demikian untuk menjadi maklum.

PESERTA PKN II ANGGATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA RAPAT TENTANG
"STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD"
HARI / TANGGAL : SENIN / 6 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMANDA	Kaumud	KABAGREN POLRESTA	
2	ANANDA	Kaumud	KABAGREN POLRES LAMSEL	
3	ANGGUSIA	Kaumud	KABAGREN POLRES METRO	
4	MARDIAMO	AFP	KABAGREN POLRES LAMUT	
5	MUDI HARSONO, S.E	Kaumud	KABAGREN POLRES LAMBAR	
6	M. ANGGUS	Kaumud	KABAGREN POLRES TUBA	
7	FALSAWATO	AFP	KABAGREN POLRES TANGGAMUS	
8	HUSNI A.A	Kaumud	KABAGREN POLRES LAMTIM	
9	M. ANGGUS, S.H	AFP	KABAGREN POLRES WAYKANAN	
10	ROSET WADI ANGGUS	Pol. Pol	KABAGREN POLRES LAMTENG	
11	ANGGUS BANI, S.H	Kaumud	KABAGREN POLRES MESUJI	
12	ANGGUS ANGGUS	Kaumud	KABAGREN POLRES PESAWARAN	
13	HABIBU	Kaumud	KABAGREN POLRES TUBABA	
14	ANGGUS P, S.E	Kaumud	KABAGREN POLRES PRINGSEWU	
15	ANGGUS, S.H. M. H.	Kaumud	KABAGREN POLRES PESIBAR	
16	BASEP WAHIZU PERMANA, Ipin	AKBP	KA TIM EFEKTIF / POKJA I	
17	ANGGUS PERMANA, S.E. NUG	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
18	ANGGUS, S. Soc. B. N.	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
19	ANGGUS, S. Soc. S. H.	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
20	ANGGUS, S. H.	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
21	ANGGUS, S. H.	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	

22. KA. TIM.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTULEN RAPAT TENTANG
"STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD"
DENGAN STEAK HOLDER INTERN DAN TIM EFEKTIF
HARI / TANGGAL : SENIN / 6 NOVEMBER 2023

- Dasar
 - Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Peng/4/1/DIK.2.5./2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
 - Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII T.A. 2023;
- Pelaksanaan
 - Pelaksanaan rapat tentang "strategi pembiayaan anggaran yang bersumber dari APBD" dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wb s.d selesai;
 - Rapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa peserta rapat (para Kabagren Polres/Ta ajaran Polda Lampung) memahami tentang materi yang disampaikan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII T.A. 2024 tentang "strategi pembiayaan anggaran yang bersumber dari APBD" dan akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kedepannya.
- Peserta
 - Kabagren Polres Jajaran 15 Orang;
 - Tim Efektif 11 Orang;
- Penutup.

Lampung Selatan, 6 November 2023
PESERTA PKN II ANGGATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA RAPAT TENTANG
"STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD"
HARI / TANGGAL : SENIN / 6 NOVEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
22	ANGGUS PERMANA, S.E.	AKBP	KA TIM EFEKTIF / POKJA II	
23	ANGGUS ANGGUS, S. Soc	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
24	ANGGUS ANGGUS, S. Soc	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
25	ANGGUS ANGGUS, S. Soc	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
26	ANGGUS ANGGUS, S. Soc	Perman	ANGGOTA TIM EFEKTIF	

PESERTA PKN II ANGGATAN XXVII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN



RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

2. Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
Jl. Terusan Ryaucudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan

Lampung Selatan, 5 Oktober 2023

Nomor : B/156 IX/DIK.2.5./2021/Rorena
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan Sosialisasi Proyek Perubahan

Kepada
Yth. 1. KASUBBAGRENMIN
POLDA LAMPUNG,
2. KABAGREN POLRES
JAJARAN,
3. TIM EFEKTIF.

di
Tempat

1. Rujukan:

- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan,
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli T.A. 2023,
- Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di bahwa personil Birorena Polda Lampung a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E. Kabagrenprog saat ini sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun 2023, dan sedang menyusun Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum di Provinsi Lampung".

3. Terkait point 2 di atas, di mohon kepada alamat berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi proyek perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun 2023, giat di maksud sebagai bukti (eviden) dalam penyusunan Proyek Perubahan.

4. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada :

- Hari / tanggal : Kamis / 5 Oktober 2023,
- Pukul : 09.00 Wib
- Tempat : Ruang rapat Polda Lampung
- Pakaian : Yang berlaku hari itu

5. Demikian.....

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

NOTULEN SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN " STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG" DENGAN STEAK HOLDER DAN TIM EFEKTIF PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2024

I. Dasar

- Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli T.A. 2023;
- Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1790/IX/HUK.6.6/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Tim Efektif penyusunan Proyek Perubahan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 a.n. AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.

II. Pelaksanaan

- Pelaksanaan Sosialisasi proyek perubahan dengan judul " Strategi Pembiayaan Tindak Pidana umum di Polda Lampung" dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 tempat ruang rapat lantai 3 Polda Lampung, pukul 09.00 Wib s.d selesai;
- Sosialisasi berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kesimpulan bahwa peserta sosialisasi memahami tentang materi yang disampaikan oleh peserta PKN II Angkatan XXVIII T.A. 2024 dan akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas kedepannya.

III. Peserta

- Kasubbagrenmin Polda 4 orang;
- Kabagren Polres Jajaran 15 Orang;
- Ketua tim efektif / ketua tim pokja I dan II 2 Orang;
- Anggota tim efektif / pokja I dan II 7 Orang.

IV. Penutup

Lampung Selatan, 5 Oktober 2023
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII

JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN " STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG" HARI / TANGGAL : KAMIS / 5 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FRIBEL VITTY	KOMPOL	KASUBBAGRENMIN ROOPS	
2	RANI DEFFA S	PENYATA	KASUBBAGRENMIN ROLOG	
3	DANI	KOMPOL	KASUBBAGRENMIN DITLANTAS	
4	PAULUS DI	AKP	PS. KASUBBAGRENMIN DITRESKRIBUM	
5	W. Anolis	KOMPOL	KABAGREN POLRESTA	
6	Amriah	AKP	KABAGREN POLRES LAMBEL	
7	KANGSAL S.S.	KOMPOL	KABAGREN POLRES METRO	
8	MARDIAMATO	AKP	KABAGREN POLRES LAMUT	
9	MUSI ANWARUD, S.E.	KOMPOL	KABAGREN POLRES LAMBAR	
10	M. Jined	KOMPOL	KABAGREN POLRES TUBA *	
11	FAKAR S.S.D	AKP	KABAGREN POLRES TANGKAMBUS	
12	HUSAIL A.A	KOMPOL	KABAGREN POLRES LAMTIM	
13	U-CA KESAWAN	AKP	KABAGREN POLRES WAYKANAN	
14	DANAR MAD JARA	KOMPOL	KABAGREN POLRES LAMTENG	
15	Amel Fadi ah	KOMPOL	KABAGREN POLRES MESUJ	
16	Widayata	KOMPOL	KABAGREN POLRES PESAWARAN	
17	HUM S	KOMPOL	KABAGREN POLRES TUBARA	
18	Kennedy, P. S.E	KOMPOL	KABAGREN POLRES PRINGSEWU	
19	JAELANI, Set. 2023	KOMPOL	KABAGREN POLRES PESBAR	
20	DASEP PERMAN, S.P-CH	AKBP	RA TIM EFEKTIF I	
21	DEWANTO, S.Sos. N-IV.	PENYATA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
22	EDWANTO, S.Sos. N-IV.	PENYATA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
23	WANI ROSIFAGARI	IPTU	KABAGREN DITIMBUKAM	
24				
25				

DAFTAR HADIR DALAM RANGKA SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN " STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG" HARI / TANGGAL : KAMIS / 5 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
21	BREP WATZU PERWADI, S.P-CH	AKBP	KA TIM EFEKTIF / POKJA I	
22	DEWAN PRATIWI PURA, S.E, N-IV.	PENYATA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
23	EFWANTO, S.Sos. N-IV.	PENYATA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
24	EPI PRAMANA MURANSIAE, S. PSI.	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
25	DWIGI JULIANDO, S. H.	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
26	TITANIA FAUDI APTARI, A.Md, Km	PENGATUR	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
27	EMDAH DUBUSATI, S.E	AKBP	KA TIM EFEKTIF / POKJA II	
28	JULIAN ANWAR DI, S.Sos.	PENYATA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
29	NOVANDRA SUPANDI, S. Pd.	AKBP	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
30	ABIAN SATH	BRIGPOL	ANGGOTA TIM EFEKTIF	
31	IRA SAMIFA	BRIPDA	ANGGOTA TIM EFEKTIF	

Lampung Selatan, 5 Oktober 2023
a.n. KARORENA POLDA LAMPUNG
KABAGRENPROGAR
Selaku
PESERTA PKN II ANGKATAN XXVIII
JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
AKBP NRP 74100776



SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER



SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER



SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER



**SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV
DAN PEMKAB/KOTA**



**SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV
DAN PEMKAB/KOTA**



**SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV
DAN PEMKAB/KOTA**

MILESTONE 4

1. Penyusunan anggaran untuk penanganan tindak pidana umum sesuai Jukrah.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR
 Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, 5 Oktober 2023

6 SURAT KAPOLRI
 NOMOR : B/814/REN.2.3/2023/SRENA
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2023

Nomor : B/814/REN.2.3/2023/Srena
 Klasifikasi: BIASA
 Lampiran : (satu berkas)
 Hal : Alokasi Anggaran Poldasatker T.A. 2024.

Kepada
 Yth. 1. PARA KASATKER TINGKAT
 MABES POLRI
 2. PARA KAPOLDA
 di
 Tempat

- Rujukan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
 - Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/901/VIII/HUK.7.1/2023/Srena tanggal 31 Agustus 2023 perihal Petunjuk dan Arahan (JUKRAH).
- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-773/MK.02/2023 disampaikan bahwa Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024 telah ditetapkan sebesar Rp117.406.834.092.000,- (seratus tujuh belas triliun empat ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan komposisi belanja pegawai sebesar Rp58.277.148.233.000,- (lima puluh delapan triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), belanja barang Rp32.223.232.836.000,- (tiga puluh dua triliun dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan belanja modal Rp26.906.453.023.000,- (dua puluh enam triliun sembilan ratus enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rancangan RKA Satker T.A. 2024 bersama ini disampaikan kepada Kasatker/Kapolda, agar alokasi anggaran T.A. 2024 Satker tingkat Mabes Polri dan Poldas disesuaikan dengan arah kebijakan dan sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

Pedoman

- Dengan adanya sinkronisasi aplikasi KRISNA dan SAKTI, dimohon kepada Kasatker/Kapolda untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - mulai mengisi Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - memperhatikan kesesuaian penggunaan KRO, RO, komponen, sub komponen dan volume kegiatan;
 - menambahkan keterangan pada detail kegiatan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penarikan dana dan kesalahan persepsi dalam pengawasan anggaran.
- Penyampaian data pendukung melalui alamat Posel bagengarta.rojemengarta@polri.go.id dan approval KPA baik Satker tingkat Mabes Polri maupun Poldas dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2023 mengingat batas waktu pelaksanaan penelaahan RKA-KL oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah 20 Oktober 2023.
- Rencana pelaksanaan kegiatan penelitian dan reviu rancangan RKA Satker T.A. 2024 dan kelengkapan data pendukung dijadwalkan mulai tanggal 9 Oktober 2023.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 SRENA



WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:
 1. Kapolri.
 2. Wakapolri.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH LAMPUNG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH LAMPUNG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLDA LAMPUNG
 NOMOR : SPRIN/193/REN.2.3/2023
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2023



SURAT PERINTAH
 Nomor : Sprin/193/REN.2.3/2023

- Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Lampung khususnya dalam melaksanakan Penyusunan RKA-KL dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: Sprin/539/REN.2.3/2023/Srena tanggal 22 September 2023 tentang Tim Kepanitiaan dalam rangka Penyusunan RKA-KKL Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 - Surat Perintah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: Sprin/539/REN.2.3/2023/Srena tanggal 22 September 2023 tentang Tim Kepanitiaan dalam rangka Penyusunan RKA-KKL Pagu Alokasi Anggaran Polri Tahun Anggaran 2024;
 - surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/154/REN.2.3/2023/Srena tanggal 02 Oktober 2023 tentang pelaksanaan Penyusunan RKA-KL, Penelitian dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP/NIP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
- di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk untuk melaksanakan Penyusunan RKA-KL dan Reviu Alokasi Anggaran Polri T.A. 2024 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 05 s.d 15 Oktober 2023 di Hotel Discovery Ancol, Taman Impian Jaya, Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
 - melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Lampung;
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
 pada tanggal : 4 Oktober 2023
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

HELMY SANTIKA, S.H., S.N.K., M.Si.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :
 1. Irwasda Poldas Lampung.
 2. Kabidpropam Poldas Lampung.

PERSONEL RORENA YANG MENGHADIRI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKA-KL, PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN POLRI T.A. 2024

NO	NAMA / PANGKAT / NRP	PANGKAT	NRP / NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	66050661	KARORENA POLDA LAMPUNG
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S. E.	AKBP	74100776	KABAGRENPROGAR RORENA
3	NOVANDRA SUPANDI, S. Pd.	AIPDA	83111378	PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN RORENA
4	ABIANSYAH	BRIGPOL	93040033	BAMIN 1 SUBBAGPROG BAGRENPROGAR
5	ERY FRANTANA NURANSYAR, S. Psi.	BRIGPOL	94030543	BAMIN 2 SUBBAGGAR BAGRENPROGAR
6	DWIKI JULIANDO, S.H.	BRIGPOL	94070631	BAMIN 2 SUBBAGGAR BAGRENPROGAR

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
 pada tanggal : 4 Oktober 2023
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

HELMY SANTIKA, S.H., S.N.K., M.Si.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI



2. Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kementerian Negara / Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon II/ Satker : POLRES LAMPUNG TENGAH
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 Sasaran Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Klasifikasi Rincian Output : Dukungan Manajemen Internal
 Indikator KRO : Layanan Umum
 Volume : 12
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dukung Polres dan Polsek : Rp. 2.577.200.000,-

KODE	URAIAN SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUM / DETIL	VOLUME SUB OUTPUT	JNS KOMPEN (UTM / PENDEK)	RINCIAN PERHITUNGAN		HARGA SATUAN	JUMLAH
				5	6		
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Layanan				2.577.200.000
3128.FRA.PK	Layanan Umum	12	Layanan				2.577.200.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan Keamanan		PENDUKUNG	1 Tahun			2.577.200.000
PT	DUKUNGAN OPERASIONAL POLRES						2.577.200.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja						234.000.000
	- Honor KPA	12		1 Org x 12 Bulan	12	4.250.000	51.000.000
	- Honor PPSM	12		1 Org x 12 Bulan	12	2.040.000	24.480.000
	- Honor PPK	12		1 Org x 12 Bulan	12	2.520.000	30.240.000
	- Honor Operator Bendahara Pengeluaran	12		1 Org x 12 Bulan	12	1.750.000	21.000.000
	- Honor Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran	72		8 Org x 12 Bulan	72	1.330.000	95.760.000
	- Honor Pejabat Pengadaan (PPSL)	12		1 Org x 12 Bulan	12	680.000	8.160.000
	- Honor Operator Simak	12		1 Org x 12 Bulan	12	300.000	3.600.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya						566.395.000
	>> Pengiriman Unjuk Rasa						88.400.000
	- Uang Saku	1.800		450 Org x 4 Giat	1.800	16.000	28.800.000
	- Uang Makan	1.800		450 Org x 4 Giat	1.800	33.000	59.400.000
	- Kertas F4	8		2 Rim x 4 Giat	8	60.000	480.000
	- Photocopy	200		50 Lembar x 4 Giat	200	300	60.000
	- Tinta	4		1 Botol x 4 Giat	4	60.000	240.000
	- Jaid	28		7 Buah x 4 Giat	28	15.000	420.000
	>> Pelatihan Dalmas						5.040.000
	- Uang Makan	80		30 org x 2 giat	80	20.000	1.600.000
	- Ekstra Puding	80		30 org x 2 giat	80	14.000	1.120.000
	- Uang Saku	80		30 org x 2 giat	80	20.000	1.600.000
	- Honor Pelatih	12		3 org x 2 Jp x 12 giat	12	75.000	900.000
	>> Tambahan Ldk. Sidik Pidana Umum	10		10 kas x 1 th	10	21.164.000	211.840.000
	a. Kegiatan Penyelidikan						8.520.000
	- Administrasi Penyelidikan						700.000
	- Pengalihan TDP						300.000
	- Pengawasan (observasi)						300.000
	- Wawancara (Interview)						300.000
	- Pembantuan (mutualvance)						300.000
	- Penyamaran (Under Cover)						650.000
	- Pelacakan (tracking)						300.000
	- Penelitian dan analisis dokumen						679.000
	- Pemrosesan dan penindakan						397.000
	b. Kegiatan Penindakan / Penangkapan						12.258.000
	- Administrasi Penindakan						890.000
	- Upaya Paksa						750.000
	- Pemeriksaan						2.368.000
	- Gula Perkar						2.550.000
	- Penyehatan Berkas Perkar						450.000
	- Press release						5.250.000
	- Honor Pelatih	96		4 org x 2 Jp x 12 giat	96	75.000	7.200.000

1	2	3	4	5	6	7	
12. Polsek Timogo						64.320.000	
a. Tambahan Turnak		732		2 Org x 36 Hr	732	54.000	
b. Pam Giat Masyarakat		48		4 Org x 12 Giat	48	49.000	
c. Tambahan Giat Ldk/Sidik sedang		2		2 Kas	2	7.720.000	
d. Pembayaran Wfl Kantor		12		12 Bulan	12	500.000	
e. Tambahan Dukam Kantor		1		1 Giat	1	1.000.000	
13. Polsek Pungur						64.320.000	
a. Tambahan Turnak		732		2 Org x 36 Hr	732	54.000	
b. Pam Giat Masyarakat		48		4 Org x 12 Giat	48	49.000	
c. Tambahan Giat Ldk/Sidik sedang		2		2 Kas	2	7.720.000	
d. Pembayaran Wfl Kantor		12		12 Bulan	12	500.000	
e. Tambahan Dukam Kantor		1		1 Giat	1	1.000.000	
> Dukoprol Polsek Bumi Batu Nuban						200.000.000	
- Berjar Informas Unit Intakam				2 Org x 24 Giat	48	500.000	
- Pembentukan Intajin				2 Org x 24 Giat	48	500.000	
- Pembinaan Intajin				2 Org x 24 Giat	48	135.000	
- Menyalenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas				2 Org x 24 Giat	72	52.000	
- Sarana Kontak				2 Giat x 12 Bulan	24	1.000.000	
- Turjawal				2 Org x 366	732	54.000	
- Pam Giat Masyarakat				2 Org x 2 Giat x 12	48	49.000	
- Pembayaran Internet Kantor				12 Bulan	12	500.000	
- Tambahan Ldk. Sidik Perkaru Sedang				9 Kasus	9	7.720.000	
- Tambahan Dukam Kantor				1 tahun	1	416.000	
> Dukoprol Polsek Anak Rabu Aji						200.000.000	
- Berjar Informas Unit Intakam				2 Org x 24 Giat	48	500.000	
- Pembentukan Intajin				2 Org x 24 Giat	48	500.000	
- Pembinaan Intajin				2 Org x 24 Giat	48	135.000	
- Menyalenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas				3 Giat x 24 Giat	72	52.000	
- Sarana Kontak				2 Giat x 12 Bulan	24	1.000.000	
- Turjawal				2 Org x 366	732	54.000	
- Pam Giat Masyarakat				2 Org x 2 Giat x 12	48	49.000	
- Pembayaran Internet Kantor				12 Bulan	12	500.000	
- Tambahan Ldk. Sidik Perkaru Sedang				9 Kasus	9	7.720.000	
- Tambahan Dukam Kantor				1 tahun	1	416.000	
> Dukoprol Polsubsektor Kota Gejeh						50.000.000	
- PGD				10 Org x 12 Giat	120	45.000	
- Pam Giat Masyarakat				8 Org x 12 Giat	96	45.000	
- Turjawal (1 ORG x 366 GIAT)				2 Org x 365	730	54.000	
- ATK				1 tahun	1	860.000	
TOTAL BIAYA KELUARAN							2.577.200.000

PENANGGUNG JAWAB
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH

 M. PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77111028



**PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN
 PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM**



**PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM**



**PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM**

3. Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMENLEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (352642) POLRES TULANG BAWANG BARAT
ALOKASI Rp. 46,232,769,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMPY DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KW	PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES)			4,584,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			4,584,000	RM
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Giat Inteljen (Lap Info Sasaran C3)	12.0 BRKS	382,000	4,584,000	
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			18,097,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,665,000	PNP
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	> PEMBINAAN INTELIJEN POLRES			1,665,000	
	- Giat Inteljen (1 Org x 9 Giat)	9.0 OG	185,000	1,665,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			14,402,000	RM
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Binar (sasaran tomas federalis megow pak) [1 Org x 1 Fom]	1.0 OG	8,201,000	8,201,000	
	- Binar (sasaran pegawai lepas) [1 Org x 1 Fom]	1.0 OG	8,201,000	8,201,000	
LF	PENGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERFORMAN (POLRES)			73,972,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			73,972,000	RM
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Pengalangan Perorangan Sasaran Ketua Popes [1 Org x 2 Giat]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
	- Pengalangan Perorangan Sasaran Ketua Ormas Islam [1 Org x 2 Giat]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
LI	PENGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES)			36,986,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			36,986,000	RM
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Pengalangan Inteljen Kelompok Sasaran Walet Shuang Club [2 Org x 1 Giat]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
VC	KEGIATAN 2 PRIORITAS POLRI			14,769,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			14,769,000	RM
	KPPN.116-Kota Bumi)				
	> PENANGGULANGAN TERORISME/RADIKALISME DAN INTOLERANSI			14,769,000	
	- Lida (Sasaran simpangan ISIS, Eks HTL Eks Napster) [1 Org x 6 H x 3 Giat]	18.0 OG	500,000	9,000,000	
	- Gal Individu (sasaran simpangan ISIS, Eks HTL Eks Napster)	1.0 Giat	5,769,000	5,769,000	
3128	Dukungan Manajemen dan Taktis Penertahanan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat			2,238,280,000	
3128.FBA	Layanan Dukungan Manajemen Intima(Base Line)	12.0 Layanan, Laporan, Dukumen, Rekomendasi, Unit		2,238,280,000	
3128.EBA.902	Layanan Umum	12.0 Layanan		2,238,280,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			18,800,000	
B	HONOR PNP			18,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024
KEMENLEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (070106) POLRES PESISIR BARAT
ALOKASI Rp. 25,589,879,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMPY DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			32,403,000	RM
	(KPPN.145-Lima)				
	> POLRES PESISIR BARAT			32,403,000	
	- Pengalangan Terhadap	1.0 Giat	16,201,500	16,201,500	
	- Pengalangan terhadap ketua/ketubandua kegiatan masyarakat Budaya	1.0 Giat	16,201,500	16,201,500	
3117	Pengalangan Strategi Keamanan dan Keterlibatan Bidang Keamanan Negara			38,651,000	
3117.EKA	Pencapaian masyarakat dan kelompok masyarakat(Base Line)	30.0 Laporan		38,651,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR BARAT				
3117.BKA.001	Informasi Deteksi Awal Strategi Keamanan dan Keterlibatan Bidang Keamanan Negara	30.0 Laporan		38,651,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			1,665,000	U
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			1,665,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,665,000	PNP
	(KPPN.145-Lima)				
	> POLRES PESISIR BARAT			1,665,000	
	- Binar	9.0 BFD	185,000	1,665,000	
LF	PENGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERFORMAN (POLRES)			36,986,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			36,986,000	RM
	(KPPN.145-Lima)				
	> Giat Inteljen POLRES PESISIR BARAT			36,986,000	
	- Pengalangan terhadap eks pelaku kejahatan internasional	1.0 Giat	18,493,000	18,493,000	
	- Pengalangan terhadap eks ketua/anggota/angsurus organisasi radikal/terorisme	1.0 Giat	18,493,000	18,493,000	
	Dukungan Manajemen dan Taktis Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat			2,390,531,000	
3128	Layanan Dukungan Manajemen Intima(Base Line)	12.0 Layanan, Laporan, Dukumen, Rekomendasi, Unit		2,390,531,000	
3128.EBA.902	Layanan Umum	12.0 Layanan		2,390,531,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			2,390,531,000	U
B	HONOR PNP			24,600,000	



**PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM**



MILESTONE 5

1. Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ 1017 /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK
DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JURN TA 2023 YG AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG JAWAB TTK

DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU KETUA TIM TTK

TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO,H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA TIM TTK

EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK

LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA TTK

ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA TTK

TUJUH TTK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH
Nomor : Spn/186 /X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KEPADA : KARORENA

Tembusan :
1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : ST/ 1017 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK
DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA TTK
SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK
SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK
SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK
DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK
TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTİM TTK

DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT BHAYANGKARA TTK

TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT TTK

EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO TTK

LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES TUBA TTK

TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA TTK

DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES PRINGSEWU TTK

SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES TANGGAMUS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAPOLDA LAMPUNG
KARORENA
KEPALA
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 66050661

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
LAMPIRAN SPIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPN/186 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	2	3	4	5	
1.	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROG	KETUA TIM	
3.	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4.	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROG	ANGGOTA	
5.	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6.	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBAGRENMIN	ANGGOTA	
7.	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8.	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9.	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10.	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11.	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12.	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13.	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 17 Oktober 2023
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KEPADA : KARORENA
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661





2. Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ 1087 /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK
DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JURN TA 2023 YG AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG JAWAB TTK

DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU KETUA TIM TTK

TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO,H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA TIM TTK

EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK

LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA TTK

ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA TTK

TUJUH TTK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/188 /X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dijekuti dan di : Lampung Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2023

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Tembusan :
1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : ST/ 1087 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK
DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA TTK
SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK
SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK
SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK
DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK
TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT BHAYANGKARA TTK

TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT TTK

EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO TTK

LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES TUBA TTK

TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA TTK

DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES PRINGSEWU TTK

SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES TANGGAMU TTK

DDD TTK DUM TTK HBS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPIRAN SPRIN KARORENA POLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN / 188 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROGEM	KETUA TIM	
3	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROGEM	ANGGOTA	
5	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
7	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dijekuti dan di : Lampung Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2023
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
Plt. KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TENGAH
DENI PANJWIJAYA, S.IP.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TENGAH
Drs. SUGANDI, M.M.**

MILESTONE 6

1. Koordinasi ke Pemkab /Kota Jajaran Provinsi Lampung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA LAMPUNG DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KA RUMKIT BHAYANGKARA
2. DISTRIBUSI C POLDA LAMPUNG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA LAMPUNG
2. IRWASDA POLDA LAMPUNG
3. KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG

NOMOR: ST/ 1087 /X/REN.2.3/2023 TGL: 17 - 10 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

DUA TTK RENCANA KERJA RORENA POLDA LAMPUNG TA 2023 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DIINFOKAN KPD KA BHW BIRO RENA POLDA LAMPUNG AKAN MELAKS GIAT SUPERVISI TTG PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN POLDA LAMPUNG DAN JURN TA 2023 YG AKAN DILAKS PD TGL 18 S.D. 30 OKTOBER 2023 KMA DGN SUSUNAN TIM SBB TTK DUA

SATU TTK KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. KMA KARORENA POLDA LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG JAWAB TTK

DUA TTK AKBP DASEP WAHYU PERMADI, S.P.,S.H. SELAKU KETUA TIM TTK

TIGA TTK AKBP JOKO SISWONDO,H., S.E. SELAKU WAKIL KETUA TIM TTK

EMPAT TTK AKBP ENDAH PURWATI, S.E. SELAKU ANGGOTA TTK

LIMA TTK PEMBINA YULIAN ASWADI, S.Sos. SELAKU ANGGOTA TTK

ENAM TTK PENATA TK I ERWANTO, S.Sos., M.M. SELAKU ANGGOTA TTK

TUJUH TTK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/188 /X/REN.2.3/2023/Rorena

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Lampung khususnya dalam rangka Supervisi tentang pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
2. Rencana kerja Rorena Polda Lampung T.A. 2023;
3. Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor: ST/ X/REN.2.3/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang giat supervisi pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan giat supervisi tentang pelaksanaan dan realisasi anggaran Polda Lampung dan Jajaran T.A. 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 30 Oktober;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Karorena Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KARORENA

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

Tembusan :
1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Kabidpropam Polda Lampung.

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : ST/ 1087 /X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

TUJUH TTK AIPDA NOVANDRA, S.Pd. SELAKU ANGGOTA TTK
DLPN TTK AIPDA LIMEX SINGGIH WICAKSONO SELAKU ANGGOTA TTK

SMBLN TTK AIPDA ADY GUNAWAN SELAKU ANGGOTA TTK

SEPLH TTK BRIGPOL ABIANSYAH SELAKU ANGGOTA TTK

SEBLS TTK BRIPTU YOGA FERGIAN SELAKU ANGGOTA TTK

DUBLS TTK BRIPTU ELSA RAHMAWATI SELAKU ANGGOTA TTK

TGBLS TTK BRIPDA REANDRA DWIKA AUDIARA SELAKU DRIVER KARORENA TTK

CCC TTK JADWAL GIAT SUPERVISI PELAKS DAN REALISASI ANGGARAN SBB TTK DUA

SATU TTK HARI RABU TGL 18 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

DUA TTK HARI KAMIS TGL 19 OKTOBER 2023 KE RUMKIT BHAYANGKARA TTK

TIGA TTK HARI JUMAT TGL 20 OKTOBER 2023 KE RES LAMUT TTK

EMPAT TTK HARI SENIN TGL 23 OKTOBER 2023 KE RES METRO TTK

LIMA TTK HARI SELASA TGL 24 OKTOBER 2023 KE RES LAMTENG TTK

ENAM TTK HARI RABU TGL 25 OKTOBER 2023 KE POLRES TUBA TTK

TUJUH TTK HARI KAMIS TGL 26 OKTOBER 2023 KE RES TUBABA TTK

DLPN TTK HARI JUMAT TGL 27 OKTOBER 2023 KE RES PRINGSEWU TTK

SMBLN TTK HARI SENIN TGL 30 OKTOBER 2023 KE RES TANGGAMUS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAPOLDA LAMPUNG
KARORENA
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMBES POL NRP 66050661

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

LAMPUNG SELATAN
NOMOR : SPRIN / 188 / X/REN.2.3/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA TIM GIAT SUPERVISI RORENA POLDA LAMPUNG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	TIM	
1	Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KARORENA	PENANGGUNG JAWAB	
2	JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.	AKBP	KABAG RENPROGAM	KETUA TIM	
3	DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.	AKBP	KABAG STRAJEMEN	ANGGOTA	
4	ENDAH PURWATI, S.E.	AKBP	KABAG DALPROGAR	ANGGOTA	
5	YULIAN ASWADI, S.Sos.	PEMBINA	KASUBBAG ANGGARAN	ANGGOTA	
6	ERWANTO, S. Sos., M.M.	PENATA TK I	PS. KASUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
7	NOVANDRA, S.Pd.	AIPDA	PS. PAMIN 2 RENMIN	ANGGOTA	
8	LIMEX SINGGIH WICAKSONO	AIPDA	BAMIN 1 SUBBAGDALPRO	ANGGOTA	
9	ADY GUNAWAN	AIPDA	PS. PAMIN 3 RENMIN	ANGGOTA	
10	ABIANSYAH	BRIGPOL	BAMIN 1 SUBBAGPROG	ANGGOTA	
11	YOGA FERGIAN	BRIPTU	BAMIN 1 SISJEMEN	ANGGOTA	
12	ELSA RAHMAWATI	BRIPTU	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA	
13	REANDRA DWIKA AUDIARA	BRIPDA	BAMIN SUBBAGRENMIN	DRIVER KARORENA	

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2023
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
KARORENA
Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR
Dr. Drs. SUKISMANTO A.H., M.Si.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
STAF BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TIMUR
SYAHRUL SYAH, S.Pd.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA
Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA
Drs. MAT SOLEH, M.Pd.**



**KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BAPEDA KOTA METRO
Dr. ANANG TIAGIYANTO, SKM., M. Kes.**

MILESTONE 7

1. Rapat tentang strategi pembiayaan anggaran yang bersumber dari APBD



2. Pembuatan NHPD antara Pemrov Lampung dan Polda Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023



ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NHPD)
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 900/2247/VI.02/2023
Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marindo Kurniawan, ST., MM**
NIP : 198012062002121010
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Lampung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Wahyuni Mariati, SE**
Pangkat : Komisaris Besar Polisi/70060466
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Lampung
Nomor KTP : 3276056106700005
Alamat : GDC PUJI INSANI BLOK G-5 No. 9 CILODONG DEPOK JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Kuasa Kapolda Lampung Kepada Kabidkeu Polda Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- PIHAK PERTAMA** memberikan belanja hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)
- PIHAK KEDUA** menyatakan menerima belanja hibah dari **PIHAK PERTAMA** berupa uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar rupiah).
- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung. Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 2 Unit Kapolda dan Wakapolda Lampung (Ford Everest Titanium 4x4 AT)	Rp. 1.615.639.000

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pencairan Tahap I (pertama) :

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 2 Unit Kapolda dan Wakapolda Lampung (Ford Everest Titanium 4x4 AT)	Rp. 1.615.639.000
2	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 Itwasda Polda Lampung (Toyota Hiace Premio)	Rp. 575.236.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung I.	Rp. 1.160.907.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung II	Rp. 111.361.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung III	Rp. 195.000.000
6	Pengadaan Tutup Bak Belakang R4 Polda Lampung.	Rp. 22.260.000
7	ADM I	Rp. 13.343.000
Jumlah		Rp. 3.693.746.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Pencairan Tahap II (Kedua) :

NO	Uraian	Jumlah
1	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karoops	Rp. 180.000.000
2	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karorena	Rp. 189.746.000
3	Apel Enam Pilar	Rp. 408.352.000
4	Penanganan Konflik Pertanahan	Rp. 97.244.000

2	Pengadaan Kendaraan Operasional R4 Itwasda Polda Lampung (Toyota Hiace Premio)	Rp. 575.236.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung I.	Rp. 1.160.907.000
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung II	Rp. 111.361.000
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung III	Rp. 195.000.000
6	Pengadaan Tutup Bak Belakang R4 Polda Lampung.	Rp. 22.260.000
7	ADM I	Rp. 13.343.000
8	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karoops	Rp. 180.000.000
9	Renovasi Rumah Dinas Jabatan Karorena	Rp. 189.746.000
10	Apel Enam Pilar	Rp. 408.352.000
11	Penanganan Konflik Pertanahan	Rp. 97.244.000
12	Latihan Dalmas Kerangka	Rp. 29.708.000
13	Rikkes Berkala	Rp. 309.300.000
14	Rikkes PAG (Pendidikan Ahli Golongan)	Rp. 29.826.000
15	Rikes SBP (Sekolah Bintara Polist)	Rp. 61.824.000
16	ADMII	Rp. 254.000
17	Tambahan Lidik Sidik Umum	Rp. 800.000.000
18	Tambahan Lidik Sidik Narkoba	Rp. 1.460.046.000
19	Renov Gedung Polda Lampung	Rp. 339.954.000
20	Tambahan Giat Polairud	Rp. 200.000.000
21	Tambahan Giat Bidpropam	Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 8.000.000.000

Terbilang : Delapan Miliar Rupiah

5	Latihan Dalmas Kerangka	Rp. 29.708.000
6	Rikkes Berkala	Rp. 309.300.000
7	Rikkes PAG (Pendidikan Ahli Golongan)	Rp. 29.826.000
8	Rikes SBP (Sekolah Bintara Polisi)	Rp. 61.824.000
9	ADM II	Rp. 254.000
Jumlah		Rp. 1.306.254.000,-

Terbilang : Satu Miliar Tiga Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Pencairan Tahap III (Ketiga) :

NO	Uraian	Jumlah
1	Tambahan Lidik Sidik Umum	Rp. 800.000.000
2	Tambahan Lidik Sidik Narkoba	Rp. 1.460.046.000
3	Renov Gedung Polda Lampung	Rp. 339.954.000
4	Tambahan Giat Polairud	Rp. 200.000.000
5	Tambahan Giat Bidpropam	Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 3.000.000.000,-

Terbilang : Tiga Miliar Rupiah

- Pencairan Tahap I (Pertama), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
 - Foto copy Rekening Bank;
 - Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
- Pencairan Tahap II (Kedua)/ tahap selanjutnya, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I (Pertama)/ Tahap sebelumnya;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima Hibah.
- Pencairan Tahap III (Ketiga)/ tahap selanjutnya, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II (Dua)/ Tahap sebelumnya;
 - Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima Hibah.

4. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank Lampung atas nama Penerima Hibah selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 380. 00. 05. 0030. 2
5. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
6. PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.
2. Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan penggunaan dana kepada Perangkat Daerah Terkait;
4. Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Membantu proses pencairan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja.
4. Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

**Pasal 5
SANKSI**

Apabila Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6
LARANGAN**

Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepadayang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam NPHD ini, akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati oleh para PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan beban yang tidak ditentukan dari NPHD ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

WAHYUNI MARIATI, S.E.
KOMBESPOLNRP 70060466

KESATU,

MARINDO KURNIAWAN, ST., MM
NIP. 19801206 200212 1 010



MILESTONE 8

1. Rapat dan Pembuatan Pakta-Integritas dan NPHD Hibah APBDP dari Pemprov Lampung T.A 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung share outcome Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan satu data kinerja program lidik sidik, kami atas nama pengarah data, wali data, produsen data dan pengguna data, yang selanjutnya menjadi pengelola data kinerja program lidik sidik Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mewujudkan satu data kinerja program lidik sidik Polda Lampung, yang mudah diakses, mudah dibagikan dan disajikan secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan lupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. dengan kesadaran penuh berkomitmen menyatakan data kinerja ini secara berjenjang, dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola data kinerja, mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program lidik sidik pada tahun berjalan;
3. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan pada poin dua tersebut di atas, dengan selalu memperhatikan kepatuhan dan disiplin terhadap waktu dalam tata laksana pengelolaan satu data kinerja ini, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan satu data kinerja ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan data, sehingga kualitas data tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan satu data kinerja ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, November 2023
pembuat pernyataan,

<p>a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KABAGINOPSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrimum</p> <p style="text-align: center;"> JUMADI SEMBIRING, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030665</p>	<p>a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS PLH. KABAGINOPSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrimsus</p> <p style="text-align: center;"> HANDAK PRAKASA QALBI, S.T., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75030751</p>	<p>a.n. DIREKTUR RESERSE NARKOBA KABAGINOPSNAL Selaku Koord. produsen Data Kinerja Resnarkoba</p> <p style="text-align: center;"> RIZA PAMLEVI S, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050440</p>
<p>a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KABAGINOPSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Polairud</p> <p style="text-align: center;"> GUNAWAN, A.Md. KOMISARIS POLISI NRP 72010459</p>	<p style="text-align: center;">mengetahui, KABID TIK Selaku Wali Data Polda Lampung</p> <p style="text-align: center;"> M. ARIEF RIFA'I, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76050577</p>	<p>a.n. DIREKTUR LALU LINTAS KABAGINOPSNAL Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Polantas</p> <p style="text-align: center;"> FIRMAN SONTAMA, S. Sos AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091073</p>
<p>KARORENA POLDA LAMPUNG Selaku Sekretaris Pengarah Data Polda Lampung</p> <p style="text-align: center;"> Y. BUDI MEDIANDO, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661</p>	<p style="text-align: center;">mengetahui, KABID TIK Selaku Wali Data Polda Lampung</p> <p style="text-align: center;"> A. ROEMTAAT, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110447</p>	<p>KAROOPS POLDA LAMPUNG Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lidik Sidik Polda Lampung</p> <p style="text-align: center;"> A. ROEMTAAT, S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110447</p>

PAKTA INTEGRITAS POLDA LAMPUNG



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan satu data kinerja program lidik sidik, kami atas nama pengarah data, wali data, produsen data dan pengguna data, yang selanjutnya menjadi pengelola data kinerja program lidik sidik Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mewujudkan satu data kinerja program lidik sidik Polda Lampung, yang mudah diakses, mudah dibagikan dan disajikan secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. dengan kesadaran penuh berkomitmen menyatakan data kinerja ini secara berjenjang, dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola data kinerja; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasi, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program lidik sidik pada tahun berjalan;
3. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan pada poin dua tersebut di atas, dengan selalu memperhatikan kepatuhan dan disiplin terhadap waktu dalam tata laksana pengelolaan satu data kinerja ini, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. menghindari adanya perlawanan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan satu data kinerja ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan data, sehingga kualitas data tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulasi baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas pengelolaan satu data kinerja ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, November 2023

pembuat pernyataan,

KASI TIK POLRES METRO
Selaku Wali Data Polres Metro

ARIS SUKENDAR
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72010033

KABAGBINSNAL SATRESKRIM POLRES METRO
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrim

PRASATYO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72040206

KABAGREN POLRES METRO
Selaku Sekretaris Pengarah Data Polres Metro

LANGGENG TOTOSANTOSO, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67060745

KABAGBINSNAL SATRESNARKOBA POLRES METRO
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Resnarkoba

GUNARTO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72050332

KABAGBINSNAL SATLANTAS POLRES METRO
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lantas

WARDJO, S.Sc.
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72070332

KARORENA POLDA LAMPUNG
Selaku Sekretaris Pengarah Data Polda Lampung

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

mengetahui,
KABID TIK
Selaku Wali Data Polda Lampung

M. ARIEF RIFA'I, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76050577

KAROOPS POLDA LAMPUNG
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lidik Sidik Polda Lampung

A. ROEMTAAT, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110447

PAKTA INTEGRITAS POLRES METRO



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan satu data kinerja program lidik sidik, kami atas nama pengarah data, wali data, produsen data dan pengguna data, yang selanjutnya menjadi pengelola data kinerja program lidik sidik Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mewujudkan satu data kinerja program lidik sidik Polda Lampung, yang mudah diakses, mudah dibagipakai dan disajikan secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. dengan kesadaran penuh berkomitmen menyatukan data kinerja ini secara berjenjang, dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola data kinerja; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program lidik sidik pada tahun berjalan;
3. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan pada poin dua tersebut di atas, dengan selalu memperhatikan kepatuhan dan disiplin terhadap waktu dalam tata laksana pengelolaan satu data kinerja ini, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan satu data kinerja ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan data, sehingga kualitas data tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulasi baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan satu data kinerja ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, November 2023
pembuat pernyataan,

KABAGREN POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Sekretaris Pengarah Data Polres Lamtim

MUSNIWALI AKBAR, S.Pd., M.Pd
KOMISARIS POLISI NRP 67080379

KAURBINOPSNAL SATRESNARKOBA POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Resnarkoba

WELLY SANTANA
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73090127

KARORENA POLDA LAMPUNG
Selaku Sekretaris Pengarah Data Polda Lampung

Y. BUDI MEIDANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PS. KASI TIK POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Wali Data Polres Lamtim

BRITANIA
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 87060090

KASATPOLAIRUD POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Koord. produsen Data Kinerja Polairud

YUSMA WARDI, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77010141

mengetahui,
KABID TIK
Selaku Wali Data Polda Lampung

M. PRIF RIFA'I, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76050577

KAURBINOPSNAL SATRESKRIM POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Reskrim

SUARSO
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 74050653

KAURBINOPSNAL SATLAMTAS POLRES LAMPUNG TIMUR
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lantas

PANTAS SIREGAR
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 67020545

KAROOPS POLDA LAMPUNG
Selaku Koord. Produsen Data Kinerja Lidik Sidik Polda Lampung

A. ROEMTAAT, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110447

PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG TIMUR

LAMPIRAN DATA DUKUNG: PAKTA INTEGRITAS POLRES JAJARAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG	
 PAKTA INTEGRITAS	
Dalam rangka mendukung <i>share outcome</i> Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, <i>check and recheck</i> dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.	
Lampung Selatan, 15 November 2023	mengetahui
pembuat pernyataan, d.r. KAPOLRESTA BANDAR LAMPUNG KABAGREN	
 Hi. AMALIA SAPUTRI, S.H. KOMISARIS POLISI NRP 68040125	 Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H. KOMISARIS REGAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG	
 PAKTA INTEGRITAS	
Dalam rangka mendukung <i>share outcome</i> Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, <i>check and recheck</i> dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.	
Lampung Selatan, 15 November 2023	mengetahui
pembuat pernyataan, POLRES LAMPUNG SELATAN KABAGREN	
 M. AMRIZAL, S.H. KOMISARIS POLISI NRP 66100451	 Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H. KOMISARIS REGAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG SELATAN



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keaman anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES METRO
KABAGREN
LANGGENG FOTO SANTOSO, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67060145

Lampung Selatan, 15 November 2023

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung
Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES METRO



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keaman anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES LAMPUNG UTARA
KABAGREN
MAR SANTO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68030463

Lampung Selatan, 15 November 2023

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung
Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG UTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES LAMPUNG BARAT
KABAGREN


mengetahui
KA RORENA, POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung

MUJI HARJONO, S.E.
KOMISARIS POLISI NRP 67090439

Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG BARAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES TULANG BAWANG BARAT
KABAGREN


mengetahui
KA RORENA, POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung

MUJI HARJONO, S.E.
KOMISARIS POLISI NRP 78110612

Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES TULANG BAWANG BARAT

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:


1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES TANGGAMUS
KABAGREN



TAKARINTO RUDI SUSILO
KOMISARIS POLISI NRP 65110410

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung


Y. BUDI MEJIYANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES TANGGAMUS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023

pembuat pernyataan,
KAPOLRES LAMPUNG TIMUR
KABAGREN


HUSEIN KURNIAWAN, S.Pd., M.Pd.
KOMISARIS POLISI NRP 68040125

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung


Y. BUDI MEJIYANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG TIMUR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 15 November 2023

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES MESUJI
KABAGREN


mengetahui
KARORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung


ABDUL RONI, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 65120765


Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES MESUJI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS


Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:


1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 14 November 2023

pembuat pernyataan,
KAPOLRES PESAWARAN
KABAGREN


mengetahui
KARORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung


M. HIDAYAT, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 74060757


Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES PESAWARAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.


Lampung Selatan, 14 November 2023

pembuat pernyataan,
POLRES TULANG BAWANG
MAGREN
Drs. H. ARSAD, M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66020418

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung
Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES TULANG BAWANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG


PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Lampung Selatan, 14 November 2023

pembuat pernyataan,
POLRES PRINGSEWU
MAGREN
KENNEDY PRATIDINA, S.E.
KOMISARIS POLISI NRP 75081269

mengetahui
KA RORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung
Y. BUDI MEDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES PRINGSEWU



PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung *share outcome* Polda Lampung terhadap hasil pembangunan nasional maupun pembangunan di provinsi Lampung melalui penyelenggaraan program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba, kami atas nama fungsi pembinaan anggaran tingkat Polda, yang selanjutnya menjadi pengelola anggaran kinerja program harkamtibmas dan lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan harkamtibmas di Provinsi Lampung yang aman dan kondusif dengan pengalokasian anggaran dukops satker Polres/ta Jajaran Polda Lampung digunakan untuk program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba Polda Lampung secara efektif untuk mendukung terhadap optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan strategis Polri;
2. mengalokasikan anggaran hibah yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk program Harkamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan program lidik sidik terutama kegiatan lidik sidik tindak pidana umum dan lidik sidik tindak pidana narkoba;
3. dengan kesadaran penuh berkomitmen mengarahkan dan memantau secara berjenjang dan secara konsisten berperan aktif dalam mengelola anggaran dukops satker Polres/ta jajaran Polda Lampung; mulai dari mengumpulkan, menghimpun, mengklasifikasikan, mendokumentasikan dan mengupload dalam aplikasi serta menyajikan data yang akurat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja program harkamtibmas dan program lidik sidik tindak pidana umum serta lidik sidik tindak pidana narkoba pada tahun berjalan;
4. menghindari adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengelolaan anggaran harkamtibmas dan lidik sidik ini, dengan selalu mengembangkan tindakan klarifikasi, *check and recheck* dan koordinasi yang efektif, guna menjaga orisinalitas dan keamanan anggaran, sehingga kualitas anggaran tetap terjaga dan terhindari dari tindakan manipulatif baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
5. menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran ini dengan selalu mengembangkan sikap objektif, jujur dan menjunjung tinggi integritas, dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

pembuat pernyataan,
a.n. KAPOLRES PESISIR BARAT
KABAGREN

JAELANI S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 66040055

Lampung Selatan, 15 November 2023
mengetahui

KA BORENA POLDA LAMPUNG
Selaku pembina anggaran Polda Lampung

NY BUDI MUBANDI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PAKTA INTEGRITAS POLRES PESISIR BARAT



PENANDA TANGGAPAN PAKTA INTEGRITAS



PENANDA TANGGAPAN PAKTA INTEGRITAS



PENANDA TANGGAPAN PAKTA INTEGRITAS

MILESTONE 9

D. Monitoring dan Evaluasi (*Controlling*)

1. Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan.



2. Monitoring dan evaluasi.

KODE	PROGRAM / GIAT / KRO / RO / KOMPONEN / SUBKOMP / DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD / CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	6
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			5.523.720.000	
3128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			5.523.720.000	
3128.EBA.962	Layanan Umum			5.523.720.000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			5.523.720.000	
FT	DUK OPSNAL POLRES			1.700.000.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			216.240.000	RM
	- Aplikasi Simak BMN (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300.000	3.600.000	
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN			212.640.000	
	- Honor KPA (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	4.770.000	57.240.000	
	- Honor PPK (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	4.630.000	55.560.000	
	- Honor PPSM (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	2.440.000	29.280.000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	2.120.000	25.440.000	
	- Staf Pengelola Keuangan (2 ORG x 12 BLN)	24,0 OB	1.560.000	37.920.000	
	- Operator Satker (2 ORG x 12 BLN)	24,0 OB	300.000	7.200.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1.483.760.000	RM
	> GIAT BAG OPS			543.470.000	
	- Pam Unjuk Rasa (120 ORG x 48 GIAT)	5760,0 OG	49.000	282.240.000	
	- Pam Giat Masyarakat (65 ORG x 82 GIAT)	5330,0 OG	49.000	261.170.000	
	> GIAT SIMK			24.000.000	
	- Rapat Meksu	12,0 BLN	2.000.000	24.000.000	
	> TAMBAHAN GIAT BAG REM			30.606.000	
	- Penyusunan Alokasi Anggaran	1,0 GIAT	18.306.000	18.306.000	
	- Pembinaan Anggaran dan Birokrasi Polda Lampung	1,0 GIAT	4.100.000	4.100.000	
	- Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik oleh Birokrasi Polda Lampung	1,0 GIAT	4.100.000	4.100.000	
	- Sosialisasi DIPA	1,0 GIAT	4.100.000	4.100.000	
	> GIAT TAHTI			18.000.000	
	- Giat Supervisi ke Polsek Jajaran (5 ORG x 2 GIAT x 12 BLN)	120,0 GIAT	150.000	18.000.000	
	> GIAT SIKEU			8.015.000	
	- Sosialisasi Perwabkueu	2,0 GIAT	1.104.000	2.208.000	
	- Giat Waskeu	2,0 GIAT	1.104.000	2.208.000	
	- Giat Rapat ke Polda (2 ORG x 12 GIAT)	24,0 GIAT	150.000	3.600.000	
	> GIAT SITIPOL			21.600.000	
	- Kegiatan Vicon Polres	48,0 GIAT	450.000	21.600.000	
	> TAMBAHAN GIAT BAG SUMDA			55.800.000	
	- Kesamaptaan Jasmani	2,0 GIAT	3.000.000	6.000.000	
	- Lat Bela Din	2,0 GIAT	1.500.000	3.000.000	
	- Pelatihan Fungsi Teknik kepolisian	12,0 GIAT	1.500.000	18.000.000	
	- Binrothal (40 ORG x 48 GIAT)	1920,0 OG	15.000	28.800.000	
	> TAMBAHAN GIAT RESKRIM			404.084.000	
	- Perkara Mudah	26,0 KSS	7.394.000	192.244.000	
	- Perkara Sedang	10,0 KSS	21.184.000	211.840.000	
	> TAMBAHAN GIAT NARKOBA			306.244.000	
	- Lidik Narkoba	24,0 KSS	6.400.000	153.600.000	
	- Sidik Narkoba	24,0 KSS	6.360.200	152.644.000	
	> TAMBAHAN GIAT SIDOKKES			45.000.000	
	- Giat penyuluhan Kesehatan POLRES / POLSEK (5 ORG x 12 GIAT)	60,0 OG	150.000	9.000.000	
	- Giat Bakti Sosial Pengobatan Gratis (5 ORG x 12 BLN)	60,0 OG	150.000	9.000.000	
	- Berkunjung ke Anggou Yang Sakit (5 ORG x 12 BLN)	60,0 OG	150.000	9.000.000	
	- Giat Pemeriksaan Kesehatan Tahanan POLRES / POLSEK (5 ORG x 2 GIAT x 12 BLN)	120,0 GIAT	150.000	18.000.000	
	> KEGIATAN IDENTIFIKASI			21.000.000	
	- Olah TKP (SGIAT x 12 BLN)	60,0 GIAT	350.000	21.000.000	
	> TAMBAHAN GIAT SAMAPTA			5.000.000	
	- Penanganan Tipring	12,0 KSS	500.000	6.000.000	

Bandar Lampung, November 2023
 KLUSA PENGGUNA ANGGARAN

INO HARIANTO, S.I.K., M.M
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73110802

DUKOPS POLRESTA BANDAR LAMPUNG

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER TA.2024

KEMEN/LEMB : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT KERJA : (641902) POLRES METRO
 ALOKASI : Rp 58.239.235.000,-

KODE	PROGRAM /KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	6
FT	DUKOPSNAL POLRES			800.000.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.126-Metro)			72.000.000	RM
	- Wifi/Internet Mako	12.0 BLN	6.000.000	72.000.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.126-Metro)			150.240.000	RM
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN			150.240.000	
	- Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12	12.0 OB	3.420.000	41.040.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12	12.0 OB	3.320.000	39.840.000	
	- Pejabat Penandatangan SPM [1 ORG x 12	12.0 OB	1.520.000	18.240.000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1.320.000	15.840.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	960.000	35.280.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.126-Metro)			250.937.000	RM
	> DUKUNGAN KEGIATAN RUTIN BAGOPS			13.800.000	
	- Kegiatan Pembinaan/Anev Harkamtibmas	12.0 GIAT	900.000	10.800.000	
	- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan	4.0 GIAT	750.000	3.000.000	
	> DUKUNGAN KEGIATAN RUTIN SIKEU			65.280.000	
	- Kegiatan Supervisi dan asistensi bidang	4.0 GIAT	4.000.000	16.000.000	
	- Dukungan Tambahan Dukmin Laporan	12.0 GIAT	4.106.700	49.280.000	
	> DUKUNGAN KEGIATAN TIK			3.000.000	
	- Kegiatan Operasional TIK	12.0 GIAT	250.000	3.000.000	
	> TAMBAHAN LIDIK SIDIK			168.857.000	
	- Lidik Sidik TPU (Perkara Mudah)	15.0 KSS	7.720.000	115.800.000	
	- Lidik dan Sidik Tindak Pidana Narkoba	1.0 KSS	53.057.000	53.057.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.126-Metro)			193.243.000	RM
	> DUK GIAT RUTIN SIUM POLRES			25.243.000	
	- Kegiatan anev, rapat dan pelayanan markas	12.0 GIAT	2.000.000	24.000.000	
	- Pengelolaan Arsip	1.0 GIAT	1.243.000	1.243.000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
	> DUK GIAT RUTIN PIMPINAN	12.0 GIAT	10.000.000	120.000.000	
	- Kegiatan Rutin Kapolres			120.000.000	
	- Kegiatan Rutin Wakapolres	12.0 GIAT	4.000.000	48.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.126-Metro)			133.580.000	RM
	- Kegiatan Baglog ke Polda Lampung	45.0 OG	380.000	17.100.000	
	- Kegiatan Siwas ke Polda Lampung	12.0 OG	380.000	4.560.000	
	- Kegiatan Sikeu ke Polda Lampung	144.0 OG	380.000	54.720.000	
	- Kegiatan Strajemen Rakemis/Bimtek/APIP	40.0 OG	530.000	21.200.000	
	- Penyusunan Anggaran	1.0 GIAT	36.000.000	36.000.000	
FU	DUKOPSNAL POLSEK			512.000.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.126-Metro)			33.000.000	RM
	> POLSEK METRO PUSAT			6.600.000	
	- Wifi/Jaringan Internet [1 UNIT x 12 BLN]	12.0 UNIT	550.000	6.600.000	
	> POLSEK METRO BARAT			6.600.000	
	- Wifi/Jaringan Internet [1 UNIT x 12 BLN]	12.0 UNIT	550.000	6.600.000	
	> POLSEK METRO TIMUR			6.600.000	
	- Wifi/Jaringan Internet [1 UNIT x 12 BLN]	12.0 UNIT	550.000	6.600.000	
	> POLSEK METRO UTARA			6.600.000	
	- Wifi/Jaringan Internet [1 UNIT x 12 BLN]	12.0 UNIT	550.000	6.600.000	
	> POLSEK METRO SELATAN			6.600.000	
	- Wifi/Jaringan Internet [1 UNIT x 12 BLN]	12.0 UNIT	550.000	6.600.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.126-Metro)			253.220.000	RM
	> 1. POLSEK METRO PUSAT			50.644.000	
	>> TAMBAHAN TURJAWALI RUTIN			19.764.000	
	- Uang Saku [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	16.000	5.856.000	
	- Uang Makan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	33.000	12.078.000	
	- Dana Satuan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	5.000	1.830.000	
	>> LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM			30.880.000	
	- Perkara Mudah [4 KSS x 1 THN]	4.0 KSS	7.720.000	30.880.000	
	> 2. POLSEK METRO BARAT			50.644.000	
	>> TAMBAHAN TURJAWALI RUTIN			19.764.000	
	- Uang Saku [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	16.000	5.856.000	
	- Uang Makan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	33.000	12.078.000	
	- Dana Satuan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	5.000	1.830.000	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUBKOMPONEN / DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
	>> LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM			30.880.000	
	- Perkara Mudah [4 KSS x 1 THN]	4.0 KSS	7.720.000	30.880.000	
	> 3. POLSEK METRO TIMUR			50.644.000	
	>> TAMBAHAN TURJAWALI RUTIN			19.764.000	
	- Uang Saku [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	16.000	5.856.000	
	- Uang Makan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	33.000	12.078.000	
	- Dana Satuan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	5.000	1.830.000	
	>> LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM			30.880.000	
	- Perkara Mudah [4 KSS x 1 THN]	4.0 KSS	7.720.000	30.880.000	
	> 4. POLSEK METRO UTARA			50.644.000	
	>> TAMBAHAN TURJAWALI RUTIN			19.764.000	
	- Uang Saku [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	16.000	5.856.000	
	- Uang Makan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	33.000	12.078.000	
	- Dana Satuan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	5.000	1.830.000	
	>> LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM			30.880.000	
	- Perkara Mudah [4 KSS x 1 THN]	4.0 KSS	7.720.000	30.880.000	
	> 5. POLSEK METRO SELATAN			50.644.000	
	>> TAMBAHAN TURJAWALI RUTIN			19.764.000	
	- Uang Saku [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	16.000	5.856.000	
	- Uang Makan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	33.000	12.078.000	
	- Dana Satuan [1 ORG x 366 GIAT]	366.0 OG	5.000	1.830.000	
	>> LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM			30.880.000	
	- Perkara Mudah [4 KSS x 1 THN]	4.0 KSS	7.720.000	30.880.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.126-Metro)			25.780.000	RM
	> POLSEK METRO PUSAT			5.156.000	
	- Dukungan Administrasi Laporan Rutin	12.0 GIAT	429.700	5.156.000	
	> POLSEK METRO BARAT			5.156.000	
	- Dukungan Administrasi Laporan Rutin	12.0 GIAT	429.700	5.156.000	
	> POLSEK METRO TIMUR			5.156.000	
	- Dukungan Administrasi Laporan Rutin	12.0 GIAT	429.700	5.156.000	
	> POLSEK METRO UTARA			5.156.000	
	- Dukungan Administrasi Laporan Rutin	12.0 GIAT	429.700	5.156.000	
	> POLSEK METRO SELATAN			5.156.000	
	- Dukungan Administrasi Laporan Rutin	12.0 GIAT	429.700	5.156.000	

DUKOPS POLRES METRO

DUKOPS POLRES LAMPUNG UTARA

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (641923) POLRES LAMPUNG BARAT
 ALOKASI Rp. 990.400.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			990.400.000	
3128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)	12,0	Layanan	990.400.000	
3128.EBA	Lokasi : KAB. LAMPUNG BARAT	12,0		990.400.000	
903	Layanan Umum			990.400.000	
FT	Dukungan Operasional Pertahanan DUKOPSINAL POLRES			500.000.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN,145-Liwa)			133.320.000	RM
	> HONOR PENANGGUG JAWAB			133.320.000	
	> PENGELOLA KEUANGAN				
	- Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12,0	OB	3.420.000	41.040.000
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12,0	OB	1.910.000	22.920.000
	- Pejabat Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12,0	OB	1.520.000	18.240.000
	- Bendahara pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12,0	OB	1.320.000	15.840.000
	- Staf Pengelola Keuangan/Anggaran	36,0	OB	980.000	35.280.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN,145-Liwa)			264.966.000	RM
	> GIAT GAKTILIN			22.000.000	
	- Giat Gaktiplin Ke Polsek Jajaran [10 GIAT x 2 HR x 7 ORG]	140,0	OG	150.000	21.000.000
	- Dukumil	1,0	THN	1.000.000	1.000.000
	> TAMBAHAN DUKUNGAN			34.650.000	
	> KEGIATAN SIKEU				
	- Dukungan Giat Sikeu Ke Polda [3 ORG x 9 GIAT]	27,0	GIAT	450.000	12.150.000
	- Pemeriksaan Perwabkai Polres	25,0	GIAT	450.000	11.250.000
	- Kegiatan Penyusunan Laporan	25,0	GIAT	450.000	11.250.000
	> TAMBAHAN LIDIK SIKIK			208.318.000	
	- Perkara Sulit	4,0	KSS	35.697.000	142.788.000
	- Perkara Sedarang	2,0	KSS	21.184.000	42.368.000
	- Perkara Mudah	3,0	KSS	7.720.000	23.160.000
521211	Belanja Bahan (KPPN,145-Liwa)			8.141.000	RM
	> TAMBAHAN GIAT BAG REN			8.141.000	
	- Penyusunan Capaian Kinerja Polres	1,0	GIAT	3.000.000	3.000.000
	- Rapat Pembuatan SIKS	1,0	GIAT	2.141.000	2.141.000
	- Rapat ZI	1,0	GIAT	3.000.000	3.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN,145-Liwa)			18.660.000	RM
	> Tambahan Kegiatan Propam			10.500.000	
	- Ketua [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	450.000	2.250.000
	- Wakil Ketua [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	200.000	1.000.000
	- Sekretaris [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	300.000	1.500.000
	- Pendamping [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	150.000	750.000
	- Penuntut [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	150.000	750.000
	- Petugas Pengawal Terduga	5,0	OG	150.000	750.000
	- Pelanggar [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	150.000	750.000
	- Rohaniawan [1 ORG x 5 GIAT]	5,0	OG	400.000	2.000.000
	- Anggota/Banum [2 ORG x 5 GIAT]	10,0	OG	150.000	1.500.000
	> HONOR PEJABAT PENGADAAN			8.160.000	
	- Honor Pejabat Pengadaan [1 ORG x 12 BLN]	12,0	OB	680.000	8.160.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN,145-Liwa)			74.913.000	RM
	> KEGIATAN DINAS PERSONEL			40.000.000	
	- Kegiatan Rapat ke Luar Kota	20,0	GIAT	2.000.000	40.000.000
	> TAMBAHAN GIAT BAG REN			34.913.000	
	- Giat Koordinasi/Revisi Anggaran Ke Kanwil Pembendaharaan	5,0	GIAT	3.225.000	16.125.000
	- Kegiatan Krdisasi dan Rpaat Keluar	5,0	GIAT	3.300.000	16.500.000
	- Study Kelayakan	1,0	GIAT	2.288.000	2.288.000
FU	DUKOPS POLSEK			490.400.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN,145-Liwa)			468.550.000	RM
	> POLSEK PRA RURAL POLRES			200.000.000	
	- Polsek Bandar Negeri Suoh	1,0	THN	200.000.000	200.000.000
	> DUKOPS POLSEK POLRES			268.550.000	
	>> POLSEK SUMBER JAYA			83.560.000	
	- Perkara Mudah	8,0	KSS	7.610.000	60.880.000
	- PAM Kegiatan Masyarakat [9 ORG x 56 GIAT]	504,0	OG	45.000	22.880.000
	>> POLSEK SEKINCAU			83.560.000	
	- Perkara Mudah	8,0	KSS	7.610.000	60.880.000
	- PAM Kegiatan Masyarakat [9 ORG x 56 GIAT]	504,0	OG	45.000	22.880.000
	>> POLSEK BALK BUKIT			70.990.000	
	- Perkara Mudah	5,0	KSS	7.610.000	38.050.000
	- PAM Kegiatan Masyarakat [6 ORG x 62 GIAT]	372,0	OG	45.000	16.740.000
	- Pireli Sabhara	300,0	GIAT	54.000	16.200.000
	>> POLSEK BANDAR NEGERI SUOH			30.440.000	
	- Perkara Mudah	4,0	KSS	7.610.000	30.440.000
521211	Belanja Bahan (KPPN,145-Liwa)			21.850.000	RM
	> DUKOPS POLSEK POLRES			21.850.000	
	>> POLSEK BALK BUKIT			0	
	- Kegiatan Binrohisal	25,0	GIAT	410.000	10.250.000
	- Kegiatan Rapat	25,0	GIAT	410.000	10.250.000
	- Kegiatan Bela Diri	5,0	GIAT	270.000	1.350.000

DUKOPS POLRES LAMPUNG BARAT

NO	PROGRAM/REGISTRASI/OUTPUT	VOLUME	JENIS KOMPONEN	RENCANA PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	KOMPONEN/USUB KOMPONEN/BAKUL/DETAIL	MTR	(UTM/INDKNG)		(Rp)	(Rp)
	Perencanaan Kebutuhan Koneksi	1,000				24,000,000
	- Kabel/aksesori	17		85 org x 12 giat	1,400	24,000,000
	- Kabel Perantara Polikarbonat Fiber	48		1 org x 12 giat	1,400	1,400,000
	- Air Mineral	24		2 org x 12 giat	25,000	600,000
	- ATK kebutuhan kegiatan	2		1 org x 2 giat	1,200,000	2,400,000
	Perencanaan Kebutuhan Listrik					3,000,000
	- Internet Dukung Januari	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Februari	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Maret	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung April	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Mei	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Juni	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Juli	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Agustus	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung September	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Oktober	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung November	1		1 giat	300,000	300,000
	- Internet Dukung Desember	1		1 giat	300,000	300,000
	Biaya Pelaksanaan					44,500,000
	A. Penanganan Bencana alam					25,000,000
	- Uang Makan	456		76 orang x 2 giat x 3 hari	456	20,700,000
	- Uang Daku	456		76 orang x 2 giat x 3 hari	456	10,000,000
	- Dana Suku	456		76 orang x 2 giat x 3 hari	456	5,300,000
	- ATK kebutuhan kegiatan	2		1 org x 2 giat	2	2,500,000
	B. Apes Keselamatan					10,500,000
	- Pengiriman	9		3 orang x 3 hari	9	530,000
	- Transportasi Udara	6		3 orang x 2 malam x 3 hari	6	1,400,000
	- Transportasi Darat dan Bandara ke Hotel	1		3 orang x 2 giat	1	500,000
	- Administrasi Perjalanan Kegiatan	1		1 giat	1	90,000
	STAF KEGIATAN					9,000,000
	Perencanaan Pustaka Saling Uji PPA	12		12 Koneksi x 3 hari	12	2,500,000
	- Administrasi Penyediaan	12		12	700,000	8,400,000
	- Pengiriman TDP					3,000,000
	- Pengiriman (Observasi)					150,000
	- Wawancara (interview)					600,000
	- Pengiriman (order cover)					500,000
	- Pengiriman (booklet)					100,000
	- Pengiriman dan analisis dokumen					675,000
	- Pengiriman dan penemuan					200,000
	B. Penyediaan	14				4,100,000
	- Administrasi Penyediaan					450,000
	- Pengiriman					1,700,000
	- Ujicoba Praktek					400,000
	- Pengiriman Berbasis Pustaka					1,550,000
	- Proses Revisi					400,000
	Perencanaan Pustaka Umum	12		12 Koneksi x 3 hari	12	2,500,000
	- Administrasi Penyediaan	12		12	700,000	8,400,000
	- Pengiriman TDP					3,000,000
	- Pengiriman (Observasi)					150,000
	- Wawancara (interview)					600,000
	- Pengiriman (order cover)					500,000
	- Pengiriman (booklet)					100,000
	- Pengiriman dan analisis dokumen					675,000
	- Pengiriman dan penemuan					200,000
	B. Penyediaan	12				3,400,000
	- Administrasi Penyediaan					300,000
	- Pengiriman					1,700,000
	- Ujicoba Praktek					400,000
	- Pengiriman Berbasis Pustaka					1,700,000
	- Proses Revisi					400,000
	Biaya Pelaksanaan					100,000,000
521011	Biaya Pelaksanaan					0
	DUKU KEU					65,700,000
	- Duk. Mkn	48		4 org x 1 hr x 12 giat	48	20,000
	- Air Mineral	12		1 org x 1 hr x 12 giat	12	25,000
	- ATK kebutuhan	12		1 hr x 12 giat	12	300,000
	- BBN Kendaran	300		20 Ltr x 12 giat	300	12,700
	- Duku Mkn					960,000
	- Foto copy	2,520		210 ltr x 12 giat	2,520	300
	- BBN Kendaran	48		4 org x 1 hr x 12 giat	48	30,000
	- BBN Kendaran	24		2 ltr x 12 giat	24	90,000
	- BBN Kendaran	12		1 ltr x 12 giat	12	45,000
	- BBN Kendaran	300		10 ltr x 12 giat	300	12,700
	Biaya Pelaksanaan					0

NO	PROGRAM/REGISTRASI/OUTPUT	VOLUME	JENIS KOMPONEN	RENCANA PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
----	---------------------------	--------	----------------	---------------------	--------------	--------

NO	KOMPONEN/USUB KOMPONEN/BAKUL/DETAIL	SUB	JENIS KOMPONEN	RENCANA PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	OUTPUT	(UTM/INDKNG)			(Rp)	(Rp)
	- Duk. Mkn	1,800		150 ltr x 12 giat	1,800	3,240,000
	- Foto copy	12		1 org x 12 giat	12	50,000
	- ATK	12		1 org x 12 giat	12	35,000
	- BBN Kendaran	24		2 org x 1 hr x 12 giat	24	100,000
	- BBN Kendaran	24		2 org x 1 hr x 12 giat	24	100,000
	- Uang Daku	6		2 org x 4 hr x 1 giat	6	350,000
	- Sewa Hotel	1		1 Koneksi	1	450,000
	- BBN Kendaran	1		BNN Kendaran per	1	400,000
	- BBN Kendaran	1		TUK Kendaran per	1	250,000
	- Dukung ATK	1		1 giat	1	200,000
	Biaya Pelaksanaan					0
	Pokas Tulang Bawang					14,400,000
	- Snack /Tng	300		75 org x 12 giat	300	20,000
	- Air Mineral	24		2 Dkn x 12 giat	24	25,000
	- Snack/Meja	36		3 Paket x 12 giat	36	50,000
	- Baku Meja	24		2 Paket x 12 giat	24	45,000
	- Dukerlin	1,866		155 ltr x 12 giat	1,866	300
	- ATK	12		1 Ltr x 6 M x 12 giat	12	200,000
	- Banner	12		25,000	12	2,000,000
	GIAT WiraBisaal konten Subbag Humas					8,400,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Januari	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Februari	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Maret	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh April	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Mei	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Juni	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Juli	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Agustus	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh September	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Oktober	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh November	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	- Dukungan kuota internet operator bh Desember	7		7 org x 1 giat	7	100,000
	GIAT Humas					6,700,000
	- Sewa Duku	12		1 Giat x 12 Mh	12	150,000
	- Air Mineral	12		1 Dkn x 12 giat	12	35,000
	- Sewa Duku	40		40 Org x 12 giat	40	20,000
	- Prokesy	267		22 Ltr x 12 giat	267	300
	- ATK PID	12		1 org x 12 giat	12	300,000
	Biaya Pelaksanaan					0
52123	Biaya Pelaksanaan					0
	HONOR PENGELOLAAN BULAN JANUARI					5,270,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN FEBRUARI					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN MARET					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN APRIL					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN MEI					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN JUNI					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN JULI					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000
	HONOR PENGELOLAAN BULAN AGUSTUS					1,970,000
	- KPA (KAPOLRES)	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	1,970,000
	- PPSM	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	770,000
	- BENDAHARA PENGELOLAAN	1	ORG	1 ORG x 1 BLN	1	670,000
	- HONOR STAF PENGELOLA KEUANGAN/ANGG	2	ORG	2 ORG x 1 BLN	2	1,000,000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kementerian Negara / Lembaga
Unit Eselon II
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output
Indikator KRO
Volume
Saluran Ukur
Alokasi Dana

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2021
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLRES LAMPUNG TIMUR
Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Pelayanan Pemeliharaan Keamanan
Rata-rata Jumlah Paket Pelayanan Pemeliharaan Keamanan
Layanan Dukungan Manajemen Internal
Jumlah Laporan
12
Layanan
Rp 8.132.730.000

Kode	Uraian Suboutput/ Komponen/Subkomponen/Akuntansi Detil	Volume Sub	Isi Kompo (na/Pendukung)	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
					Jml		
3215 EBA 962	Layanan Dukungan Manajemen Internal						6.132.730.000
003	Layanan Umum						6.132.730.000
B	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan		UTAMA				94.800.000
	HONOR PBP						4.800.000
	- Honor PBP SKCK TK Polres	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	400.000	4.800.000	
	- Honor Petugas Pelaksana skck Polres	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	400.000	4.800.000	
	- Honor Petugas Pelaksana skck Polsek Urban	24	[2 ORG x 12 GIAT]	24	350.000	8.400.000	
	- Honor Petugas Pelaksana skck Polsek Rural	240	[20 ORG x 12 GIAT]	240	300.000	72.000.000	
	- Honor Petugas Pelaksana skck Polsek Pra Rural	24	[2 ORG x 12 GIAT]	24	200.000	4.800.000	
FT	* Dukungan Operasional Satker Polres		PENDUKUNG				800.000.000
	> HONOR PENANGGUNGA JAWAB PENGELOLA KUANGAN						194.280.000
	- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	4.250.000	51.000.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	4.130.000	49.560.000	
	- Pejabat Penanda Tangan SPM	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	2.040.000	24.480.000	
	- Bendahara Pengeluaran	12	[1 ORG x 12 GIAT]	12	1.780.000	21.360.000	
	- Staf Pengelola Keuangan	36	[3 ORG x 12 GIAT]	36	1.330.000	47.880.000	
	KEGIATAN PEMBINAAN						605.720.000
	kegiatan Pembinaan / Anev Harkamtibmas Bulanan Bag ops	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	4.000.000	48.000.000	
	kegiatan Pengelolaan Informasi dan Koordinasi Kerja Bag ops	6	[1 GIAT x 6 BLN]	6	1.250.000	7.500.000	
	kegiatan Rakor Eksternal instansi pemerintah	6	[1 GIAT x 6 BLN]	6	1.250.000	7.500.000	
	kegiatan Sosialisasi RKA KL DIPA dan Biro Rena	1	[1 GIAT x 1 BLN]	1	1.500.000	1.500.000	
	kegiatan Deseminasi Capaian IKM jajaran Polres Lamtim	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	1.000.000	12.000.000	
	kegiatan Anev Zona Integritas	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	750.000	9.000.000	
	Laporan E-Monev Bappenas	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	600.000	7.200.000	
	kegiatan Pembinaan Fungsi Perencanaan	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	750.000	9.000.000	
	kegiatan penyusunan Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran di Jakarta	2	[2 GIAT x 2 BLN]	2	25.000.000	50.000.000	
	kegiatan Supervisi Polsek	96	[8 GIAT x 12 BLN]	96	350.000	33.600.000	
	kegiatan pengecekan Ran Dinas (2 Giat x 1 th)	2	[2 GIAT x 2 BLN]	2	250.000	500.000	
	kegiatan pengecekan perlengkapan dan peralatan Polres	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	500.000	6.000.000	
	Dukum dan Pelaporan Sse keu	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	500.000	6.000.000	
	kegiatan Sosialisasi dan pengecekan Perwaku	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	1.000.000	12.000.000	
	kegiatan Anev Penyerapan Anggaran	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	1.500.000	18.000.000	
	kegiatan Anev Rapat dan Yan Markas	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	1.500.000	18.000.000	
	pengelolaan Arsip	1	[1 GIAT x 1 BLN]	1	2.000.000	2.000.000	
	HUMAS	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	500.000	6.000.000	
	kegiatan Rutin wakapolres	12	[1 GIAT x 12 BLN]	12	6.000.000	72.000.000	
	uang saku Pam Gat Masyarakat	670	[67 ORG x 10 GIAT]	670	18.000	12.060.000	
	uang makan Pam Gat Masyarakat	670	[67 ORG x 10 GIAT]	670	33.000	22.110.000	
	Dukum kegiatan Pengamanan	1	[12 GIAT x 1 TH]	1	2.999.000	2.999.000	
	Ldk sidk narikoba	3	[1 GIAT x 3 BLN]	3	31.400.000	94.200.000	
	sidk narikoba	3	[1 GIAT x 3 BLN]	3	21.637.000	64.911.000	
	Ldk sidk Reskrim	11	[1 GIAT x 11 BLN]	11	7.720.000	84.920.000	
FU	* Dukungan Operasional POLSEK		PENDUKUNG				1.588.800.000
	Polsek Sukadana	12		12		168.000.000	
	- Pam Gat Masyarakat	288	[10 ORG x 48 GIAT]	480	45.000	21.600.000	
	- Bantuan Kegiatan Ldk /sidk Sedang	10	[10 KSS x 1 TH]	10	7.340.000	73.400.000	
	- Dukum					13.000.000	
	- Kertas F4 / A4	100	[65 Rm x 1 GIAT]	100	40.000	4.000.000	
	- Tinta (Hitam / Warna) / Catridge	50	[50 Rm x 1 GIAT]	50	35.000	1.750.000	
	- Pena	100	[15 Kotak x 1 GIAT]	100	13.500	1.350.000	
	- Map	20	[5 Pak x 1 GIAT]	20	25.000	500.000	
	- Spidol	43	[10 buah x 1 GIAT]	43	15.000	645.000	
	- Paper Clip 1 Pak	40	[10 Pak x 1 GIAT]	40	25.000	1.000.000	
	- Photo Copy / Jlid	2.500	[10.000 x 1 GIAT]	2.500	250	625.000	
	- Amplop 1 Pak	50	[10 Pak x 1 GIAT]	50	25.000	1.250.000	
	- Kertas Jlid	8	[1 Pak x 1 GIAT]	8	197.500	1.580.000	
	- Nl staples 1 Pak	20	[10 buah x 1 GIAT]	20	15.000	300.000	

DUKOPS POLRES LAMPUNG TIMUR

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (650922) POLRES WAY KANAN
 Rp. 1.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME SUB OUTPUT	JENIS KOMPONEN	RINCIAN PERHITUNGAN		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETAIL			(UTM/PNDKG)	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
FT	DUKOPSNAL POLRES						1.000.000.000
521111	Belanja biaya pemeliharaan jaringan						64.000.000
	> SITIPOL POLRES WAY KANAN						64.000.000
	- Maintenance equipment jaringan TI Polres	16	GIAT	1 POLRES X 16 GIAT	16	2.500.000	40.000.000
	- Biaya Tagihan Wifi Polres	12	BULAN	12 BULAN	12	2.000.000	24.000.000
521115	Honor Operator Satuan Kerja						110.400.000
	SIKEU						110.400.000
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN PELAKSANA PROGRAM POLRI						110.400.000
	>> HONOR PENGELOLA KEUANGAN						110.400.000
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	OB	1 ORG X 12 BULAN	12	3.420.000	41.040.000
	- Honor PFSPM	12	OB	1 ORG X 12 BULAN	12	1.520.000	18.240.000
	- Honor Bendahara Pengeluaran	12	OB	1 ORG X 12 BULAN	12	1.320.000	15.840.000
	- Honor Staf pengelola Keuangan/Anggaran	36	OB	3 ORG X 12 BULAN	36	980.000	35.280.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya						825.600.000
	BAGOPS POLES WAY KANAN						191.280.000
	- Kegiatan Pengamanan Unras	1.200	OG	60 ORG X 20 GIAT	1.200	49.000	58.800.000
	- Tambahan giat Operasi Kepolisian (40 org x 18 Hari)	720	OH	40 ORG X 18 HARI	720	139.000	100.080.000
	- TURWALI KRYD	600	OG	20 ORG X 30 GIAT	600	54.000	32.400.000
	SIKEU						30.400.000
	=> GIAT REKONSIALIASI / KOORDINASI KE KPPN DAN ASISTENSI BIDKEU POLDA						30.400.000
	- uang harian giat luar kota/coklit/rekon bidang keuangan	80	OH	2 ORG x 1 HARI x 40 GIAT	80	380.000	30.400.000

Page 1 of 3

	SIPROPAM						39.000.000
	=> PELAKSANAAN SIDANG KKEP/DISIPLIN						33.000.000
	> PELAKSANAAN SIDANG						33.000.000
	- Ketua Sidang	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	450.000	5.400.000
	- Wakil Ketua Sidang	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	400.000	4.800.000
	- Sekretaris Sidang	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	300.000	3.600.000
	- Pendamping Sidang	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	300.000	3.600.000
	- Penuntut Sidang	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	300.000	3.600.000
	- Petugas/Pengawal Saksi & Terperiksa	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	300.000	3.600.000
	- Rohaniawan	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	400.000	4.800.000
	- Anggota / Banum	12	OG	1 ORG x 1 HARI x 12 GIAT	12	300.000	3.600.000
	=> Snack Drink						6.000.000
	- Snack & Drink	300	OG	3 ORG X 10 GIAT	300	20.000	6.000.000
	SIUM						24.000.000
	=> GIAT VICON						24.000.000
	- Snack & Drink	1.200	OG	20 ORG x 60 GIAT	1.200	20.000	24.000.000
	SIDOKKES						59.499.000
	>> Kegiatan Yankespers/Rikkes						59.499.000
	- Uang Harian	168	OH	2 ORG X 12 HARI X 7 GIAT	168	150.000	25.200.000
	- BBM	2.352	LITER		2.352	14.500	34.104.000
	- Dukmin fotocopy	390	LEMBAR	488 LEMBAR	390	500	195.000
	TAMBAHAN OPERASIONAL SATRESKRIM						428.364.000
	PERKARA SULT						428.364.000
	>> PENYELIDIKAN						139.440.000
	- ADMINISTRASI PENYELIDIKAN	-	-	-	12	11.620.000	139.440.000
	- PENGOLAHAN TKP	-	-	-	12	900.000	
	- PENGAMATAN (OBSERVASI)	-	-	-	12	900.000	
	- WAWANCARA (INTERVIEW)	-	-	-	12	5.300.000	
	- PEMBUNTUTAN (SURVEILLANCE)	-	-	-	12	300.000	
	- PENYAMARAN (UNDERCOVER)	-	-	-	12	950.000	
	- PELACAKAN (TRACKING)	-	-	-	12	900.000	
	- PENELITIAN DAN ANALISIS DOKUMEN	-	-	-	12	970.000	
	- PEMOTRETAN DAN PEREKAMAN	-	-	-	12	500.000	
	>> PENYIDIKAN						288.924.000
	- ADMINISTRASI PENYIDIKAN	-	-	-	12	1.141.000	
	- UPAYA PAKSA	-	-	-	12	7.450.000	
	- PEMERIKSAAN	-	-	-	12	3.486.000	

Page 2 of 3

DUKOPS POLRES WAYKANAN

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kementerian Negara / Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon II / Satker : POLRES LAMPUNG TENGAH
 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 Sasaran Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Keamanan
 Klasifikasi Rincian Output : Dukungan Manajemen Internal
 Indikator KRO : Layanan Umum
 Volume : 12
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dukung Polres dan Polsek : Rp. 2.577.200.000,-

KODE	URAIAN SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKTIV / DETIL	VOLUME SUB OUTPUT	JNS KMPN (LTM / INVEK)	RINCIAN PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1226	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					2.577.200.000
1226.FRM	Layanan Umum					2.577.200.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan Keamanan					1.100.000.000
FT	DUKUNGAN OPERASIONAL POLRES		PENDUKUNG	1 Tahun		1.100.000.000
	521115 Honor Operasional Satuan Kerja					234.000.000
	- Honor SPK	12	1 Org x 12 Bulan	12	4.250.000	51.000.000
	- Honor PPSM	12	1 Org x 12 Bulan	12	2.040.000	24.480.000
	- Honor PPK	12	1 Org x 12 Bulan	12	2.520.000	30.240.000
	- Honor Operator Bendahara Pengeluaran	12	6 Org x 12 Bulan	12	1.730.000	20.760.000
	- Honor Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran	72	6 Org x 12 Bulan	72	1.330.000	15.760.000
	- Honor Pejabat Pengevaluasi (PPB)	12	1 Org x 12 Bulan	12	680.000	8.160.000
	- Honor Operator Istimak	12	1 Org x 12 Bulan	12	3.000.000	36.000.000
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya					566.365.000
	--> Penggantian Urup Rasa					89.400.000
	- Uang Saku	1.800	450 Org x 4 Giat	1.800	19.000	28.200.000
	- Uang Makan	1.800	450 Org x 4 Giat	1.800	33.000	59.400.000
	- Kertas F4	8	2 Rim x 4 Giat	8	60.000	480.000
	- Photocopy	200	50 Lembar x 4 Giat	200	300	60.000
	- Tinta	4	1 Botol x 4 Giat	4	60.000	240.000
	- Jilat	28	7 Busan x 4 Giat	28	15.000	420.000
	--> Pakaian Dalam					5.940.000
	- Uang Makan	60	30 org x 2 giat	60	29.000	1.740.000
	- Etners Puding	60	30 org x 2 giat	60	14.000	840.000
	- Uang Saku	60	30 org x 2 giat	60	28.000	1.680.000
	- Honor Pakaian	12	3 org x 2 Jp x 2 giat	12	75.000	900.000
	--> Tambahan Lisk Sdkl Piana Umum					211.840.000
	a. Kegiatan Penyelidikan					8.528.000
	- Administrasi Penyelidikan					700.000
	- Pengalihan TKP					300.000
	- Pengamatan (observasi)					300.000
	- Wawancara (Interview)					5.300.000
	- Pembuktian (Investigasi)					300.000
	- Penyamaran (Under Cover)					650.000
	- Pelacakan (tracking)					300.000
	- Penelitian dan analisis dokumen					678.000
	- Penelitian dan pengamatan					397.000
	b. Kegiatan Penindakan / Penangkapan					12.258.000
	- Administrasi Penindakan					890.000
	- Usgay Polisi					750.000
	- Pemeriksaan					2.368.000
	- Gelar Perhias					2.550.000
	- Penyerahan Berkas Perantara					480.000
	- Pensi risiko					5.290.000
	- Honor Pakaian					75.000
		96	4 org x 2 Jp x 2 giat	96	75.000	7.200.000

1	2	3	4	5	6	7
>> Tambahan Lisk Sdkl Piana Harfiba				10 Kasus		216.575.000
a. Penyusunan rencana penyidikan						1.476.000
- Kertas HVS		2	2 Rim	2	45.000	90.000
- Tinta Printer		2	2 Bk	2	250.000	500.000
- Map/mahacher / buku		3	2 Pak	2	50.000	100.000
- Ordher / bottle		2	2 Bk	2	30.000	60.000
- Amplop salid		1	1 Pak	1	25.000	25.000
- Plastik		1	1 Bk	1	200.000	200.000
- Stempel lak		2	2 Bk	2	250.000	500.000
b. Usgay pelak (langkah gedeck / sals / ahil)						4.650.000
- Makan Pelug		20	5 Org x 4 Hr	20	45.000	900.000
- Snack		20	5 Org x 4 Hr	20	20.000	400.000
- Uang transport pelug		20	5 Org x 4 Hr	20	150.000	3.000.000
- Sensus Kunyutan		3	3 Org x 1 giat	3	100.000	300.000
- Foto dokumentasi terasngka		5	5 Eks	5	10.000	50.000
c. Pemeriksaan terasngka / sals / ahil						2.550.000
- Uang transport terasngka		6	2 Org x 3 Hr	6	150.000	900.000
- Biaya penyediaan bekalas witing		10	10 hal	10	1.500.000	15.000.000
- Makan perug / lak / salid pelug		3	3 Org x 1 Hr	3	45.000	135.000
d. Pengalihan barang bukti Harfiba						5.700.000
1) Uang transfer kinn ka Labonabun		2	2 Org x 1 Hr	2	150.000.000	300.000.000
2) Foto dokumentasi barang bukti		20	20 Ltr	20	10.000	200.000
3) Penyamaran Harfiba						400.000
- Snack		20	20 Org x 1 Hr	20	20.000	400.000
- Makan		20	20 Org x 1 Hr	20	45.000	900.000
- Uang transport kinn pangangan		3	3 Org x 1 Hr	3	150.000	450.000
- Sams Tuglas pembakar (promotor)		1	1 Unit x 1 Hr	1	1.500.000	1.500.000
- Foto dokumentasi barang bukti		15	15 Ltr	15	10.000	150.000
- Honor tm ahil / pengal barang bukti		2	2 Org x 1 Hr	2	900.000	1.800.000
e. Gelar periksa (Pak langah ahil)						4.522.000
- Snack		45	15 Org x 3 Hr	45	20.000	900.000
- Makan pelug / lak / salid pelug		45	15 Org x 3 Hr	45	49.000	2.025.000
- Uang transport		9	3 Org x 3 Hr	9	150.000	1.350.000
- Pengalihan mater gilar		220	74 Ltr x 3 Giat	220	100	22.000
- Laporan hasil gilar		15	5 Bk x 3 Giat	15	15.000	225.000
f. Pembuktian (terasngka berkas perantara)						650.000
- Org pelak perantara		5000	500 Ltr x 10 Bk	5000	100	500.000
- Jilid berkas perantara		10	10 Ltr	10	15.000	150.000
g. Penyamaran berkas perantara (bhap 1) ka JPU						450.000
- Snack		2	2 Org x 1 Hr	2	20.000	40.000
- Makan pelug		2	2 Org x 1 Hr	2	45.000	90.000
- Uang transport dalam kota		2	2 Org x 1 Giat	2	150.000	300.000
h. Penyamaran terasngka dan BB (bhap 1) ka JPU						1.675.000
- Snack		5	5 Org x 1 Hr	5	20.000	100.000
- Makan pelug		5	5 Org x 1 Hr	5	45.000	225.000
- Uang transport dalam kota		5	5 Org x 1 Hr	5	150.000	750.000
- Pemeriksaan kesehatan terasngka		2	2 Org x 1 Giat	2	300.000	600.000
--> Tambahan Biaya Operasi Kapasitas						43.545.000
- Tambahan Biaya Operasi Kapasitas				1 Tahun	1	43.545.000
521211 Belanja Bahan						148.385.000
--> PERINCIAN HARI BESAR KEAGAMAAN						18.000.000
- Penggantian Hari Besar Keagamaan				5	10 Giat	5.380.000.000
--> KEGIATAN PURNABAKTI POLRES						4.985.000
- Kegiatan Purnabakti				1	1 Giat	4.985.000
--> BIODIVERSITAS KESEHATAN						12.600.000
- Bkwal Sosial Kesehatan				2	2 Giat	6.000.000
- Anew Anggaran						16.000.000
- Belanja dan Buku Tulis (100 org x 4 Giat)		360	90 Org x 4 Giat x 1 Th	360	30.000	10.800.000
- Snack (50 org x 4 Giat)		360	90 Org x 4 Giat x 1 Th	360	7.000	2.520.000
- Berner (4 Giat)		4	4 Giat x 1 Th	4	250.000	1.000.000
- Dukan (4 Giat)		4	4 Giat	4		
- Kertas F4		4	4 Giat x 1 Th	4	90.000	360.000
- Photocopy		400	100 Lembar x 4 Giat	400	300	120.000
- Inke		4	1 Bk x 4 Giat	4	115.000	460.000
- Jilat		24	6 Bk x 4 Giat	24	30.000	720.000

1	2	3	4	5	6	7
12411	Verifikasi Pengalangan Jendral Keunggulan					11.000.000
	- Belanja dan Buku Tulis	360	30 Org x 12 Giat	360	28.000	10.080.000
	- Belanja	360	30 Org x 12 Giat	360	7.000	2.520.000
	- Belanja	12	12 Giat	12	250.000	3.000.000
	- Dukungan	12	12 Giat	12	420.000	5.040.000
	- Penyelidikan Laporan Keunggulan					6.000.000
	- Belanja dan Buku Tulis	90	45 Org x 2 Giat	90	30.000	2.700.000
	- Snack	90	45 Org x 2 Giat	90	1.000.000	900.000
	- Belanja	2	2 Giat	2	300.000	600.000
	- Dukungan	2	2 Giat	2	600.000	1.200.000
	- Superasi Oleh Pensiun Pungsi Pokda Lampung					39.600.000
	- Makan	600	90 Org x 12 Giat	600	30.000	18.000.000
	- Snack	600	90 Org x 12 Giat	600	20.000	12.000.000
	- Belanja	12	12 Giat	12	300.000	3.600.000
	- Dukungan	12	12 Giat	12	600.000	7.200.000
	- Pengalangan Wajar Pokda Lampung					6.400.000
	- Makan	100	50 Org x 2 Giat	100	30.000	3.000.000
	- Snack	100	50 Org x 2 Giat	100	20.000	2.000.000
	- Belanja	2	2 Giat	2	300.000	600.000
	- Dukungan	2	2 Giat	2	1.000.000	2.000.000
	- Pengalangan Wajar Wasekum Mabes					6.600.000
	- Makan	100	50 Org x 2 Giat	100	30.000	3.000.000
	- Snack	100	50 Org x 2 Giat	100	20.000	2.000.000
	- Belanja	2	2 Giat	2	300.000	600.000
	- Dukungan	2	2 Giat	2	1.000.000	2.000.000
	- Pengalangan Tim Mabes Exditi 1					19.800.000
	- Makan	256	64 Org x 4 Giat	256	30.000	7.680.000
	- Snack	256	64 Org x 4 Giat	256	1.100.000	2.816.000
	- Belanja	4	4 Giat	4	300.000	1.200.000
	- Dukungan	4	4 Giat	4	1.000.000	4.000.000
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Baka					150.220.000
	- Perjalanan Dinas ke Pokda Lampung					84.000.000
	- Uang Harian Rezeki ke Pokda Lampung	240	20 Org x 1 Giat x 12 Bul	240	350.000	84.000.000
	- Perjalanan Meeting Lisk Kota					80.220.000
	- Tiket Pesawat (PP)	12	3 Org x 2 Giat x PP	12	680.000	8.160.000
	- Uang Harian	42	3 Org x 7 Hr x 2 Giat	42	670.000	28.140.000
	- Pengalangan / Hotel	28	2 Korr x 2 Hr x 2 Giat	28	1.100.000	30.800.000
1242	DUKUNGAN POLRES					1.477.200.000
	521115 Belanja Barang Operasional Lainnya					1.477.200.000
	--> POLRES TIRU GADAG					174.960.000
	1. Polak Terasngk Besar					87.480.000
	a. Tambahan Turnwal	732	2 Org x 366 Hr	732	54.000	39.528.000
	b. Pam Giat Masyarakat	48	4 Org x 12 Giat	48	40.000	1.920.000
	c. Tambahan Giat Lisk/Asik sedang	6	3 Kas	6	3.720.000	22.320.000
	d. Penyerahan Wll Kantor	12	12 Bulan	12	500.000	6.000.000
	e. Tambahan Dukun Kantor	1	1 Giat	1	1.000.000	1.000.000
	3. Polak Pungsi Baka					87.480.000
	a. Tambahan Turnwal	732	2 Org x 366 Hr	732	54.000	39.528.000
	b. Pam Giat Masyarakat	48	4 Org x 12 Giat	48	40.000	1.920.000
	c. Tambahan Giat Lisk/Asik sedang	6	3 Kas	6	3.720.000	22.320.000
	d. Penyerahan Wll Kantor	12	12 Bulan	12	500.000	6.000.000
	e. Tambahan Dukun Kantor	1	1 Giat	1	1.000.000	1.000.000
	4. POLRES PIRI GADAG					86.220.000
	1. Perek					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024 (ALOKASI ANGGARAN)

KEMEN/LEMB (60) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (121116) POLRES MESUJI
 ALOKASI Rp. 40.897.699.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
1	2	3	4	5	6
FT	DUKUNGAN OPSMAL POLRES			700.000.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.116-Kota Bumi)			86.200.000	RM
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN			86.200.000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12,0	2.000.000	24.000.000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1.450.000	17.400.000	
	- BENDAHARA PENGELUARAN [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1.200.000	14.400.000	
	- STAF PENGELOLA KEUANGAN [3 ORG x 12 BLN]	36,0	900.000	32.400.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.116-Kota Bumi)			611.800.000	RM
	> OPS ANTIK			15.568.000	
	- Uang Saku antik [8 ORG x 14 HARI]	112,0	31.600	3.472.000	
	- Uang Makan antik [8 ORG x 14 HARI]	112,0	83.000	9.296.000	
	- Dana Satuan antik [8 ORG x 14 HARI]	112,0	18.000	2.016.000	
	- Bekal Kesehatan antik [8 ORG x 14 HARI]	112,0	7.000	784.000	
	> OPS ZEBRA			15.568.000	
	- Uang Saku zebra [8 ORG x 14 HARI]	112,0	31.000	3.472.000	
	- Uang Makan zebra [8 ORG x 14 HARI]	112,0	83.000	9.296.000	
	- Dana Satuan zebra [8 ORG x 14 HARI]	112,0	18.000	2.016.000	
	- Bekal Kesehatan zebra [8 ORG x 14 HARI]	112,0	7.000	784.000	
	> OPS KESELAMATAN			23.352.000	
	- Uang Saku keselamatan [8 ORG x 21 HARI]	168,0	31.000	5.208.000	
	- Uang Makan keselamatan [8 ORG x 21 HARI]	168,0	83.000	13.944.000	
	- Dana Satuan keselamatan [8 ORG x 21 HARI]	168,0	18.000	3.024.000	
	- Bekal Kesehatan keselamatan [8 ORG x 21 HARI]	168,0	7.000	1.176.000	
	> OPS SIKAT			15.568.000	
	- Uang Saku SIKAT [8 ORG x 14 HARI]	112,0	31.000	3.472.000	
	- Uang Makan SIKAT [8 ORG x 14 HARI]	112,0	83.000	9.296.000	
	- Dana Satuan SIKAT [8 ORG x 14 HARI]	112,0	18.000	2.016.000	
	- Bekal Kesehatan SIKAT [8 ORG x 14 HARI]	112,0	7.000	784.000	
	> OPS PATUH			15.568.000	
	- Uang Saku PATUH [8 ORG x 14 HARI]	112,0	31.000	3.472.000	
	- Uang Makan PATUH [8 ORG x 14 HARI]	112,0	83.000	9.296.000	
	- Dana Satuan PATUH [8 ORG x 14 HARI]	112,0	18.000	2.016.000	
	- Bekal Kesehatan PATUH [8 ORG x 14 HARI]	112,0	7.000	784.000	
	> OPS CEMPAKA			15.568.000	
	- Uang Saku CEMPAKA [8 ORG x 14 HARI]	112,0	31.000	3.472.000	
	- Uang Makan CEMPAKA [8 ORG x 14 HARI]	112,0	83.000	9.296.000	
	- Dana Satuan CEMPAKA [8 ORG x 14 HARI]	112,0	18.000	2.016.000	
	- Bekal Kesehatan CEMPAKA [8 ORG x 14 HARI]	112,0	7.000	784.000	
	> OPS KETUPAT			33.360.000	
	- Uang Saku KETUPAT [15 ORG x 16 HARI]	240,0	31.000	7.440.000	
	- Uang Makan KETUPAT [15 ORG x 16 HARI]	240,0	83.000	19.920.000	
	- Dana Satuan KETUPAT [15 ORG x 16 HARI]	240,0	18.000	4.320.000	
	- Bekal Kesehatan KETUPAT [15 ORG x 16 HARI]	240,0	7.000	1.680.000	
	> OPS LILIN			16.680.000	
	- Uang Saku LILIN [10 ORG x 12 HARI]	120,0	31.000	3.720.000	
	- Uang Makan LILIN [10 ORG x 12 HARI]	120,0	83.000	9.960.000	
	- Dana Satuan LILIN [10 ORG x 12 HARI]	120,0	18.000	2.160.000	
	- Bekal Kesehatan LILIN [10 ORG x 12 HARI]	120,0	7.000	840.000	
	> DUK OPERASIONAL			480.599.000	
	- TIPPIRING SHABARA	1,0	6.108.000	6.108.000	
	- TAMBAHAN LIDIK SIDIK NARKOBA	5,0	53.057.000	265.285.000	
	- TAMBAHAN LIDIK SIDIK TIPIDUM (PERKARA SULIT)	7,0	27.025.000	189.175.000	

DUKOPS POLRES MESUJI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (120917) POLRES PESAWARAN
 ALOKASI Rp. 47.240.000,000

Halaman: 12

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN D17-Bandar Lampung)			110.958.000	RM
	- Residivis Curamtor	2,0	9.248,500	18.497.000	
	- Residivis Narikoba	2,0	9.248,500	18.497.000	
	- Residivis Perjujukan	2,0	9.248,500	18.497.000	
	- Takson Pemanan	2,0	9.248,500	18.497.000	
	- Pakse Lip	2,0	9.248,500	18.497.000	
	- Dist Culektor	2,0	9.248,500	18.497.000	
VK	KEGIATAN 2 PRIORITAS POLRI			130.011.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN D17-Bandar Lampung)			130.011.000	RM
	> PENANGGULANGAN TERORISME/RADIKALISME DAN INTOLERANSI			130.011.000	
	- Lisk	86,0	595,000	51.120.000	
	- Panggalangan Individu	1,0	22.740,000	22.740.000	
	- Panggalangan Kelompok	1,0	31.967,000	31.967.000	
	- Tuljar	1,0	8.925,000	8.925.000	
	- Bajar	1,0	9.254,000	9.254.000	
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			2.420.530,000	
3128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Interna[Base Line]			2.420.530,000	
	Lokus: KAB. PESAWARAN				
3128.EBA.302	Layanan Umum	1,0		2.420.530,000	U
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			19.800,000	
	HONOR PMPD			19.800,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN D17-Bandar Lampung)			19.800,000	PMP
	> POLRES			4.800,000	
	- Honor SKCK Polres [1 ORG x 12 BLN]	12,0	400,000	4.800,000	
	> POLSEK			15.000,000	
	- Honor SKCK Polsek Gedung Tatanan [1 ORG x 12 BLN]	12,0	350,000	4.200,000	
	- Honor SKCK Polsek Taglimeng [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3.600,000	
	- Honor SKCK Polsek Kedondong [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3.600,000	
	- Honor SKCK Polsek Padang Cermin [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3.600,000	
FT	DUK OPSNAL POLRES			1.000.000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (120917) POLRES PESAWARAN
 ALOKASI Rp. 47.240.000,000

Halaman: 13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
821115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN D17-Bandar Lampung)			150.240.000	RM
	> HONOR PENGELOLA KEUANGAN			150.240.000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12,0	3.420,000	41.040.000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12,0	3.320,000	39.840.000	
	- PPSMA [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1.520,000	18.240.000	
	- BENDAHARA [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1.320,000	15.840.000	
	- SPK [3 ORG x 12 BLN]	36,0	980,000	35.280.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN D17-Bandar Lampung)			702.451.000	RM
	> TAMBAHAN TINDAK PIDANA LUMUM			384.775,000	
	- Perkara Sulit	3,0	27.025,000	81.075.000	
	- Perkara Sedang	18,0	12.710,000	228.780.000	
	- Perkara Mudah	11,0	7.720,000	84.930.000	
	> TAMBAHAN LISK GIDK NARIKIBA			100.868,000	
	- Lisk Narikoba	2,0	53.280,000	106.560.000	
	- Lisk Narikoba	2,0	42.943,000	84.086.000	
	> GIAT SI TPCOL			12.000,000	
	- Giat Pegecekan JARKOMRAD [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1.000,000	12.000.000	
	> GIAT SIJUM			12.000,000	
	- Peringkapan Perkitan	12,0	1.000,000	12.000.000	
	> GIAT KAPOLRES			48.000,000	
	- Anas Sibatop muka	24,0	2.000,000	24.000.000	
	- Jumat Keliling	24,0	1.000,000	24.000.000	
	> GIAT BAG OPS			31.970,000	
	- Pam Giat Masyarakat [20 ORG x 12 GIAT]	240,0	49,000	11.760.000	
	- Penanganan Bencana Alam [70 ORG x 2 GIAT]	140,0	49,000	6.860.000	
	- Pengamanan Unjuk Rasa [75 ORG x 2 GIAT]	150,0	49,000	7.350.000	
	- GO Bulanan	12,0	500,000	6.000.000	
	> GIAT SI WAKAS			5.000,000	
	- Giat Pte Audit Kinerja	5,0	1.000,000	5.000.000	
	> GIAT SI PROGRAM			8.100,000	
	- Geksklin [3 ORG x 18 GIAT]	54,0	150,000	8.100.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN D17-Bandar Lampung)			14.899,000	RM
	> TAMBAHAN GIAT BAG SIDM			7.551,000	
	- Sidang Perlawanan/Penceraman dan Rujuk	5,0	1.500,000	7.500.000	
	- Giat Raja Bersema	1,0	2.651,000	2.651.000	
	> GIAT SI DOKKES			6.448,000	
	- Giat Donor darah	2,0	2.000,000	4.000.000	
	- Rkes Berkala Non Penunjang	2,0	1.224,000	2.448.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (120917) POLRES PESAWARAN
 ALOKASI Rp. 47.240.000,000

Halaman: 14

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN D17-Bandar Lampung)			8.160,000	RM
	> HONOR PENJELAJA PENGADARAN BARANG DAN JASA			8.160,000	
	- Pejabat Pengadnan [1 ORG x 12 BLN]	12,0	680,000	8.160.000	
521811	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN D17-Bandar Lampung)			4.800,000	RM
	- Dumen Giat Koperes	12,0	100,000	1.200.000	
	- Dumen Giat Sibatop	12,0	100,000	1.200.000	
	- Dumen Giat Si Dumen	12,0	100,000	1.200.000	
524111	Belanja Peralatan Gelas Bina (KPPN D17-Bandar Lampung)			120.250,000	RM
	> GIAT POLRES			38.000,000	
	- Kordnasid Ka Poda [2 ORG x 120 GIAT]	240,0	150,000	36.000.000	
	> GIAT BAGREIN			40.000,000	
	- Penyusunan Anggaran	1,0	40.000,000	40.000.000	
	> GIAT SIKELU			27.800,000	
	- Giat Koperasi [2 ORG x 8 GIAT x 12 BLN]	72,0	150,000	10.800.000	
	- Giat Ka KPPN [4 ORG x 4 GIAT x 12 BLN]	36,0	150,000	5.400.000	
	- Giat Tulup Baku [4 ORG x 4 GIAT]	16,0	150,000	2.400.000	
	> GIAT SAT TANTI			5.400,000	
	- Penggecekan Tahapan dan BB ke Polsek Jajaran [3 ORG x 12 GIAT]	36,0	150,000	5.400.000	
	> GIAT LIRRES			11.250,000	
	- Penggecekan Kesehatan Tahapan Polres dan Polsek Jajaran [8 ORG x 12 GIAT]	36,0	150,000	5.400.000	
	- Paktas Kesehatan Personal Polres dan Polsek Jajaran [3 ORG x 12 GIAT]	36,0	150,000	5.400.000	
	- Rotomisi BPJS [3 ORG x 1 GIAT]	3,0	150,000	450.000	
FU	DOK OPSNAL POLSEK			345.200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (120917) POLRES PESAWARAN
 ALOKASI Rp. 47.240.000,000

Halaman: 15

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN D17-Bandar Lampung)			283.760,000	RM
	> TAMBAHAN LISK SIKELU JAJARAN			177.940,000	
	- Tamtaman Lisk Sida Polsek Jajaran	14,0	12.710,000	177.940.000	
	> POLSEK GEDONG TATAAN			20.400,000	
	- KRYD Patroli Polsek [1 ORG x 160 GIAT]	160,0	50,000	8.000.000	
	> POLSEK KESCHODONG			17.738,000	
	- Pam Giat Masyarakat [8 ORG x 24 GIAT]	192,0	49,000	9.408.000	
	- KRYD Patroli Polsek [1 ORG x 155 GIAT]	155,0	50,000	7.775.000	
	> POLSEK TEGINEING			6.498,000	
	- Pam Giat Masyarakat [8 ORG x 24 GIAT]	192,0	49,000	9.408.000	
	- KRYD Patroli Polsek [1 ORG x 155 GIAT]	155,0	50,000	7.775.000	
	> POLSEK PADANG CERMIN			4.498,000	
	- Pam Giat Masyarakat [8 ORG x 24 GIAT]	192,0	49,000	9.408.000	
	- KRYD Patroli Polsek [1 ORG x 154 GIAT]	154,0	50,000	7.700.000	
	- KRYD Patroli Polsek [1 ORG x 1 GIAT]	1,0	28,000	28.000	
	> TURWALI POLSUBSEKTOR			32.112,000	
	- Giat Turwali Polsubsektor Way Lima [1 ORG x 264 HR]	264,0	50,000	13.200.000	
	- Dumen Turwali Pol Subsektor Way Lima	12,0	1.800,000	21.600.000	
	- Giat Turwali Polsubsektor Negeri Koton [1 ORG x 264 HR]	264,0	50,000	13.200.000	
	- Dumen Turwali Pol Subsektor Negeri Koton	12,0	1.800,000	21.600.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN D17-Bandar Lampung)			30.800,000	RM
	> GIAT ANJAS SILATATAP BELKA			30.800,000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Polsek Gedung Tatanan [40 ORG x 6 GIAT]	240,0	30,000	7.200.000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Polsek Kedondong [30 ORG x 6 GIAT]	180,0	30,000	5.400.000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Polsek Taglimeng [30 ORG x 6 GIAT]	180,0	30,000	5.400.000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Polsek Padang Cermin [30 ORG x 6 GIAT]	180,0	30,000	5.400.000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Pol Subsektor Negeri Koton [20 ORG x 6 GIAT]	120,0	30,000	3.600.000	
	- Giat Anjas Silat Tap Muka Pol Subsektor Way Lima [20 ORG x 6 GIAT]	120,0	30,000	3.600.000	
524111	Belanja Peralatan Dibak Bina (KPPN D17-Bandar Lampung)			30.840,000	RM
	> DUKUNGAN GIAT KE POLRES			7.800,000	
	- Ulang Harian Polsek Gedung Tatanan [5 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	60,0	130,000	7.800.000	
	- Ulang Harian Polsek Kedondong [4 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	48,0	150,000	7.200.000	
	- Ulang Harian Polsek Taglimeng [4 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	48,0	150,000	7.200.000	
	- Ulang Harian Polsek Padang Cermin [4 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	48,0	150,000	7.200.000	
	- Ulang Harian Polsek Pol Subsektor Negeri Koton [2 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	24,0	150,000	3.600.000	
	- Ulang Harian Pol Subsektor Way Lima [2 ORG x 12 GIAT x 1 HR]	24,0	150,000	3.600.000	

DUKOPS POLRES PESAWARAN

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (352642) POLRES TULANG BAWANG BARAT
 ALOKASI Rp. 46,232,769,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

Halaman 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KW	PEMBENTUKAN JARINGAN INTELIJEN (POLRES)			4,584,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			4,584,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Giat Intelijen (Lap Info Sasaran C3)	12.0 BRKS	382,000	4,584,000	
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			18,067,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			1,665,000	PNP
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	> PEMBINAAN INTELIJEN POLRES			1,665,000	
	- Giat Intelijen (1 Org x 9 Giat)	9.0 OG	185,000	1,665,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			16,402,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Binjar (sasaran tomas federasi megow pak) [1 Org x 1 Fonus]	1.0 OG	8,201,000	8,201,000	
	- Binjar (sasaran pegawai moes) [1 Org x 1 Fonus]	1.0 OG	8,201,000	8,201,000	
LF	PENGALANGAN INTELIJEN SASARAN PERORANGAN (POLRES)			73,972,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			73,972,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Pengalangan Perorangan Sasaran Ketua Ponpes [1 ORG x 2 GIAT]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
	- Pengalangan Perorangan Sasaran Ketua Ormas Islam [1 ORG x 2 GIAT]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
LJ	PENGALANGAN INTELIJEN SASARAN KELOMPOK (POLRES)			36,986,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			36,986,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Pengalangan Intelijen Kelompok Sasaran Walet Glesing Gab [2 ORG x 1 GIAT]	2.0 OG	18,493,000	36,986,000	
VK	KEGIATAN 2 PRIORITAS POLRI			14,768,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			14,768,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	> PENANGGULANGAN TERORISME/RADIKALISME DAN INTOLERANSI			14,768,000	
	- Leks (Sasaran empotian ISIS, Eks HTI, Eks Napiter) [1 Org x 6 Hr x 3 Giat]	18.0 DG	500,000	9,000,000	
	- Giat Individu (sasaran empotian ISIS, Eks HTI, Eks Napiter)	1.0 Giat	5,768,000	5,768,000	
3129	Dukungan Manajemen dan Taksis Penanggulangan Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat			2,236,280,000	
3129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Intra(Base Line)	12.0 Layanan, Laborar, Cakupan, Rekomendasi, Utnc		2,236,280,000	
	Lokasi: KAB. TULANG BAWANG BARAT				
3129.EBA.962	Layanan Umum	12.0 Layanan		2,236,280,000	
963	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			2,236,280,000	
B	HONOR PNPB			18,800,000	

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (352642) POLRES TULANG BAWANG BARAT
 ALOKASI Rp. 46,232,769,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

Halaman 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521112	Balanza Pengadaan Bahan Makanan			358,680,000	RM
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	> ULP NON ORGANIK POLSEK			358,680,000	
	- Polsek Tulang Bawang Tengah [3 ORG x 366 HR]	1098.0 OH	70,000	76,860,000	
	- Polsek Tumijajar [3 ORG x 366 HR]	1098.0 OH	70,000	76,860,000	
	- Polsek Gunung Agung [3 ORG x 366 HR]	1098.0 OH	70,000	76,860,000	
	- Polsek Lambu Kibang [3 ORG x 366 HR]	1098.0 OH	70,000	76,860,000	
	- Polsubsektor Tujok [1 ORG x 366 HR]	366.0 OH	70,000	25,620,000	
	- Polsubsektor Way Kenanga [1 ORG x 366 HR]	366.0 OH	70,000	25,620,000	
GM	PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI			35,000,000	
521111	Balanza Kebutuhan Perlengkapan			35,000,000	PNP
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	> ATK SKCK POLRES			15,000,000	
	- ATK SKCK Sat Intelkam Polres	1.0 GIAT	15,000,000	15,000,000	
	- ATK SKCK POLSEK JAJARAN			20,000,000	
	- ATK SKCK Polsek Tuba Tengah	1.0 GIAT	5,000,000	5,000,000	
	- ATK SKCK Polsek Tumijajar	1.0 GIAT	5,000,000	5,000,000	
	- ATK SKCK Polsek Gunung Agung	1.0 GIAT	5,000,000	5,000,000	
	- ATK SKCK Polsek Lambu Kibang	1.0 GIAT	5,000,000	5,000,000	
IO	MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI (POLRES / LANTAS)			3,600,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			3,600,000	PNP
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Jaringan SKCK ONLINE Polres	1.0 Unit	3,600,000	3,600,000	
IP	MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI (POLSEK)			11,280,000	
521119	Balanza Barang Operasional Lainnya			11,280,000	PNP
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	> DUKUNGAN PULSA PDA (POLSEK)			1,200,000	
	- POL SEK TULANG BAWANG TENGAH	12.0 BLN	100,000	1,200,000	
	- JARINGAN SKCK ONLINE			3,600,000	
	- Jaringan SKCK ONLINE Polsek	1.0 UNIT	3,600,000	3,600,000	
	> PRODIK INTELIJEN POLSEK			6,480,000	
	- POLSEK TULANG BAWANG TENGAH	12.0 OG	135,000	1,620,000	
	- POLSEK TUMIJAJAR	12.0 OG	135,000	1,620,000	
	- POLSEK LAMBU KIBANG	12.0 OG	135,000	1,620,000	
	- POLSEK GUNUNG AGUNG	12.0 OG	135,000	1,620,000	
WA	HONOR BENMA / PEMBANTU BENMA			4,800,000	
521115	Balanza Honor Operasional Satuan Kerja			4,800,000	PNP
	(KPPN.116-Kota Bumi)				
	- Honor PBP SKCK Polres [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	400,000	4,800,000	

DUKOPS POLRES TULANG BAWANG BARAT

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (352641) POLRES PRINGSEWU
 ALOKASI Rp. 43,440,112,000

Halaman: 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.017-Bandar Lampung)			23,400,000	PNP
	> HONOR PELTUGAS SKCK POLRES			4,800,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Tk. Polres (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	400,000	4,800,000	
	> HONOR PELTUGAS SKCK POLSEK URBAN			4,200,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Polsek Pringsewu Kota (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	350,000	4,200,000	
	> HONOR PELTUGAS SKCK POLSEK RURAL			14,400,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Polsek Gading Rejo (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Polsek Pardasuka (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Polsek Pagelaran (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Pelaksana SKCK Polsek Sukoharjo (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300,000	3,600,000	
FT	DUK OPSNAL POLRES			1,000,000,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.017-Bandar Lampung)			201,840,000	RM
	> HONOR OPERATOR			3,600,000	
	- Honor Operator SIMAK BMN (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	300,000	3,600,000	
	> HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			188,240,000	
	- KPA (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	3,420,000	41,040,000	
	- PPK (2 ORG x 12 BLN)	24,0 OB	3,320,000	79,680,000	
	- PPSPM (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	1,520,000	18,240,000	
	- Bundahara Pengeluaran (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	1,320,000	15,840,000	
	- SPK (3 ORG x 12 BLN)	36,0 OB	980,000	35,280,000	
	- Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (1 ORG x 12 BLN)	12,0 OB	680,000	8,160,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (352641) POLRES PRINGSEWU
 ALOKASI Rp. 43,440,112,000

Halaman: 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung)			20,960,000	RM
	> DUKUNGAN ATK			560,000	
	- Dukungan ATK Polsek Pringsewu Kota	1,0 GIAT	200,000	200,000	
	- Dukungan ATK Polsek Gading Rejo	1,0 GIAT	90,000	90,000	
	- Dukungan ATK Polsek Pardasuka	1,0 GIAT	90,000	90,000	
	- Dukungan ATK Polsek Pagelaran	1,0 GIAT	90,000	90,000	
	- Dukungan ATK Polsek Sukoharjo	1,0 GIAT	90,000	90,000	
	> SPANDUK/BANNER KAMTIBMAS			20,100,000	
	- Spanduk/Banner Kamtibmas Polsek Pringsewu Kota	34,0 LBR	150,000	5,100,000	
	- Spanduk/Banner Kamtibmas Polsek Gading Rejo	25,0 LBR	150,000	3,750,000	
	- Spanduk/Banner Kamtibmas Polsek Pardasuka	25,0 LBR	150,000	3,750,000	
	- Spanduk/Banner Kamtibmas Polsek Pagelaran	25,0 LBR	150,000	3,750,000	
	- Spanduk/Banner Kamtibmas Polsek Sukoharjo	25,0 LBR	150,000	3,750,000	
521112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.017-Bandar Lampung)			24,980,000	RM
	- Internet Polsek Pringsewu Kota	12,0 BLN	612,500	7,350,000	
	- Internet Polsek Gadingrejo	12,0 BLN	367,500	4,410,000	
	- Internet Polsek Pardasuka	12,0 BLN	367,500	4,410,000	
	- Internet Polsek Pagelaran	12,0 BLN	367,500	4,410,000	
	- Internet Polsek Sukoharjo	12,0 BLN	367,500	4,410,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.017-Bandar Lampung)			36,000,000	RM
	- Transport Kegiatan Dinas Polsek Pringsewu Kota (2 ORG x 24 GIAT)	48,0 OG	150,000	7,200,000	
	- Transport Kegiatan Dinas Polsek Gading Rejo (2 ORG x 24 GIAT)	48,0 OG	150,000	7,200,000	
	- Transport Kegiatan Dinas Polsek Pardasuka (2 ORG x 24 GIAT)	48,0 OG	150,000	7,200,000	
	- Transport Kegiatan Dinas Polsek Pagelaran (2 ORG x 24 GIAT)	48,0 OG	150,000	7,200,000	
	- Transport Kegiatan Dinas Polsek Sukoharjo (2 ORG x 24 GIAT)	48,0 OG	150,000	7,200,000	
FZ	ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POI RFS)			205,400,000	
521112	Belanja Fongadaan Bahan Makanan (KPPN.017-Bandar Lampung)			202,538,000	RM
	> ULP NON ORGANIK POLRES			202,538,000	
	- ULP Non Organik Polres (8 ORG x 366 HR)	2928,0 OH	69,173	202,538,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.017-Bandar Lampung)			102,000	RM
	> Dukungan Administrasi ULP Non Organik			102,000	
	- Dukungan Adm ULP Non Organik	1,0 GIAT	102,000	102,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.017-Bandar Lampung)			2,760,000	RM
	> HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA			2,760,000	
	- Honorarium Kelompok Kerja (3 ORG x 1 PKT)	3,0 OP	920,000	2,760,000	
GA	ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLSEK)			587,650,000	

DUKOPS POLRES PRINGSEWU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (970106) POLRES PESISIR BARAT
 ALOKASI Rp. 25.589,879,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN 145-Lwa)			32.403,000	RM
	> POLRES PESISIR BARAT			32.403,000	
	- Pengalangan Terhadap Ketua/Pengurus/Anggota/Ormas/Kelompok Masyarakat	1,0	16.201,000	16.201,000	
	- Pengalangan terhadap ketua/kordinator kegiatan masyarakat. Budaya	1,0	16.202,000	16.202,000	
3117	Polysoslogarasi: Strotop Keamanan dan Ketertiban-Bidang Keamanan Negara			38,651,000	
3117.BKA	Penantuaan masyarakat dan kelompok masyarakat(Base Line)	30,0		38,651,000	
	Lokasi: KAB. PESISIR BARAT				
3117.BKA.001	Informasi Deteksi Awal Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	30,0		38,651,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			38,651,000	U
KZ	PEMBINAAN INTELIJEN (POLRES)			1,665,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN 145-Lwa)			1,665,000	PMP
	> POLRES PESISIR BARAT			1,665,000	
	- Infus	9,0	185,000	1,665,000	
LF	PENGALANGAN INTELIJEN GASARAN PERUBAHAN (POLRES)			38,986,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN 145-Lwa)			36,986,000	RM
	> GIAT INTELIJEN POLRES PESISIR BARAT			36,986,000	
	- Pengalangan terhadap eks pelaku kejahatan internasional	1,0	18,493,000	18,493,000	
	- Pengalangan terhadap eks ketua/anggota/pengurus organisasi radikal/teroris	1,0	18,493,000	18,493,000	
3128	Dukungan Manajemen dan Telnis Pemertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			2,390,531,000	
3128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)	12,0		2,390,531,000	
	Lokasi: KAB. PESISIR BARAT				
3128.EBA.002	Layanan Umum	12,0		2,390,531,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			2,390,531,000	U
B	HONOR PNP			24,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (970106) POLRES PESISIR BARAT
 ALOKASI Rp. 25.589,879,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN 145-Lwa)			24,600,000	PMP
	> HONOR PELAKSANAAN SKCK			24,600,000	
	- Honor Pemb Benam [1 ORG x 12 BLN]	12,0	400,000	4,800,000	
	- Honor Pelugas pelaksanaan [1 ORG x 12 BLN]	12,0	400,000	4,800,000	
	>> HONOR PELAKSANAAN SKCK/POLSEK POLRES PESISIR BARAT			15,000,000	
	- Polsek Pesisir Tengah [1 ORG x 12 BLN]	12,0	350,000	4,200,000	
	- Polsek Pesisir Utara [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3,600,000	
	- Polsek Pesisir Selatan [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3,600,000	
	- Polsek Berginjal [1 ORG x 12 BLN]	12,0	300,000	3,600,000	
FT	DUKOPSINAL POLRES			900,000,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN 145-Lwa)			118,680,000	RM
	> HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			118,680,000	
	- Ketua Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12,0	3,010,000	36,120,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12,0	2,920,000	35,040,000	
	- Pejabat Penandatangan SPN [1 ORG x 12 BLN]	12,0	1,250,000	15,000,000	
	- Bendahara Pengeluaran [1 BLN x 12 BLN]	12,0	1,090,000	13,080,000	
	- Staf Pengelola Keuangan/Anggaran [2 ORG x 12 BLN]	24,0	810,000	19,440,000	

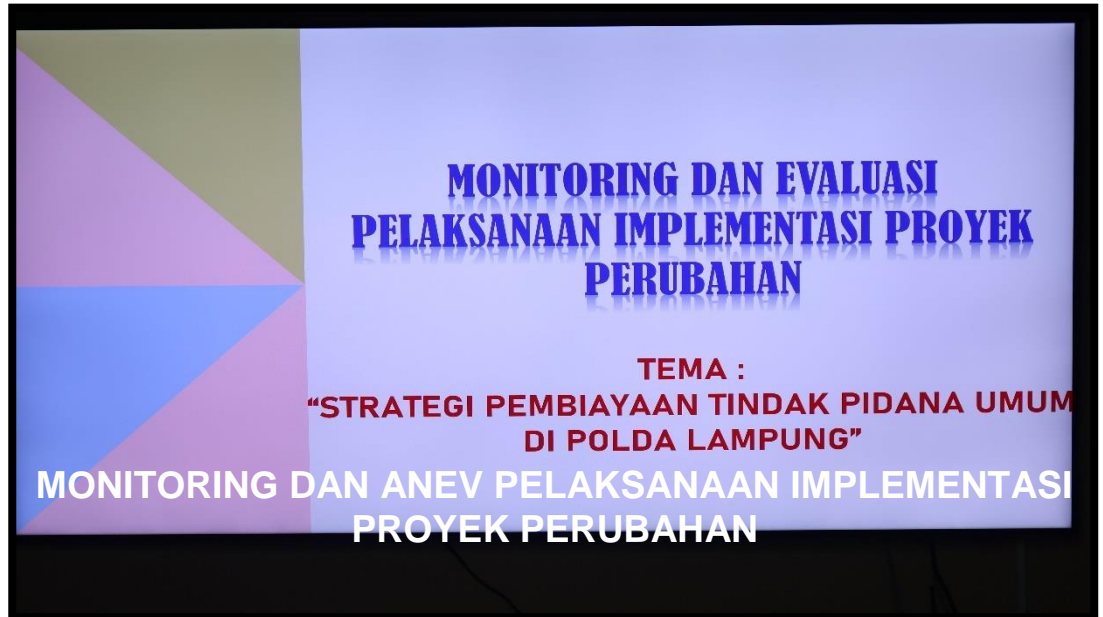
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (970106) POLRES PESISIR BARAT
 ALOKASI Rp. 25.589,879,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN 145-Lwa)			663,003,000	RM
	> TAMBAHAN DUKUNGAN OPERASI KEPOLISIAN POLRES PESISIR BARAT			119,540,000	
	>> OPERASI SIKAT POLRES PESIBAR			29,190,000	
	- OPERASI SIKAT [15 ORG x 14 HARI]	210,0	139,000	29,190,000	
	>> OPERASI ANTIK POLRES PESIBAR			29,190,000	
	- OPERASI ANTIK [15 ORG x 14 HARI]	210,0	139,000	29,190,000	
	>> OPERASI KETUPAT POLRES PESIBAR			33,360,000	
	- OPERASI KETUPAT [20 ORG x 12 HARI]	240,0	139,000	33,360,000	
	>> OPERASI LILIN POLRES PESIBAR			27,800,000	
	- OPERASI LILIN [20 ORG x 10 HARI]	200,0	139,000	27,800,000	
	> TINDAK PIDANA NARKOBA POLRES PESISIR BARAT			217,514,000	
	- PENYELIDIKAN NARKOBA	3,0	31,400,000	94,200,000	
	- PENYELIDIKAN NARKOBA	2,0	21,657,000	43,314,000	
	- PERSEKUBANGAN	1,0	80,000,000	80,000,000	
	> TAMBAHAN LIDIK SIDIK POLRES			209,243,000	
	- Perkara Sulit	3,0	35,697,000	107,091,000	
	- Perkara Mudah	3,0	21,184,000	63,552,000	
	- Perkara Mudah	5,0	7,720,000	38,600,000	
	> PERELIHARAN TAHANAN POLRES PESIBAR			38,600,000	
	- PERAWATAN TAHANAN (KEKURANGAN DAPAT DIBAYARKAN TAHUN SEBELUMNYA) [20 ORG x 366 HARI]	7320,0	5,000	36,600,000	
	> TURJAWALI RUTIN POLRES PESIBAR			59,130,000	
	- PATROLI POLRES [3 ORG x 366 GIAT]	1095,0	54,000	59,130,000	
	> GIAT BINTIBMAS POLRES PESISIR BARAT			10,489,000	
	- UANG SAKU [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	22,000	3,168,000	
	- UANG MAKAN [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	23,000	3,312,000	
	- DANA SATUAN [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	7,000	1,008,000	
	- SARANA KONTAK	3,0	1,000,000	3,000,000	
	> GIAT BINKAMSA POLRES PESIBAR			10,489,000	
	- UANG SAKU [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	22,000	3,168,000	
	- UANG MAKAN [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	23,000	3,312,000	
	- UANG SATUAN [3 ORG x 48 GIAT]	144,0	7,000	1,008,000	
	- SARANA KONTAK	3,0	1,000,000	3,000,000	
524111	Belanja Penyalangan Dana Basis (KPPN 145-Lwa)			118,317,000	RM
	> KEGIATAN DINAS PERSONIL POLRES PESIBAR			118,317,000	
	- KEGIATAN RAPAT KELUAR KOTA	1,0	118,317,000	118,317,000	
DUKOPS POLSEK				326,200,000	

DUKOPS POLRES PESISIR BARAT



3. Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan.

E. Pasca Diklat



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
PANGKAT/NRP : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
JABATAN : KAPOLDA LAMPUNG
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRORENA POLDA LAMPUNG " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Lampung Selatan, November 2023
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLDA LAMPUNG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
PANGKAT/NRP : KOMBES POL/66050661
JABATAN : KARORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Lampung Selatan, Oktober 2023
KEPALA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN


Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050661

PERNYATAAN DUKUNGAN KARORENA POLDA LAMPUNG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/72060522
JABATAN : KABAG STRAJEMEN RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Lampung Selatan, November 2023

KABAG STRAJEMEN RORENA


DASEP WAHYU PERMADI, S.P., S.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72060522

**PERNYATAAN DUKUNGAN KABAG STRAJEMEN POLDA
LAMPUNG**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

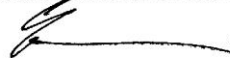
NAMA : ERWANTO, S.Sos., M.M.
PANGKAT/NIP : PENATA/197407232007101001
JABATAN : PS. KASUBBAGRENMIN RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Lampung Selatan, November 2023
PS. KASUBBAGRENMIN RORENA



ERWANTO, S.Sos., M.M.
PENATA/197407232007101001

**PERNYATAAN DUKUNGAN KSBG RENMIN POLDA
LAMPUNG**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

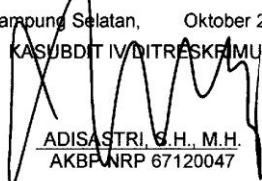
Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ADISASTRI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/67120047
JABATAN : KASUBDIT IV DITRESKRIMUM
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Lampung Selatan, Oktober 2023
KASUBDIT IV DITRESKRIMUM

ADISASTRI, S.H., M.H.
AKBP/NRP 67120047

**PERNYATAAN DUKUNGAN KASUBDIT IV DITRESKRIMUM
POLDA LAMPUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kota Gapura, Kec Kota Bumi, Kab Lampung Utara 34516

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Drs. MAT SOLEH, M.Pd.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPALA KESBANGPOL
KESATUAN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Kota Bumi, Oktober 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



**PERNYATAAN DUKUNGAN KA KESBANGPOL KAB.
LAMPUNG UTARA**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung Bandar Lampung 35215

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KESATUAN : PROVINSI LAMPUNG

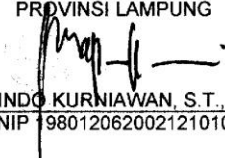
Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Bandar Lampung, Oktober 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG


MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M.
NIP 198012062002121010

PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD PROVINSI LAMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. Basuki Rahmat No. 21, Gedong Pakuon, Kec Teluk Betung Selatan,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35211

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MADYA
JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KESATUAN : PROVINSI LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Bandar Lampung, Oktober 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si.
NIP 05151989011001

**PERNYATAAN DUKUNGAN KA KESBANGPOL PROVINSI
LAMPUNG**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR LAMPUNG TENGAH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANDIK PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M.
PANGKAT/NRP : AKBP/77111028
JABATAN : KAPOLRES LAMPUNG TENGAH
KESATUAN : POLRES LAMPUNG TENGAH

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan " **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Gunung Sugih, Oktober 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH

ANDIK PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M.
RESOR LAMPUNG NRP 77111028

PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES LAMTENG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR METRO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HERI SULISTYO NUGROHO, S.I.K., M.I.K.
PANGKAT/NRP : AKBP/80051323
JABATAN : KAPOLRES METRO
KESATUAN : POLRES METRO

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Metro, Oktober 2023
KAPOLRES METRO
HERI SULISTYO NUGROHO, S.I.K., M.I.K.
AKBP NRP 80051323



PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES METRO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

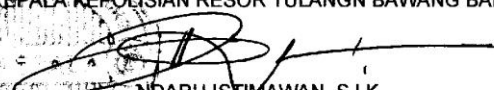
Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NDARU ISTIMAWAN, S.I.K.
PANGKAT/NRP : AKBP/78111143
JABATAN : KAPOLRES TULANG BAWANG BARAT
KESATUAN : POLRES TULANG BAWANG BARAT

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Panaragan Jaya, Oktober 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TULANGN BAWANG BARAT

NDARU ISTIMAWAN, S.I.K.
AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 78111143

**PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES TULANG BAWANG
BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Raya Lintas Pantai Timur Sumatera No. 16, Sukadana Ilir
Kec Sukadana, Kab Lampung Timur 34194

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dr. Drs. SUKISMANTO AJI, M.Si.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPAL BPKAD
KESATUAN : KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR RORENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Sukadana, Oktober 2023
KEPALA BADAN PENGELOJA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

* Dr. Drs. SUKISMANTO AJI, M.Si.
NIP. 197203051993031002

**PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KAB. LAMPUNG
TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Jend. Sudirman No. 01, Tj Aman, Kec Kota Bumi, Kab Lampung Utara 34511

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPAL BPKAD
KESATUAN : KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Kota Bumi, Oktober 2023
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA


Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M.
NIP 196607041992031002

**PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KAB. LAMPUNG
UTARA**



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Imam Bonjol No. 2, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro 34111

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ISMET, S.E.
PANGKAT/NRP : PEMBINA TK I
JABATAN : KEPALA BPKAD
KESATUAN : KOTA METRO

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Metro, Oktober 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA METRO



ISMET, S.E.
NIP. 197107162003121001

PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KOTA METRO



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. AH. Nasution No. 5, Imopuro, Kec Metro Pusat, Kota Metro 34111

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dr. ANANG RISGIYANTO, SKM., M. Kes.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPALA BAPPEDA
KESATUAN : KOTA METRO

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Metro, Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA METRO

Dr. ANANG RISGIYANTO, SKM., M. Kes.
NIP 197507312000031002

PERNYATAAN DUKUNGAN KA BAPPEDA KOTA METRO



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. 15, Hadimulyo Bar, Kec Metro Pusat, Kota Metro 34125

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Dra. ROSITA, M.M.
PANGKAT/NRP : PEMBINA UTAMA MUDA
JABATAN : KEPALA KESBANGPOL
KESATUAN : KOTA METRO

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan ” **STRATEGI PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM DI POLDA LAMPUNG** ” yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : JOKO SISWONDO HARSONO, S.E.
PANGKAT/NRP : AKBP/74100776
JABATAN : KABAGRENPROGAR ROENA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya

Metro, Oktober 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA METRO



PERNYATAAN DUKUNGAN KESBANGPOL KAB METRO





**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG
Drs. M. FIRSADA, M. Si.**



**TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL
Pit. KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M.**









**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TIMUR
SYAHRUL SYAH, S.Pd.**



**TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA
Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA
Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M.**



**TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA
Drs. MAT SOLEH, M.Pd.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA
Drs. MAT SOLEH, M.Pd.**





**TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD KOTA METRO ISMET, S.E.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
KA BPKAD KOTA METRO ISMET, S.E.**











**TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL
KASUBBAG RENMIN BIRO RENAIKANA POLDA LAMPUNG
ERWANTO, S.Sos., S.M.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL
KASUBBAG RENMIN BIRO RENAIKANA POLDA LAMPUNG
ERWANTO, S.Sos., S.M.**



**TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL
STAF DALPROGAR BIRO RENA POLDA LAMPUNG
ARIS SETIA WIJAYA, S.H.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL
STAF DALPROGAR BIRO RENA POLDA LAMPUNG
ARIS SETIA WIJAYA, S.H.**







TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL PETANI YANTO



**DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL
PETANI YANTO**

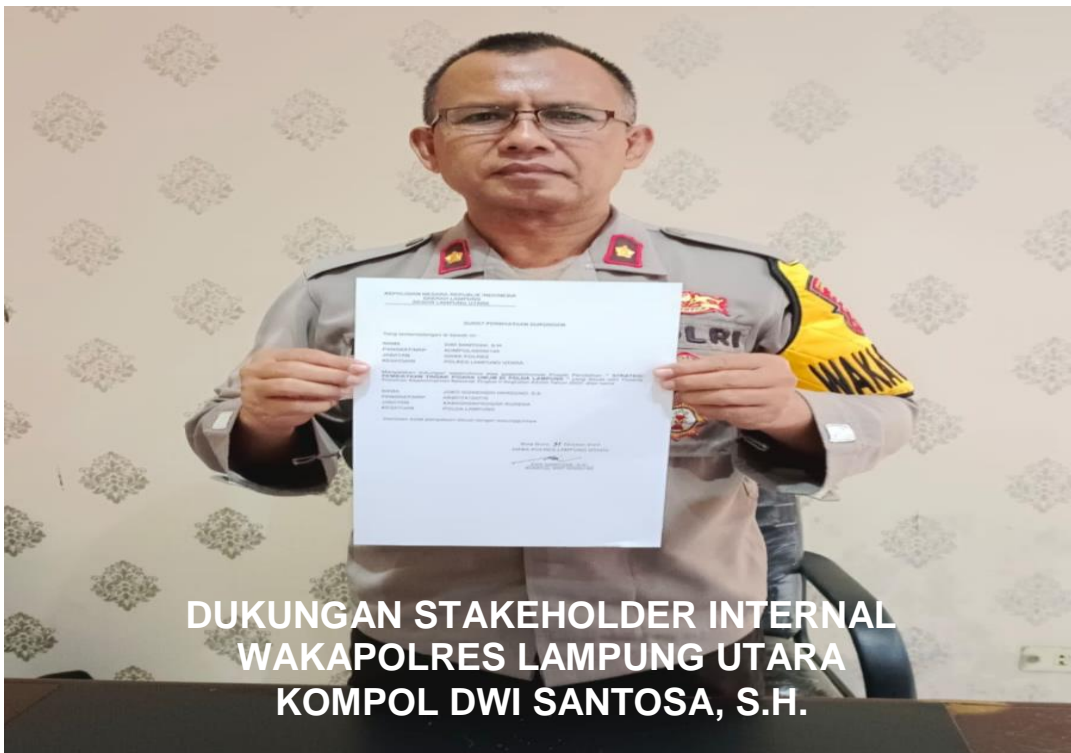








**TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL
WAKAPOLRES LAMPUNG UTARA
KOMPOL DWI SANTOSA, S.H.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL
WAKAPOLRES LAMPUNG UTARA
KOMPOL DWI SANTOSA, S.H.**



**TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL
KABAGREN POLRES LAMPUNG TENGAH
KOMPOL DAYAT HADI JAYA, S.H., M.H.**

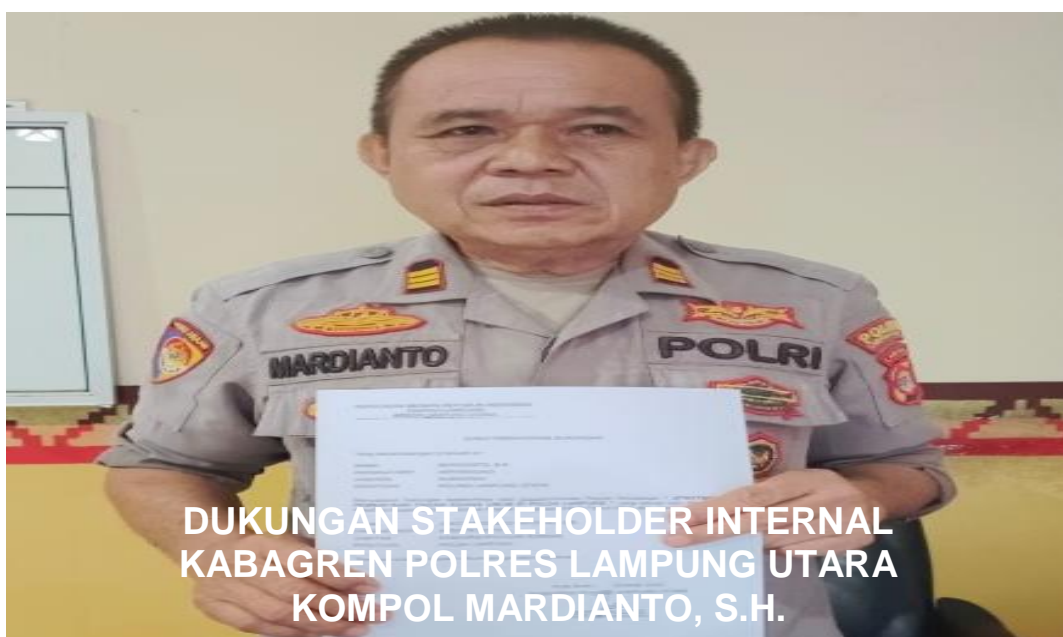


**DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL
KABAGREN POLRES LAMPUNG TENGAH
KOMPOL DAYAT HADI JAYA, S.H., M.H.**





**TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL
KABAGREN POLRES LAMPUNG UTARA
KOMPOL MARDIANTO, S.H.**



**DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL
KABAGREN POLRES LAMPUNG UTARA
KOMPOL MARDIANTO, S.H.**





